

The cover features a central, light-colored, cloud-like frame with a brown border. Inside this frame, the title is written. Surrounding the frame are several decorative elements: four large, colorful geometric star patterns (blue, teal, and brown) in the corners, and several smaller, simpler geometric shapes (stars and lines) hanging from the top and placed within the frame. The background is a light gray with faint, larger-scale geometric patterns.

PERAN MUI

TERHADAP PENINGKATAN FASILITAS KEAGAMAAN

Studi Deskriptif Terhadap
MUI Kota Bandung

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Menurut Talcon Parsons, masyarakat terbentuk atas substruktur-substruktur yang dalam fungsi-fungsi mereka masing-masing, saling bergantung sehingga perubahan-perubahan yang terjadi dalam substruktur-substruktur lainnya pula.⁸⁷

Pembangunan masyarakat sebagai sebuah perubahan sosial yang di rencanakan banyak melibatkan unsur-unsur sosial, termasuk para pemeluk agama tersebut dapat muncul dalam prose perencanaan, pelaksanaan, ataupun pemanfaatan hasil-hasil pembangunan baik yang di selenggarakan oleh pemerintah maupun oleh kalangan masyarakat.⁸⁸

⁸⁷ Dalam Ilyas dan Farid Ahmad, *Sosiologi Islam dan Masyarakat Kontemporer*, terj. Ilyas Basyaib, (Bandung: Mizan, 1997),h. 20

⁸⁸ Lihat dalam Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, (Bandung: Rosdakarya, 2000), h. 109

Sebagai subyek atau pelaksana perubahan, lembaga-lembaga keagamaan yang resmi memiliki hubungan dengan pemerintah memiliki kapasitas untuk melakukan perubahan dalam porsi yang lebih besar lagi ketimbang perubahan yang dilakukan secara perorangan. Hal ini salah satunya disebabkan karena potensi yang berbeda-beda terpusat pada tujuan yang sama sebagai sebuah sistem sosial yang memiliki satu kesatuan utuh.⁸⁹

Hal ini menjelaskan bahwa agama dan segala hal yang berkaitan dengan agama itu sendiri di pandang sebagai suatu fenomena sosial, peristiwa kemasyarakatan dan oleh karenanya ia dapat di analisis sebab terdiri dari

⁸⁹ Sistem social merupakan suatu bentuk system khusus. Sistem ini berlainan dengan system atomik, sistem molekuler, atau sistem galaktik, dalam hal bahwa sistem sosial terbentuk oleh orang atau kelompok orang yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi perilaku. Termasuk kedalam bentuk sistem sosial adalah keluarga-keluarga, organisasi-organisasi, komunitas, masyarakat dan kebudayaan. Model sistem sosial ialah model yang dapat di terapkan kepada semua bentuk perhimpunan atau kolektifitas manusia. Dalam Jusman Iskandar, *Dinamika Kelompok Organisasi dan komunikasi Sosial*, (Bandung: Program Pascasarjana IAIN Bandung, 2001), h. 67

suatu kompleks kaidah dan peraturan yang dibuat saling berkaitan dan terarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu.

Diakui bahwa diantara semua gejala kebudayaan manusia, yang paling sulit didekati dengan analisis logis semata-mata adalah mitos dan religi. Menurut Thomas Aquinas, kebenaran religius bersifat suprarasional atau supernatural, namun tak bisa disebut irasional. Artinya hanya dengan rasio saja kita tak dapat menembus misteri iman. Namun misteri-misteri itu bukannya bertentangan dengan rasio, melainkan melengkapi dan menyempurnakan rasio.⁹⁰

Oleh karena itu, secara sosiologis pertumbuhan keberagamaan salah satunya dapat ditandai dengan semakin banyaknya fasilitas-fasilitas keagamaan yang digunakan untuk melaksanakan kewajiban agama dalam sebuah kelompok masyarakat. Hal ini tidaklah mengherankan mengingat sosiologi melihat sesuatu secara empirik dan formalistik. Hal ini juga berhubungan

⁹⁰ Ernst Cassirer, *Manusia dan kebudayaan: Sebuah esai Tentang Manusia*, terj Alois A. Nugroho, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1987), h. 109

dengan keberhasilan penyebaran pemahaman keagamaan yang dilakukan oleh suatu lembaga yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan berdimensi keagamaan tadi.

Perkembangan pemahaman kegamaan memang tidak hanya diidentifikasi dari jumlah fasilitas atau semakin banyaknya orang yang menunaikan kewajiban agama sebab bisa saja motif yang ada di belakang semua itu bukan motif agama semata-mata. Namun demikian, dalam perspektif sosiologi agama hal tersebut tetap dapat dipandang sebagai sebuah bentuk mobilitas yang dialami oleh sekelompok masyarakat berhubungan dengan agama dan kepercayaan yang mereka yakini.

Agama Islam misalnya, yang banyak ditandai dengan ritual-ritual keagamaan semacam ibadah zakat, haji, qurban dan ibadah-ibadah yang dilakukan di tempat-tempat yang memerlukan fasilitas seperti mesjid dapat dihitung berdasarkan jumlahnya untuk mengetahui peningkatan atau pengurangannya.

Dalam hal ini, Indonesia sebagai sebuah negara majemuk yang memiliki penduduk yang mayoritas

memeluk agama Islam memiliki tuntunan perubahan dari kalangan mayoritas tadi berhubungan dengan perubahan sosial yang dihadapi oleh semua komponen bangsa ini.

Dengan tuntunan yang diakibatkan dari terjadinya proses perubahan sosial ini, maka di Indonesia lahir beberapa organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persis, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan lembaga-lembaga dakwah Islamiyah lainnya yang semuanya merupakan lembaga sosial keagamaan yang bergerak untuk mengembangkan ajaran Islam.

Semua lembaga dakwah Islam ini berpacu dalam melaksanakan tugasnya sementara terus berupaya memecahkan masalah yang dihadapi oleh umat manusia (kaum muslimin) agar menuju pada perbaikan dan kemajuan dalam mengamalkan agama Islam.

Salah satu lembaga dakwah Islam yang didirikan oleh pemerintah Republik Indonesia berbeda dengan ormas-ormas seperti Muhammadiyah, Persis dan NU serta ormas agama lainnya ialah Majelis Ulama Indonesia

(MUI) pada tanggal 17 rajab 1395 Hijriyah dan bertepatan dengan tanggal 26 juli 1975 oleh ulama, Zu'amah dan cendekiawan Muslim dalam sebuah Musyawarah Nasional ke I Majelis Ulama seluruh Indonesia yang berkedudukan di ibukota Republik Indonesia.

Tujuan didirikannya Majelis Ulama Indonesia pada saat itu antara lain bertujuan untuk mengamalkan ajaran Islam. Ikut serta masyarakat yang aman, damai, adil dan makmur rohaniyah dan jasmaniyah yang diridhoi oleh Allah SWT. Di negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Untuk mengejar tujuan-tujuan ini, Majelis Ulama Indonesia melaksanakan berbagai upaya diantaranya; 1) memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi oleh Allah SWT; 2) memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat; 3) meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama

dalam menetapkan persatuan dan kesatuan bangsa; 4) menjadi penghubung antara ulama dan umara' dan penerjemah timbal-balik antara pemerintah dan umat guna menyukseskan pembangunan nasional; 5)

Meningkatkan hubungan serta kerjasama antara organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan Muslim; dan 6) mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antar-umat beragama dan melaksanakan usaha lainnya yang sesuai dengan tujuan organisasi.⁹¹

Selanjutnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan hubungan kerja dengan pemerintah dan mengadakan konsultasi serta informasi secara timbal-balik dan kerjasama dengan organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan Muslim dalam memberikan bimbingan dan tuntunan serta pengayoman kepada masyarakat serta mengadakan kerjasama dengan organisasi dan lembaga

⁹¹ Selengkapanya dapat dilihat dalam pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia, 1995, h. 11

lainnya dalam pembangunan, kemudian, MUI tidak berafiliasi kepada salah satu partai politik.

Sebagai sebuah organisasi yang lahir di tingkat pusat, MUI mengembangkan sayap pengaruhnya hingga di tingkat propinsi, kabupaten, kecamatan dan bahkan hingga tingkat desa atau kelurahan. Hal ini ditempuh sebagai salah satu upaya pembinaan dan bimbingan dalam mengkoordinasikan sesama pengurus baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Hubungan kerja Majelis Ulama Indonesia di setiap tingkat yang ada di wilayah Indonesia sudah barang tentu memiliki persamaan disamping beberapa perbedaan dan hal ini tergantung pada hasil keputusan musyawarah yang dilaksanakan di setiap tingkatan yang tentunya di sesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang setiap saat mengalami perubahan dimana perubahan dan dinamika masyarakat antara suatu daerah dengan daerah lainnya terdapat perbedaan.

Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung misalnya. MUI Kota Bandung ini berkedudukan di

propinsi Jawa Barat dan memiliki tujuan serta sasaran yang jelas yang didukung oleh program kerja yang telah ditetapkan sebelumnya sebagaimana dapat dilihat dalam hasil musyawarah daerah MUI Kota Bandung dalam program kerja dan organisasi periode 2008-2013

Hal ini dapat digambarkan dalam tujuan dan sasaran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandung. Adapun tujuan proramnya ialah terbangunnya umat Islam yang berkualitas (*khayru ummah*), terciptanya sumber daya manusia berakhlak mulia (*akhlaq al-karimah*) dan terwujudnya kemapanan ekonomi umat yang kuat (*al-iqtishad al-islamiyah al-quwwah*).

Kemudian, sasaran yang ditetapkan adalah semakin meningkatnya kualitas pemahaman ajaran Islam di kalangan umat Islam Kota Bandung sehingga menjadi motivasi penggerak dalam membangun umat yang lebih berakhlak mulia serta berkemampuan ekonomi yang kuat. Semakin meningkatnya personalia Majelis Ulama Indonesia baik di tingkat Kota Bandung maupun di tingkat kecamatan dan kelurahan serta lahirnya kader-

kader baru yang akan menghadapi jajaran kepengurusan MUI di setiap level.

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, MUI Kota Bandung menetapkan program kerja 2008-20013 yang terdiri dari beberapa bidang seperti:

1. Bidang ukhuwah Islamiyah dan Hubungan Antar-organisasi
2. Bidang Dakwah dan Syi'ar Islam
3. Bidang Hubungan Ulama dan Umara' dan Antar-Umat Beragama
4. Bidang fatwa dan Pengkajian
5. Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia
6. Bidang Organisasi dan Administrasi
7. Bidang Pembangunan dan Ekonomi Umat
8. Bidang Konsultasi Keagamaan, Perpustakaan dan Pembinaan Muallaf
9. Bidang Kesejahteraan dan Kerumahtanggaan

Dari sekian banyak program kerja MUI Kota Bandung yang akan dianalisis secara mendalam dalam penelitian ini antara lain mengenai peningkatan jumlah

fasilitas keagamaan dan pelaksanaan ibadah khususnya dalam hal jumlah masjid, pelaksanaan Zakat dan pelaksanaan Qurban sebagai sebuah kewajiban ritual dalam agama Islam.

Dengan di dasarkan pada titik tekan pembahasan di atas, maka dilakukan penelitian mengenai peranan MUI dalam hal perannya sebagai institusi sosial-keagamaan dalam rangka meningkatkan fasilitas keagamaan dan pelaksanaan ibadah di kalangan umat Islam khususnya di Kota Bandung.

B. Perumusan Masalah

Beberapa permasalahan yang akan di ketengahkan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimanakah peran MUI Kota Bandung dalam proses perubahan sosial kemasyarakatan?
2. Bagaimanakah peran MUI dalam meningkatkan fasilitas keagamaan dan pelaksanaan ibadah di Kota Bandung ?

C. Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan yang akan dicapai melalui penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai peran MUI Kota Bandung dalam proses perubahan sosial kemasyarakatan.
2. Untuk mengetahui peran MUI dalam meningkatkan fasilitas keagamaan dan pelaksanaan ibadah di Kota Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Setelah melakukan penelitian, diharapkan penelitian ini berguna antara lain :

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan rujukan dan pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut mengenai peranan Majelis Ulama Indonesia dalam kesadaran ibadah dan peningkatan fasilitas keagamaan, lebih-lebih untuk peningkatan dakwah Islamiyah di masyarakat.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan untuk lebih mengupayakan peran MUI dalam masyarakat dan menjadi bahan evaluasi peran serta MUI dalam pembangunan masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut Bahtiar Effendy, baik secara teologis maupun sosiologis, agama dapat dipandang sebagai instrumen untuk memahami dunia dan dalam konteks itu hampir hampir tidak ada kesulitan bagi agama manapun untuk menerima premis tersebut.

Hal ini, secara teologis –terlebih dalam agama Islam- banyak disebabkan oleh karakter agama yang *omnipresent* yakni bahwa agama baik melalui simbol-simbol atau nilai-nilai yang dikandungnya “selalu hadir di mana mana”, ikut serta mempengaruhi bahkan membentuk struktur sosial, budaya, ekonomi dan politik serta kebijakan publik. Dengan ciri ini pula bahwa di manapun suatu agama berada diharapkan dapat memberi panduan nilai bagi seluruh diskursus kegiatan manusia

baik yang bersifat sosial-budaya, ekonomi maupun politik. Sementara itu secara sosiologis, tak jarang agama menjadi faktor penentu dalam proses transformasi dan modernisasi.⁹²

Dalam konteks ini, agama dan berbagai bentuknya yang muncul dalam lembaga atau institusi sosial yang memiliki tujuan menanamkan dan melestarikan nilai-nilai yang dikandungnya senantiasa berupaya untuk terus melakukan perubahan dalam kehidupan manusia.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagaimana organisasi lain juga mengandung dimensi kebijakan administrasi yang memiliki peranan penting dalam rangka mencapai tujuan dari berbagai bidang kehidupan. Untuk kepentingan ini, tentunya diperlukan sumber daya manusia merupakan suatu pendekatan yang didasarkan

⁹² Bahtiar Effendy, "Masyarakat dan Tantangan Globalisasi," dalam *Masyarakat dan pluralisme Keagamaan*, (Yogyakarta: Galang Press, 2001), h. 7

pada empat prinsip; pertama, sumber daya manusia merupakan modal terpenting yang dimiliki

Oleh setiap organisasi; kedua, keberhasilan ini hanya bisa dicapai jika peraturan dan kebijakan serta prosedur yang bertalian dengan manusia dari organisasi tersebut saling berhubungan dengan tahapan pencapaian tujuan; ketiga, kultur dan nilai serta suasana organisasi perlu ditegakkan; dan keempat, integrasi yang menjadikan semua anggota organisasi tersebut terlibat dan mengadakan kerjasama untuk mencapai tujuan.⁹³

Dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan diperlukan kebijakan yang jelas dalam berbagai aspek dan unsur-unsur yang berkaitan dengan suatu tahapan-tahapan yang akan dikerjakan oleh sebuah organisasi agar tercapai dan tepat pada sasaran yang sudah ditetapkan. Dengan bergulirnya reformasi dan demokratisasi di Indonesia mendorong para transparansi di semua bidang serta melahirkan kebijakan-kebijakan

⁹³ Dalam Amstrong, *Handbook of Human Resources Management*, terj. Hikmat, Sofyan Harmono, (Jakarta: Media Computindo, 1990), h. 2

baru yang sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi masyarakat.⁹⁴

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai salah satu organisasi sosial-kemasyarakatan yang menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan agama islam merupakan sebuah organisasi yang murni lahir dari aspirasi masyarakat dan cendekiawan yang berasal dari berbagai latar belakang ormas keagamaan. Dalam teknisnya, MUI kemudian mendapat tempat yang cukup strategis dan mampu hidup berdampingan dengan pemerintah

Dalam menetapkan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan kehidupan keberagamaan masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu tidak mengherankan jika hubungan antara MUI dengan pemerintah terjalin dengan sangat baik sebagai unsur yang saling mendukung satu sama lain.

⁹⁴ Sondang P. Siagian, *Analisis serta penyusunan kebijakan dan strategi Organisasi*, (Jakarta: Masagung, 1993),h .153

Di pihak lain, agama (Islam) sebagai sebuah keyakinan yang mengandung berbagai kewajiban bagi penganutnya tetap merupakan kewajiban yang bersifat individu dalam pengertian bahwa semua individu masing-masing memiliki kewajiban yang sama untuk menjalankan apa yang diyakininya sebagai bagian dari ajaran Islam. Ritual-ritual keagamaan sebagai salah satu instrumen keberagamaan merupakan sesuatu yang dapat diamati secara empiris oleh karena itu, terlebih dalam disiplin Sosiologi, agama lebih dipandang sebagai pengabdian seseorang terhadap sesuatu yang dianggapnya lebih besar dan disertai dengan penyerahan diri dan ditandai dengan melakukan kewajiban-kewajiban yang berdimensi ritual.

Dengan asumsi semacam ini, tentunya dapat dipahami bahwa peningkatan fasilitas keagamaan dan pelaksanaan ibadah (ritual) dapat dilihat sebagai suatu peningkatan pengamalan keagamaan suatu kelompok masyarakat secara empiris. Karena, semakin banyak fasilitas keagamaan semestinya sekaligus juga

menggambarkan peningkatan pengamalan keagamaan masyarakat tersebut.

Namun demikian, tidak semua dimensi ibadah ritual ini tidak berhubungan langsung dengan manusia lain, ada beberapa hal memang bersifat sangat personal dan private seperti misalnya shalat dan puasa. Oleh karena itu, ketika dikaitkan dengan peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai sebuah lembaga keagamaan yang menangani pelaksanaan ibadah ritual yang tidak semata-mata bersifat individual atau personal, maka akan muncul jenis-jenis ibadah ritual lain yang melibatkan banyak orang misalnya, pelaksanaan zakat dan qurban.

Zakat dan qurban tidak hanya merupakan ibadah ritual, ia juga merupakan ibadah yang mengandung dimensi sosial karena tujuan ibadah ini juga untuk memberikan sesuatu yang dimiliki orang yang mampu kepada orang yang kurang mampu. Namun dalam kerangka pembahasan kali ini, kedua jenis ibadah ini akan dipandang sebagai ibadah ritual agama Islam yang diwajibkan bagi setiap orang yang mampu dengan

berbagai persyaratan, oleh karena itu dalam teknisnya memerlukan bantuan pihak yang benar-benar memiliki pemahaman yang mendalam mengenai tata cara pelaksanaan kedua jenis ibadah ini.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai sebuah lembaga yang salah satu tujuannya ialah memberikan tuntunan dan bimbingan kepada masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa apa yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagai sebuah ibadah itu memang terlaksana dengan baik. Oleh karena itulah, peranan MUI sebagai lembaga pembina masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan menjadi sangat penting. Peran MUI dalam membina umat ini dapat dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan tujuan yang dimilikinya.

Oleh karena itulah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dituntut untuk memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya manusia dalam organisasinya sehingga dapat melayani setiap kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan dasar (primer) (dlalury), kebutuhan skender (hajjiyat) ataupun kebutuhan tersier (tahsiny),

sehingga akan terasa betul oleh masyarakat untuk mencapai kedamaian dan keharmonisan hidup di dunia dan di akhirat.

F. Langkah-langkah Penelitian

Beberapa langkah penelitian yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan *survey*. Karena *survey* bertujuan membuat generalisasi, dan sebagian malahan untuk membuat prediksi.⁹⁵ Kemudian *survey* ditujukan pada sejumlah besar individu atau kelompok, yang jumlahnya relatif besar, dan focus perhatiannya hanya di tujukan ke beberapa variabel saja. Selanjutnya *survey* bertujuan hendak menggambarkan karekteristik tertentu dari sesuatu populasi.⁹⁶ Dengan demikian individu atau kelompok yang diambil sebagai sampel penelitian secara

⁹⁵ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), h. 62

⁹⁶ Sanafiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1999), h. 22

representatif (mewakili), dalam hal ini sampelnya adalah pengurus MUI Kota Bandung yang berkaitan dengan fokus penelitian. Metode survey menekankan pada penentuan informasi tentang variabel daripada informasi tentang individu dan digunakan untuk mengukur gejala-gejala yang ada tanpa menyelidiki kenapa gejala itu ada.

⁹⁷ Untuk kepentingan penelitian yang bersifat kualitatif diperlukan bahan-bahan yang dapat dijangkau dalam rangka penyajian data secara akurat., penelitian ini akan dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan mengenai apa saja yang telah dapat dilakukan oleh MUI Kota Bandung berkaitan dengan programnya dalam peningkatan fasilitas keagamaan dan pelaksanaan kesadaran ibadah pada masyarakat Kota Bandung, yang dilakukan pada periode 2008-2013

a. *Jenis Data*

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini ialah semua data yang berhubungan dengan:

⁹⁷ Consuelo G Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta Universitas Indonesia Press, 1993), h. 76

- a. Kinerja MUI Kota Bandung tahun 1996-2001
- b. Peningkatan fasilitas keagamaan dan pelaksanaan ibadah
- c. Konsep-konsep perubahan sosial
- d. Agama dan lembaga agama sebagai sistem sosial

2. *Sumber Data*

Sumber data yang dibutuhkan untuk penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber yang secara umum dapat di kategorikan kepada dua sumber yakni sumber primer (pokok) dan sumber sekunder (penunjang). Sumber primer dalam penelitian ini akan diperoleh dari dokumentasi kegiatan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandung tahun 1996-2001.

3. *Teknik Pengumpulan Data*

Beberapa teknik yang akan digunakan dalam rangka pengumpulan data antara lain:

- a. Observasi

Observasi atau pengamatan bermaksud mengumpulkan fakta, yaitu dengan mengumpulkan

pernyataan-pernyataan yang bersifat deskripsi, penggambaran dari kenyataan yang menjadi perhatiannya, suatu fakta hanya mencakup aspek-aspek tertentu saja dari apa yang dilihat yaitu hal-hal yang dianggap penting bagi kerangka pikir atau teori yang bersangkutan. Suatu kenyataan dapat di tafsirkan menjadi fakta yang berbeda sesuai dengan kerangka pikir tertentu. Suatu gejala atau suatu kenyataan bukan merupakan fakta sebelum digambarkan dengan suatu pernyataan, rumusan atau istilah.⁹⁸

Dalam hal ini peneliti mengadakan observasi mengenai peningkatan fasilitas keagamaan dan pelaksanaan ibadah dalam masyarakat Kota Bandung dan peran MUI dalam melaksanakan programnya berkenaan dengan hal tersebut.

b. Wawancara

Yang dimaksud dengan wawancara dalam tulisan ini adalah teknis dalam upaya menghimpun data yang

⁹⁸ Lihat dalam Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu 1997), h. 78

akurat untuk keperluan melaksanakan proses pemecahan masalah tertentu yang sesuai dengan data.⁹⁹ Dalam hal ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan beberapa orang yang dianggap representatif untuk kepentingan penelitian yang dilakukan.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi ialah studi yang berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, memilih-milih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, menerangkan dan mencatat serta menafsirkannya serta menghubungkannya dengan fenomena lain.¹⁰⁰ Dalam langkah ini, peneliti akan mengklasifikasi data yang benar-benar berhubungan dengan permasalahan penelitian.

⁹⁹ Ibid , h. 72

¹⁰⁰ Ibid , h. 77

4. Analisis Data

Data dalam penelitian bercorak kualitatif naturalistik, proses analisis dilakukan sejak awal penelitian. Data yang diperoleh dari lapangan akan dituangkan dalam bentuk laporan yang selanjutnya akan dianalisis yang langkah-langkahnya sebagaimana diungkapkan oleh S. Nasution berikut ini:

a. Reduksi Data

Yang dimaksud dengan reduksi data adalah memotong motong data hasil penelitian (yang dihasilkan dari observasi dan wawancara) agar terlihat data yang penting dan pokok. Langkah-langkah yang mereduksi data ini dapat dilakukan dengan membuat rangkuman, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal yang penting.

b. Display Data

Display data ialah menonjolkan data agar terlihat keseluruhannya atau bagian-bagian tertentu dari bagian penelitian.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses ini antara lain dengan membuat matriks, grafik, network dan

sebagainya. Dengan cara ini, data akan dapat dikuasai dan tidak akan tenggelam dalam tumpukan detail.

c. Kesimpulan dan Verifikasi

Upaya mengambil kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan sejak awal penelitian, sedangkan kesimpulan itu perlu diperiksa kekurangannya dengan cara melakukan verifikasi (pemeriksaan ulang) selama penelitian berlangsung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A.Agama dalam Kehidupan Sosial

1. Pengertian Agama

Setelah menganalisis buku-buku yang membahas tentang pengertian agama, belum ditemukan pengertian agama secara *saklek* dan tegas karena untuk membicarakan batasan agama sangat sulit yang dapat mencakup keseluruhan definisi agama yang diterima oleh semua pihak penganut agama yang ada di dunia, karena begitu banyaknya penganut agama sehingga pengertian agama paling tidak akan berdasarkan keyakinannya masing-masing dan pengalaman keagamaan para penganutnya. Akan tetapi, penulis berusaha mencari definisi agama yang dianggap universal dengan mengungkapkan berbagai pendapat dari para ahli yang bergelut dalam masalah agama antara lain sebagai berikut:

Prof Dr. A. Mukti Ali dalam ceramahnya pada tanggal 4 Desember 1971 di IKIP Bandung (sekarang UPI), menyampaikan bahwa:

“Paling sedikit ada tiga alasan untuk hal ini (pengertian agama). *Pertama*, karena pengalaman agama itu adalah soal *bathini* dan subyektif, juga sangat individualistis... Alasan *kedua* ialah bahwa barangkali tidak ada orang yang berbicara begitu bersemangat dan emosional lebih daripada membicarakan agama... maka tentang membahas arti agama selalu ada emosi yang kuat sekali hingga sulit memberikan arti kalimat agama itu... Alasan *ketiga* ialah, bahwa konsepsi tentang agama akan dipengaruhi oleh tujuan orang yang memberikan pengertian agama itu”.¹⁰¹

Maulana Muhammad Ali menulis buku tentang Islam yang berjudul *The Religion Of Islam* dan diterjemahkan oleh Soedewo ke dalam bahasa Belanda dengan judul *De Religie van de Islam* dan ke dalam

¹⁰¹ A. Mukti Ali, *Agama, Universitas dan Pembangunan*, (Bandung: Badan Penerbit IKIP Bandung, 1971), h. 4

bahasa Arab dengan judul *Al-Dinu'l-Islam*.¹⁰² Dari uraian itu, Endang Saifuddin Anshari mengemukakan kesimpulan sederhana yaitu dalam arti teknis: *religion* (bahasa Inggris) = *religie* (Bahasa Belanda) = *din* (bahasa Arab) = Agama (bahasa Indonesia).¹⁰³ Baik *religion* (bahasa Inggris) maupun *religie* (bahasa Belanda), keduanya berasal dari bahasa induk yaitu Latin: *relegere, to treat carefully* (CICERO, De Nat, Deorum ii, 28); *relegare, to bind together* (LACTANTIUS, Instif. Div., iv, 28) atau *religare, to recover* (AGUSTINE, De Civitate Dei, x, 3)¹⁰⁴

Karena sulitnya mendefinisikan agama maka tidak ada ketegasan yang jelas mengenai definisi agama yang dapat mencakup fenomena agama sehingga pendefinisian agama tersebut tergantung dari sudut pandang yang mereka gunakan masing-masing. Para

¹⁰²Shalahudin Sanusi, *Dirasah Islamiyah*, (Bandung: Uswatun Hasanah, t.th), h. 20

¹⁰³Endang Saifudin Anshari, *Ilmu, Filsafat dan Agama*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987) h. 118

¹⁰⁴E.F. Bozman (ed), *Everymen's Encyclopaedia, Fourth Edirion*, Vol. X, (London: J.M. Dent & Sons Lmt, 1958), h. 512

filsuf, sosiolog, psikolog dan para teolog mendefinisikan tentang *religion* menurut caranya masing-masing.

Sebagian filsuf beranggapan bahwa *religion* adalah “*superstitious structure of incoherent metaphysical nations*”. Para sosiolog lebih suka menyebut *religion* sebagai “*collective expressions of human values*”. Sementara itu, pengikut Karl Marx mendefinisikan *religion* dengan “*the opiate of the people,*” sedangkan kalangan psikolog menyimpulkan *religion* sebagai “*mystical complex surrounding a projected super-ego*”.¹⁰⁵

Dalam tulisan Endang Saifudin Anshari mengutip dari *Everymen's Encyclopaedia* menemukan rumusan tentang *religion* sebagai berikut; “*Religion...may broadly be defined as acceptance of obligation toward power higher than man himself*”.¹⁰⁶(Religion... dalam arti luas dapat didefinisikan sebagai penerimaan atas tata aturan

¹⁰⁵Endang Saifudin Anshari, *op.cit.*, h. 119

¹⁰⁶E.F Bozman, *op.cit.* h. 512

daripada kekuatan-kekuatan yang lebih tinggi daripada manusia itu sendiri).

Kemudian Vergilius Ferm, seorang ahli ilmu pengetahuan dan perbandingan agama mendefinisikan *religion* sebagai berikut:

A religion is a set of meanings and behaviors having reference to the individuals who are or were or could be religious. Again, religion is generic term referring to all conceivable religions, formal or informal.”¹⁰⁷

(Agama adalah seperangkat makna dan kelakuan yang berasal dari individu-individu yang religius. Lagi-lagi, Agama adalah istilah yang umum menunjuk pada semua agama-agama yang dapat ditangkap, baik formal maupun informal))

Sedangkan pengertian agama dari segi etimologi ialah bahwa kata agama berasal dari dua suku kata yaitu a berarti tidak dan kata gama berarti kacau yang berasal dari bahasa Sansakerta, Menurut Fachrudin Al-Khairi yang dikutip oleh Endang saifudin Anshari dijelaskan bahwa a artinya kocar-kacir, berantakan. Jadi arti dari

¹⁰⁷Vergilius Ferm, *Encyclopaedia of Religion*, (New Jersey, Little Field, Adam & Co, Peterson, 1959), h. 64

kata agama adalah tidak kocar-kacir, atau tidak berantakan. Lebih jelas lagi kata agama itu ialah teratur, beres, yang mengandung makna suatu peraturan yang mengatur keadaan manusia, maupun mengenai budi pekerti, pergaulan hidup bersama dan lainnya.¹⁰⁸

Menurut Sutan Muhamad Zain dalam kamus Modern Bahasa Indonesia menerangkan arti agama sebagai berikut: “*agama* (sekarang) kepercayaan kepada kesaktian, ruh nenek moyang, dewa, Tuhan.”¹⁰⁹ Sedangkan W.J.S Poerwadarminta dalam kamusnya menerangkan bahwa “agama” ialah segenap kepercayaan (kepada Tuhan, Dewa dsb) Serta dengan kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu.¹¹⁰

Sementara itu, dalam Ensiklopedia Indonesia, diuraikan bahwa agama adalah:

¹⁰⁸Endang Saifudin Anshari, *op.cit.*, h. 122

¹⁰⁹Sutan Muhamad Zain, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Grafika, t.th.), h. 17

¹¹⁰W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bagian Pertama, Bagian Pertama: Hurup A s.d O., Cetakan keempat, (Jakarta: Balai Pustaka, 1966), h. 21

Agama (unum), manusia mengakui dalam agama adanya Yang Suci: manusia itu insaf, bahwa ada suatu kekuasaan yang memungkinkan dan melebihi segala yang ada. Kekuasaan inilah yang dianggap sebagai asal atau khalik segala yang ada. Tentang kekuasaan ini bermacam-macam bayangan yang terdapat pada manusia, demikian pula cara membayangkannya. Demikianlah Tuhan dianggap oleh manusia sebagai tenaga gaib di seluruh dunia dan dalam unsur-unsurnya atau sebagai Khalik rohani. Tenaga gaib ini dapat menjelma antara lain dalam alam (animisme), dalam buku suci (Torat) atau dalam manusia (Kristus).¹¹¹

Selain itu M. Quraish Shihab mengantarkan bahwa “agama” adalah suatu kata yang sangat mudah diucapkan dan mudah pula untuk menjelaskan maksudnya (khusus bagi orang awam), tapi sangat sulit untuk memberikan batasan (definisi) yang tepat lebih-lebih bagi para pakar.

¹¹¹Endang Saifudin Anshari, *op.cit.*, h. 124

Akan tetapi Quraish Shihab menuturkan dari berbagai pmikir, seperti John Locke (1632-1704)¹¹² memberikan kesimpulan bahwa agama bersifat khusus, sangat pribadi, sumbernya adalah jiwaku dan mustahil bagi orang lain memberi petunjuk kepadaku jika jiwaku sendiri tidak memberitahu kepadaku. Mengutip pula dari Mahmud Syaltun bahwa “agama” adalah ketetapan-ketetapan Ilahi yang diwahyukan kepada Nabi-Nya untuk menjadi pedoman hidup manusia. “Akhirnya

¹¹²M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran: Fungsi Peran Wahyu dalam Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1992

¹³ Nurcholis Madjid, *Islam kemoderenan dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1987), h. 122

¹⁴ Seperti halnya yang diuraikan oleh Nurcholis yang di ambil dan beberapa pakar. Profesor Wallace mengatakan bahwa Agama ialah “suatu teori tentang makna terakhir alam raya...” E.S.F. Haynes berpendapat bahwa agama adalah “suatu teori tentang hubungan manusia dengan alam raya.” Dan jhon Morley, agama adalah perasaan kita tentang kekuatan-kekuatan tertinggi yang menguasai nasib umat manusia”. James Martineau mendefinisikannya sebagai kepercayaan tentang Tuhan yang Abadi, Yaitu tentang jiwa dan kemauan ilahi yang mengatur alam raya dan berpegang pada hubungan-hubungan moral dengan umat manusia:. Sedangkan ahli filsafat, McTaggart menguraikan bahwa agama adalah sudah jelas merupakan suatu keadaan kejiwaan....Ia dapat digambarkan secara paling baik sebagai perasaan yang terletak di atas adanya keyakinan kepada keserasian antara diri kita sendiri dan alam raya secara keseluruhan.” Nurcholis madjid dan kemoderenan, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992).,p. 329.

memberikan kesimpulan bahwa agama adalah hubungan antara mahluk dan *Khalik-nya*". Hubungan ini terwujud dalam sikap bathinnya serta tampak dalam ibadah yang dilakukannya dan tercermin pula dalam sikap kesehariannya.¹³

Penjelasan Nurcholish Madjid tentang definisi agama tampaknya sama dengan cendekiawan-cendekiawan lainnya karena agama dalam penghayatannya umat bersifat individual, Disebabkan oleh pemahaman dan penghayatan yang individual tersebut, maka terdapatlah bermacam-macam definisi.¹⁴

Di lain penjelasan, Nurcholish mengungkapkan agama juga dalam hal ini setiap sistem kepercayaan selalu mengasumsikan kemutlakan, sekurangnya berkenaan dengan pokok (*ushul*) ajarannya. Sebab hanya dalam kemutlakannya itu maka suatu agama berfungsi sebagai pegangan dan tuntunan hidup yang memerlukan kadar kepastian yang tinggi, dan memberi kepastian itulah fungsi pegangan atau tuntunan.

Karena segi kemutlakan yang membawa serta kepastian itu maka setiap penganut suatu agama tentu menganggap bahwa agamanya adalah sesuatu yang tidak berasal dari manusia sendiri, melainkan dari Tuhan. Ini dinyatakan dalam berbagai konsep tentang wahyu (*revelation*), pengungkapan, penjelmaan, wangsit, dan lain-lain, yaitu konsep-konsep yang membawa konsekuensi pandangan bahwa agama adalah ahistoris, normatif, dan menggarap bidang-bidang yang termasuk di dalam kategori “apa yang seharusnya.”

Walaupun begitu, pada waktu yang sama setiap penganut agama berkeyakinan bahwa agamanya mengajarkan tentang amal perbuatan praktis, dan itu berarti bahwa agama mengandung unsur-unsur yang berbeda dalam lingkungan daya dan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Sekarang “daya dan kemampuan manusia” adalah dengan sendirinya bernilai “manusiawi” karena ia berada pada diri manusia sendiri. Dan agar suatu ajaran agama berada dalam diri dan kemampuan manusia untuk melaksanakannya sebab jika tidak demikian maka keberadaan agama menjadi *absurd*

manusia harus membawanya ke dalam dirinya, ke dalam lingkaran yang menjadi batas kemampuannya, dan inilah pemahaman.

Jadi jelas ada dimensi unsur kemanusiaan dalam usaha memahami ajaran agama. Pernyataan tentang adanya unsur manusiawi dalam memahami ajaran agama memang mengisyaratkan adanya “intervensi” manusia dalam urusan yang menjadi hak prerogatif Tuhan itu. Tetapi, jika berdasarkan kepada keterangan di atas menjadi jelas bagi setiap orang bahwa “agama” dapat dibedakan dari “paham keagamaan”, maka adanya intervensi manusia dalam bangunan keagamaan historis adalah suatu kenyataan. Perkembangan semua agama penuh bukti yang mendukung hal itu semua.¹¹³

Roland Robertson (ed), mendefinisikan bahwa agama adalah suatu sistem kesatuan dari keyakinan dan praktek-praktek yang bersifat relatif terhadap hal-hal yang sakral, yakni segala sesuatu yang dihindari atau dilarang dan keyakinan-keyakinan dan praktek-praktek

¹¹³ Ibid, hal 89

yang mengajarkan moral yang tinggi ke dalam suatu komunitas; hadirnya suatu institusi yang disebut gereja, di mana semua orang “mengidentitaskan diri” padanya. Unsur kedua yang memperoleh tempat dalam definisi ini tak kurang pentingnya dari yang pertama, karena dengan mewujudkan bahwa gagasan mengenai agama tak terpisahkan dari gereja, membuat jelas bahwa agama harus menjadi suatu kolektif yang menonjol.¹¹⁴

2. Kontekstualisasi Agama dalam kehidupan Sosial

Manusia mempunyai norma-norma yang mengatur kehidupannya dalam melakukan tindakan-tindakan dan pola perilaku kesehariannya, baik norma sosial, norma adat dan norma agama yang di anutnya. Hal itu dapat diamati dalam perilaku kehidupannya. Agama adalah suatu ciri kehidupan sosial manusia yang universal dalam arti bahwa semua masyarakat mempunyai cara-cara berfikir dan pola-pola perilaku yang memenuhi syarat untuk disebut “agama” (*religius*). Dalam superstruktur agama terdiri dari tipe-tipe simbol,

¹¹⁴Roland Robertson, ed, Agama dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis, (Jakarta, Grafindo Persada, 1993) h. 42.

citra, kepercayaan, dan nilai-nilai spesifik dengan mana makhluk manusia menginterpretasikan eksistensi mereka. Akan tetapi karena agama juga mengandung komponen ritual, maka sebagian agama tergolong juga dalam struktur sosial.

Penekanan dalam tulisan ini berusaha akan bersifat ilmiah, ingin mengetahui apa agama itu, bagaimana bentuk-bentuk agama sepanjang waktu dan ruang dan bagaimana agama itu berubah sesuai dengan pengaturan material dan sosial, sedangkan yang menyangkut realitas gejala supernatural (apakah Tuhan atau makhluk atau kekuatan-kekuatan supernatural itu ada atau tidak) berada di luar batas-batas pembahasan ilmiah. Hal itu bagian para filosof dan teolog untuk berspekulasi mengenai eksistensi dan sifat yang mungkin dari kekuasaan supernatural, akan tetapi kekuasaan-kekuasaan itu menjadi nyata secara sosial dan berguna secara sosiologis apabila orang percaya terhadapnya dan bertindak sesuai dengan keyakinannya. Realitas sosial kepercayaan dan tindakan-tindakan itulah yang akan dihindarkan dalam tulisan ini.

Studi mengenai gejala agama tidak akan memadai, jika tidak mungkin secara logika; mereka berpendapat bahwa pendekatan demikian tidak dapat menghasilkan

Pandangan ke depan yang sah dan hanya dapat berfungsi untuk mengubah makna spiritual yang sesungguhnya dari gejala demikian. Para ilmuwan sosial menghadapi kesulitan dalam merumuskan agama dengan tepat. Akan tetapi, ada dua jenis definisi utama tentang agama yang diusulkan oleh ilmuwan sosial yaitu inklusif dan eksklusif. Definisi inklusif menekankan bahwa agama adalah suatu sistem kepercayaan dan praktek-praktek yang diorganisasi sekitar hal-hal yang dikatakan suci, atau yang diorientasikan kepada kekhawatiran akhir manusia, konsep ini tidak hanya sistem-sistem teistik yang diorganisasikan sekitar tentang konsep kekuasaan supernatural, akan tetapi juga sistem kepercayaan non-teistik seperti: komunisme, nasionalisme, dan humanisme. Sedangkan definisi eksklusif membatasi istilah agama pada sistem-sistem kepercayaan yang mempostulatkan eksistensi mahluk, kekuasaan atau

kekuatan supernatural. Sistem kepercayaan seperti komunisme dan humanisme, karena tidak mencakup suatu dunia supernatural, secara otomatis dikeluarkan, meskipun mungkin diterima bahwa sistem-sistem kepercayaan nonteistik itu mempunyai elemen-elemen yang sama dengan sistem-sistem keagamaan.¹¹⁵

Sebagai penegasan tentang definisi agama inklusif, di bawah ini penulis mengutip dari tulisan Sanderson, (1993 : 518) ¹¹⁶yang dikemukakan oleh Emile Durkheim, Bellah, dan Yinger, sebagai berikut :

Suatu agama ialah suatu sistem kepercayaan yang disatukan oleh praktek-praktek yang bertalian dengan hal-hal yang suci, yakni, hal-hal yang dibolehkan dan dilarang kepercayaan dan praktek-praktek yang mempersatukan suatu komunitas moral yang disebut

¹¹⁵ Stephen K. Sanderson, *Sosiologi Makro: Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*, edisi kedua, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), h. 518.

¹¹⁶ Sanderson, (1993 : 518)

Gereja, semua mereka yang terpaut satu sama lain (Durkheim, 1965 : 62, aslinya 1912).¹¹⁷

Sementara itu, Robert N. Bellah mengartikan agama sebagai seperangkat bentuk dan tindakan simbolik yang menghubungkan manusia dengan kondisi akhir eksistensinya. Sedangkan menurut Yinger bahwa agama dapat di rumuskan sebagai suatu sistem kepercayaan dan praktek dimana suatu kelompok manusia berjuang menghadapi masalah-masalah akhir kehidupan manusia.¹¹⁸

Menurut Durkheim agama itu diorientasikan kepada suatu yang dirumuskan oleh manusia sebagai suci/sakti, yakni, obyek referensi, yang dihargai, dan amanatlah dahsyat. Sedangkan pendapat Bellah dan Yinger agama itu segala-galanya, diorientasikan kepada “penderitaan akhir” (ultimate concerns) umat manusia.¹⁸

¹¹⁷ Durkheim, 1965 : 62, aslinya 1912).¹¹⁷

¹¹⁸ *Ibid*, h. 519

¹⁹ *Ibid*. H. 520

Kemudian Roland Robertson, menekankan suatu definisi eksklusif dan percaya bahwa agama ialah perangkat kepercayaan dan simbol-simbol (dan nilai-nilai yang secara langsung diperoleh dari agama) yang bertalian dengan perbedaan antara suatu realitas transenden yang empiris dan yang superempiris; masalah-masalah empiris disubordinatkan artinya terhadap yang nonempiris.¹¹⁹

Sedangkan Anthony Wallace, merumuskan agama sebagai jenis perilaku yang dapat di golongan sebagai kepercayaan dan ritual yang bersangkutan dengan makhluk, kekuasaan, dan kekuatan supernatural. Sejalan dengan itu semua, Sanderson merumuskan agama sebagai suatu sistem kepercayaan dan praktek yang terorganisasi, yang didasarkan pada keyakinan yang tak terbukti, yang mempostulatkan adanya makhluk-mahluk, kekuasaan, atau kekuatan supranatural yang menguasai dunia fisik dan sosial.¹²⁰

¹²⁰ Ibid hal. 520

Dalam hal ini ada tiga elemen pokok. *Pertama*, agama selalu meliputi seperangkat ritual atau praktek atau seperangkat kepercayaan; dan kepercayaan ritual itu terorganisasi secara dan di berlakukan oleh anggota anggota suatu masyarakat atau beberapa segmen suatu masyarakat... *Kedua*, kepercayaan-kepercayaan yang bersangkutan dipandang benar hanya berdasarkan keyakinan, sehingga pada umumnya tidak ada keinginan untuk memvaliditaskannya dalam arti empiris. Karena itu kepercayaan agama terletak di luar dunia kesahihan ilmiah, dan agama selalu mencakup konsep dunia eksistensi supernatural yang berada diatas dan dibalik dunia sehari-hari, yang dapat di ketahui dan ilmiah. Suatu sistem kepercayaan dan praktek dapat disebut agama apabila memenuhi tiga kriteria di atas.

Ulasan-ulasan di atas tampaknya jelas bahwa, agama dapat dapat menjadi atmosfir terhadap perilaku kehidupan manusia baik secara individu, kelompok dan masyarakat terutama sebagai ritus masyarakat. Durkheim berusaha untuk memahami peranan sosial agama dengan jalan mempelajari yang paling sederhana atau elementer.

Pespektif sosiologinya, bahwa kehidupan sosial merupakan satu tingkat realitas yang tidak dapat diinterpretasikan dalam hubungan dengan karakter individu-individu. Karena Durkheim percaya bahwa fakta-fakta sosial, hanya dapat dijelaskan dalam hubungan dengan fakta-fakta sosial lainnya, dan agama adalah sesuatu yang terutama sosial, bukan psikologis. Agama muncul karena manusia hidup di dalam masyarakat dan dengan demikian mengembangkan kebutuhan-kebutuhan dasar tertentu sebagai akibat dari kehidupan kolektif.

Agama ada karena agama dapat memenuhi fungsi-fungsi sosial tertentu yang penting yang tak dapat dipenuhi tanpa agama. Peranan utama agama menurut Durkheim adalah sebagai integrator kemasyarakatan. Agama mengikat orang-orang menjadi satu dengan mempersatukan mereka sekitar seperangkat kepercayaan, nilai, dan ritual bersama. Dengan demikian agama

membantu memelihara masyarakat atau kelompok sebagai suatu komunitas moral.¹²¹

Dari hasil penelitian Durkheim terhadap orang Arunta, yakni suatu masyarakat pemburu dan peramu di Australia, bahwa dikalangan orang-orang Arunta ritual dan seremoni adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan sosial. Fakta orang-orang Arunta menyembah kekuasaan supranatural bukanlah merupakan apa yang paling penting mengenai keiatan mereka. Apakah mereka tahu atau tidak, mereka sesungguhnya sedang menyembah kekuasaan masyarakat mereka sendiri, kekuasaan masyarakat atas kekuasaan setiap individu. Ritual keagamaan mereka menyimbolkan perlunya individu-individu menyerahkan diri mereka terhadap kehendak kelompok. Dalam berkumpul bersama dalam ritual, orang-orang Arunta secara terbuka mengeratkan kembali keterikatan mereka antara yang satu dengan yang lainnya dan dengan masyarakat sebagai suatu

¹²¹*Ibid.*, h. 554

keseluruhan. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh orang-orang Arunta akan tetapi dilakukan oleh orang dalam semua agama. Oleh karena itu, Dukheim menyimpulkan bahwa komponen agamalah yang paling penting karena melalui ritual adalah kekuatan mengikat komunitas itu disimbolkan.

Pandangan mengenai peranan agama tradisional di dalam masyarakat membuatnya khawatir, bahwa agama mati perlahan-lahan dalam dunia modern di bawah pengaruh ilmu dan teknologi modern, kecuali ada suatu pengganti yang dapat diterima masyarakat, dalam hubungan ini ia optimistik, melihat adanya suatu pengganti dalam bentuk suatu sistem kepercayaan dan ritual baru yang memuja masyarakat secara langsung bukan tidak langsung dalam ideologi nasionalisme.

Nasionalisme akan menjadi suatu agama baru masyarakat industri (disini tidak terdapat kontradiksi apabila kita mengingat kembali bahwa Dukheim menggunakan definisi agama yang inklusif yang merumuskan sebagai bersangkutan dengan obyek-obyek yang secara sosial diidentifikasi sebagai suci).

Kemudian menegaskan dalam analisis mengenai agama sangat berpengaruh dalam sosiologi, pandangannya bahwa agama memainkan peranan penting sebagai integrator masyarakat mengandung banyak kebenaran, dan agama suatu integrator sosial yang penting dalam masyarakat yang lebih kompleks. Sedangkan Marx memandang bahwa agama memegang memainkan suatu peranan utama dalam memancing komitmen individu-individu karakter dasar orde sosial.¹²²

Secara historis dibuktikan dengan beberapa peristiwa, konflik antara kaum muslimin dan hindu di India yang membuahkan negara Pakistan, konflik antara Katolik dan Protestan di Irlandia, konflik yang belum pernah sirna di Libanon antara muslim dan kristen, ini sebagai contoh peranan agama dalam kehidupan sosial, oleh karena itu mengenai sifat sosial dari peranan agama mengandung banyak nilai.

¹²²*Ibid.*, h. 554-555

Dipandang dari sudut agama sejarah manusia tidak lagi didefinisikan dalam konteks suku atau klan dari mana ia berasal, melainkan sebagai makhluk yang mampu mencapai keselamatan. Disinilah pertama kali manusia dilihat sebagai manusia itu sendiri.

Tindakan-tindakan dalam agama-agama sepanjang sejarah adalah tindakan untuk mencapai keselamatan, bahkan ketika unsur-unsur ritual dan qurban tetap menonjol, unsur-unsur yang tetap mengandung makna yang baru. Melalui berqurban manusia dapat merubah kegagalannya untuk memenuhi kewajiban terhadap manusia dan Tuhan. Tetapi agama sejarah menuntut manusia yang berbuat kesalahan yang mendasar jauh lebih serius daripada yang dikonsepsikan oleh agama-agama sebelumnya.

Menurut Budhisme misalnya, sifat manusia yang mendasar adalah rakus dan amarah dari sifat-sifat inilah manusia harus mencari jalan untuk melepaskan diri secara total. Bagi agama-agama Yahudi, dosa manusia bukanlah perbuatan jahat, melainkan sikap acuh tak acuh terhadap Tuhan, dan hanya dengan kembali mematuhi

sepenuhnya aturan Tuhan ia akan dapat di terima kembali oleh-Nya. Bagi Muhammad orang kafir bukanlah seperti yang biasa kita terjemahkan sebagai “orang yang tak percaya” melainkan orang yang tidak tahu berterima kasih dan yang lalai terhadap kebaikan Tuhan. Bagi Muhammad, hanya Islam yang dapat membawa manusia kepada Tuhan dan membawa keselamatan.¹²³

Munculnya agama-agama sejarah adalah bagian dari pergeseran umum dari sistem dua kelas pada masa arkaik menjadi ciri khas sistem empat kelas dalam masa peradaban sejarah yang besar hingga masa modern: suatu elit politik-militer, elit kebudayaan-agama, kelompok berstatus rendah pedesaan (petani) dan kelompok status rendah perkotaan (pedagang dan tukang-tukang). Perubahan-perubahan sosial yang lain, seperti pertumbuhan pasar dihasilkan dari permulaan tersebarnya penggunaan koin, perkembangan birokrasi dan hukum di samping tingkat-tingkat urbanisasi yang baru, tidak begitu langsung dikaitkan dengan agama

¹²³Ronald Robertson, *op.cit.*, 324

tetapi merupakan bagian dari transformasi besar yang sama yang terjadi dalam milenium pertama S.M. Perbedaan antara elit agama dan elit politik diterapkan pada batas-batas tertentu pada dua strata bawah yang besar. Dari sudut pandangan sejarah agama, masyarakat petani pedesaan relatif “keras kepala” dan kerap kali dianggap sebagai warga negara kelas dua secara agama dan kegemaran mereka adalah simbolisasi kosmologis menyebabkan mereka disebut fanatik agama pada batas-batas tertentu¹²⁴

Implikasi sosial dari agama sejarah tersirat dalam ciri-ciri organisasi keagamaan. Diferensiasi elit agama menciptakan suatu ketegang sosial yang baru dan kemungkinan konflik yang baru dan perubahan dalam konteks sosialnya. Apakah konfrontasi terjadi antara nabi dan raja Israel, antara ulama dan sultan Islam, paus dan kaisar Kristen, dan bahkan antara pendeta Konfusius dan penguasa, tersirat bahwa tindakan politik harus dilakukan dalam konteks di mana otoritas politik akhirnya tidak bisa mengontrol.

¹²⁴Ibid, h. 327

Konfrontasi ini menimbulkan konsekuensi-konsekuensi sosial yang serius tentu saja tergantung pada sejauh mana kelompok keagamaan bebas secara struktural dan dapat menimbulkan tekanan yang nyata. S.N. Eisenstadt (1962) melakukan penelitian secara komprehensif terhadap perbedaan ini; bahwa perbedaan ini dimanapun tak ada yang hilang sepenuhnya. Lalu, agama membekali ideologi dan kohesi sosial bagi banyak pertentangan dan gerakan-gerakan reformasi dalam peradaban sejarah, serta akibatnya memainkan peranan yang lebih dinamik dan khususnya lebih bertujuan dalam perubahan sosial dibanding dengan yang ada sebelumnya. Disamping itu agama menjalankan fungsi-fungsi yang telah kita catat, bahwa keabsahan dan diwujudkannya keteraturan sosial.²⁵¹²⁵

Tindakan keagamaan kini dikonsepsikan sebagai identik dengan keseluruhan kehidupan, praktek-praktek keagamaan tertentu dan ketaatan mengalami kemerosotan dan sebagai gantinya, pemujaan terhadap Tuhan adalah tuntutan total dalam setiap langkah

¹²⁵Ibid. H. 328

kehidupan. Penekanannya lebih pada kualiti seseorang, ketimbang tindakan khusus yang disebut (religius). Proses penyatuan identitas ini menurut Roland sebagai gambaran sentral agama-agama, Bagi tercapainya keselamatan dan penyatuan identitas.

Agama modern meninggalkan hirarki sebagai dimensi yang esensial dari sistem simbol keagamaan.²⁶¹²⁶ Ini pun terjadi pada organisasi keagamaannya. Hal ini tidak hanya menolak otoritas Paus (dalam agama kristen) tetapi menolak bentuk-bentuk baru perbedaan agama antara dua tingkat relatif kesempurnaan agama, dan sebagai gantinya adalah sistem dua kelas yang baru, yaitu orang-orang yang terpilih dan orang-orang yang tidak terpilih (pembangkang).

¹²⁶ Tentu saja Tuhan superior dari manusia secara hirarkis, tetapi struktur kompleks yang berstratifikasi dimana purgatory, nabi-nabi, malaikat dan sebagainya, adalah unsur-unsur yang dihilangkan. Juga penilaian kembali pemikiran lama membawa semacam persamaan formal ke dalam hubungan manusia dengan Tuhan tanpa menghilangkan unsur hirarkis. Tegas dikatakan bahwa agama pra-modern dan modern tidak meninggalkan konsep hirarki, melainkan tetap mempertahankan dalam batas-batas yang lebih fleksibel, relatif terhadap konteks tertentu, dan erat hubungannya dengan penekanan-penekanan baru pada aspek persamaannya.

Orang-orang yang terpilih benar-benar lebih dilihat sebagai kelompok barisan depan dalam menjalankan rencana Tuhan ketimbang elit keagamaan kualitatif. Oleh karena itu tindakan agama pada masa modern jelas merupakan kesinambungan kecenderungan-kecenderungan yang sudah ada pada masa sebelumnya, yang pada saat yang sama mencari kemantapan pribadi dan relevansi sosial dalam dirinya sendiri yang merupakan inti dari keselamatan, akhirnya para penganut agama menyesuaikan praktek penyembahan mereka yang menghargai waktu dengan kondisi modern adalah keterlibatan yang makin besar dalam lingkaran-lingkaran keagamaan.

Dari paparan di atas jelas bahwa, kontekstualisasi agama dalam kehidupan sosial amat menentukan pola perilaku kehidupan manusia dalam melakukan praktek-praktek keagamaan yang otomatis menimbulkan simbol-simbol yang berimplikasi terhadap kehidupan sosial secara bertahap sehingga pada akhirnya akan terjadi keteraturan sosial.

Menurut Whitehead yang dikutip oleh Nurcholis Madjid mengemukakan bahwa agama sebagai suatu sistem tentang kebenaran-kebenaran umum yang mempunyai daya untuk budi pekerti, jika kebenaran-kebenaran umum tersebut di pegang secara ikhlas dan dihayati secara sungguh-sungguh.¹²⁷

Dengan demikian keagamaan harus mampu menampung perubahan-perubahan masyarakat yang semakin dinamik dan progresif, yang dapat menghantarkan kepada keselamatan dan pemenuhan kehidupan di dunia dan akhirat. Karena bagaimana pun praktek-praktek keagamaan mengandung fungsi-fungsi psikologis dan sosial, yaitu untuk keteraturan perilaku manusia, dan untuk menerangkan apa yang tidak dapat di pahami dan membuatnya masuk akal, kegelisahan dan ketakutan orang menjadi berkurang, disamping itu memberi sanksi kepada sejumlah besar tata kelakuan ,

¹²⁷Nurcholis Madzid, *Islam kemodernan dan Keindonesiaan*, op.cit., h. 123

sehingga agama memegang peranan penting dalam pengendalian sosial.²⁸¹²⁸

Dengan demikian agama sangat melekat dalam kehidupan masyarakat dalam masyarakat industri maupun nonindustri, sehingga kehadirannya tidak mungkin tidak terasa adalah kehidupan manusia, sedikit atau banyak sejumlah negara di seluruh dunia menggunakan agama untuk memberi pada praktek-praktek kehidupan termasuk pada kekuasaan politik.

B. Lembaga Agama dalam Perubahan Sosial

1. Pengertian Lembaga

Dalam kamus sosiologi Soejono Soekarno kata *social institution* mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Cara berperilaku yang telah distandarisasikan
- b. Kompleks kegiatan kooperatif

¹²⁸William A. Haviland, Antropologi. Jilid 2 (pen) R.G. Soekadidjo, PT. Glora Aksara Pratama, 1988, h. 214

- c. Norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada kebutuhan pokok manusia (*lembaga*).¹²⁹

Sedangkan sosial (*social instution*) adalah organisasi norma-norma untuk melaksanakan sesuatu yang dianggap penting. Lembaga ini berkembang berangsur-angsur dari kehidupan manusia, bila kegiatan penting tertentu dibakukan, dirutinkan, diharapkan dan disetujui, maka perilaku itu telah melembaga. Peran yang melembaga adalah peran yang telah dibakukan, disetujui dan diharapkan dan biasanya dipenuhi dengan cara-cara yang sungguh-sungguh dapat diramalkan, lepas dari siapa yang orang yang mengisi peran itu. Lembaga mencakup sekumpulan unsur kelembagaan (norma, perilaku, sikap, nilai, ritual dan ideologi), fungsi manifest (tujuan yang di kehendaki) dan fungsi laten (hasil/akibat yang tidak di khendaki dan direncanakan). Ada lima lembaga yang penting dalam masyarakat yang kompleks adalah lembaga keluarga, lembaga keagamaan,

¹²⁹Soejono Soekarno, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: Rajawali, 1985), h. 242

lembaga pemerintah, lembaga perekonomian dan lembaga pendidikan.³⁰¹³⁰

Konsep lembaga secara sosiologis berbeda dengan konsep yang umum digunakan. Sebuah lembaga bukanlah sebuah bangunan, bukan sekelompok orang, dan juga bukan sebuah organisasi. Lembaga (*institution*) adalah suatu sistem norma untuk mencapai sesuatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting, atau, secara formal sekumpulan kebiasaan dan tata kelakuan yang berkisar pada suatu kegiatan pokok manusia. Lembaga adalah proses-proses terstruktur (tersusun) untuk melaksanakan berbagai kegiatan tertentu.

Lembaga tidak mempunyai anggota, tetapi mempunyai pengikut. Pembedaan antara anggota dan pengikut sangat halus namun penting, sebagai ilustrasi agama bukanlah sekelompok orang; agama adalah suatu sistem gagasan, kepercayaan dan mengikuti praktek dan hubungan. Masjid adalah suatu asosiasi manusia yang

¹³⁰Ibid., h. 264

menerima kepercayaan dan mengikuti praktek suatu agama, yaitu Islam. Bila tidak ada orang yang percaya dan mau menerimanya, maka agama tidak ada. Agama bukan manusianya; agama adalah suatu sistem keyakinan dan praktek.

Kebanyakan manusia tidaklah mengalami kesulitan untuk membedakan antara permainan (*game*) sepak bola dengan tim (*team*) sepak bola. Permainan merupakan seperangkat peraturan dan praktek, bersama dengan nilai-nilai dan sentimen yang mendukung. Permainan tidak dapat dimainkan tanpa pemain, akan tetapi pemain bukanlah permainan itu sendiri; pemain adalah suatu asosiasi orang-orang yang memainkan permainan.

Maka terjadilah pembedaan lembaga dengan asosiasi. Lembaga perbankan merupakan prosedur yang dilakukan untuk mengelola transaksi keuangan tertentu; bankir adalah orang yang memimpin transaksi tersebut; bank adalah sekelompok bankir yang terorganisasi (bersama-sama para karyawannya). Yang perlu kita ingat hanyalah bahwa *lembaga selalu merupakan sistem*

gagasan dan perilaku yang terorganisasi yang ikut serta dalam perilaku itu. Setiap Lembaga mempunyai kumpulan asosiasinya, dan melalui asosiasi itulah norma-norma lembaga dilaksanakan.

Lembaga dan asosiasi sangat berkaitan satu sama lain, namun pengertiannya sangat berbeda dan tidak boleh dicampuradukan

Agama adalah lembaga sosial; sedangkan, gereja, masjid, di suatu tempat adalah asosiasi. Dalam pembicaraan umum tidak jarang seseorang diacu sebagai “lembaga” tetapi itu merupakan istilah populer bukan istilah sosiologi.

Lembaga adalah sistem hubungan sosial yang terorganisasi yang mengejawantahkan nilai-nilai serta prosedur umum tertentu dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat.³¹¹³¹ Dalam definisi ini, “nilai-nilai umum” mengacu pada cita-cita dan tujuan bersama; “prosedur umum” adalah pola perilaku yang dilakukan dan diikuti; dan “sistem hubungan” adalah

¹³¹Ibid., h. 245

jaringan peran serta status yang menjadi wahana untuk melaksanakan perilaku tersebut.

Karena masarakat begitu kompleks dan saling berhubungan, maka mustahil meramalkan secara tepat semua akibat dari suatu tindakan. Lembaga mempunyai fungsi “manifes” dan fungsi “laten”. Fungsi manifes merupakan tujuan lembaga yang diakui, misalnya keluarga harus memelihara anak, dan fungsi manifes adalah jelas, diakui, dan biasanya dipuji. Sedangkan fungsi laten, merupakan hasil yang tidak di khendaki dan mungkin tidak di akui, atau, jika diakui dianggap sebagai hasil sampingan, misalnya lembaga ekonomi tidak hanya memproduksi dan mendistribusikan kebutuhan pokok, tetapi kadang-kadang juga meningkatkan pengangguran dan perbedaan kekayaan.

Dalam perjalanan antara suatu lembaga dengan lembaga lain juga saling berhubungan, sehingga perubahan lembaga yang satu mempengaruhi lembaga yang lain dalam hubungan sebab akibat yang kontinu.

Adanya sebuah lembaga sudah dapat dipastikan kemungkinan besar karena adanya kaum intelektual dilingkungan mereka berada sesuai dengan tingkat pengetahuan masyarakat. Kaum intelektual adalah orang-orang yang pekerjaannya terutama berelut dengan gagasan. Kekuatan mereka adalah pengaruhnya, karena pekerjaan mereka dapat mempengaruhi pemikiran orang-orang yang berkuasa. Kaum intelektual dapat menyerang maupun membela lembaga-lembaga masyarakat mereka.

Disamping itu kepercayaan terhadap lembaga masyarakat mengalami pasang surut, dan kepercayaan masyarakat yang rendah bisa mengakibatkan perubahan lembaga. Para fungsionalis mengasumsikan bahwa masyarakat yang sehat akan sangat mendukung lembaga sosial masyarakat, suatu consensus atas lembaga yang ada. Sedangkan para ahli teori konflik berpendapat bahwa konsensus demikian mungkin menyembunyikan persetujuan moral terhadap berbagai aspek eksploitasi.

Selanjutnya, akan diungkapkan mengenai lembaga yang berkaitan dengan pembahasan tesis yaitu lembaga keaamaan, dan lembaga-lembaga keagamaan ini hampir

ada diseluruh negara termasuk di Indonesia, bahwa lembaga agama termasuk lembaga sosial kemasyarakatan. Lembaga agama merupakan sistem keyakinan dan praktek keagamaan yang penting dari masyarakat yang telah di bekukan dan dirumuskan serta dianut secara luas dan dipandang sebagai perlu dan benar. Asosiasi agama merupakan kelompok orang yang terorganisasi yang secara bersama-sama menganut keyakinan dan menjalankan praktek suatu agama.

2. Lembaga Agama Sebagai Institusi Sosial

Dalam fakta sejarah, hampir semua manusia menganut suatu agama, baik yang tergolong pada agama berskala kecil maupun agama yang berskala besar. Semua agama besar menekankan kebajikan seperti kejujuran dan cinta sesama, kebajikan ini sangat penting bagi keteraturan perilaku masyarakat manusia, dan agama membantu manusia untuk memandang serius kebajikan seperti itu.

Lembaga agama merupakan sistem keyakinan dan praktek keagamaan yang penting dari masyarakat

yang telah dibakukan dan dirumuskan serta yang dianut secara luas dan dipandang sebagai perlu dan benar.¹³²

Agama berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya lebih dari perilaku moral. Agama menawarkan suatu pandangan dunia dan jawaban atas berbagai persoalan yang menbingungkan manusia. Agama mendorong manusia untuk tidak hanya memikirkan diri sendiri melainkan juga memikirkan kepentingan sesama. Tanggapan religius beranjak lebih jauh dari sekedar mengikuti norma-norma perilaku konvensional.¹³³

Sosiologi agama adalah studi tentang interaksi timbal-balik antara lembaga agama dengan lembaga-lembaga sosial lainnya. Agama kerap kali didefinisikan sebagai tanggapan teratur terhadap unsur supranatural. Walaupun ternyata ada beberapa kelompok yang menolak dan mengabaikan unsur supranatural, namun mereka memiliki kepercayaan dan sistem ritual yang

¹³²Paul B. Horton & Chester L. Hunt, *Sosiologi*, edisi keenam, pent. Aminuddin, (Jakarta: Erlangga 1993), h. 304

¹³³Jusman Iskandar. *Teori Sosial*, (Bandung: Program Pascasarjana IAIN Bandung, 2000), 175

menyerupai agama yang didasarkan pada kepercayaan terhadap unsur supranatural.

Analisis terhadap peran sosial dari agama meliputi beberapa pandangan; (1) pandangan sekuler, Comte bahwa agama merupakan suatu tahap evolusi yang berarti bahwa agama pernah dipandang penting namun sudah usang karena perkembangan modern, Auguste Comte menulis tiga tahap pemikiran manusia; teologis (religius), filosofis (metafisis), dan ilmiah (positif). Ia menekankan walaupun agama masih tetap bertahan itu hanya sebagai “agama humanitis” yang berdasarkan ilmu pengetahuan.¹³⁴ (2) pandangan penekanan integratif Durkheim dan Bellah, dimana pengaruh agama dapat mempersatukan masyarakat;

Durkheim menyimpulkan bahwa tujuan utama agama dalam masyarakat primitif adalah untuk membantu orang berkontak bukan dengan Tuhannya, tetapi dengan sesamanya. Ritual-ritual religius membantu orang untuk mengembangkan rasa paubyuan (*sance of*

¹³⁴ Ibid., h. 306

community, misalnya mereka ambil bagian dalam peristiwa perkawinan, kelahiran dan kematian dan melakukan kegiatan spiritual lainnya. Hal ini mempersatukan kelompok; tidak seorang pun menghadapi kehidupan ini sendirian.¹³⁵ Kemudian penjelasan Bellah; dengan mengemukakan konsep agama sipil/ rakyat (*civil religion*), Agama sipil merupakan suatu kerangka keyakinan religius yang secara luas dianut oleh seluruh masyarakat. Agama mendukung tindakan pemerintah jika tindakan itu selaras dengan keyakinan agama, sebaliknya agama sipil akan mengutuk tindakan pemerintah yang berlawanan dengan prinsip-prinsip agama.(3) pandangan pendekatan konflik Marx, kekuatan yang paling dominan dimasyarakat adalah ekonomi sedangkan yang lainnya adalah sekunder, selain itu agama hanya berkenaan dengan hal-hal yang sepele dan semu atau hal-hal yang tidak ada seperti sungguh-sungguh mencerminkan kepentingan ekonomi kelas sosial yang berkuasa. Agama merupakan “candu masyarakat” karena hanya menawarkan “cita-cita yang

¹³⁵Paul B. Horton & Chester L Hunt, op.cit., h. 307 - 308

tidak terjangkau”, membelokan rakyat dari perjuangan kelas dan memperpanjang eksploitasi mereka. Oleh karena itu, semua pemerintah komunis adalah musuh agama.¹³⁶ (4) pandangan Weber, ia berpendapat bahwa, agama sebagai semacam lembaga bayangan melulu yang mencerminkan kekuasaan dan kepentingan kelas berkuasa.

Agama merupakan suatu faktor dalam keluarga, namun sulit untuk memisahkan atau mengukurnya. Keyakinan agama mempengaruhi ekonomi, karena mempengaruhi kebiasaan kerja, pola konsumsi dan penerimaan atau penolakan produk dan kebiasaan baru. Setiap agama besar tidak hanya mempengaruhi masyarakat melalui etos budaya nilai-nilai yang dominan yang dibangunnya, tetapi juga melalui asosiasi agama yang dirangsangnya. Masyarakat mempunyai lembaga agama sistem kepercayaan dan praktek-praktek keyakinan yang dibakukan, diresmikan dan dipandang perlu dan penting oleh seluruh warga masyarakat, namun masyarakat yang sederhana biasanya tidak memiliki

¹³⁶ Ibid, h. 308

organisasi agama. Praktek dan upacara agama seringkali di pimpin oleh anggota keluarga tanpa sistem terorganisasi dari ulama atau pastor.

Orang konservatif adalah orang yang mungkin bersedia melakukan penyesuaian-penyesuaian kecil, namun mereka yakin bahwa struktur dasar masyarakat sudah sehat dan masuk akal. Mereka mungkin menerima dan mendukung pembaharuan (reform), namun menolak revolusi karena membawa kehancuran dan bukan keuntungan. Orang radikal tidak tertarik pada sistem radikal atau pembaharuan sistem sosial, mereka memandang sistem sosial yang ada bobrok sehingga harus dirombak secara lengkap, selain itu mereka memandang revolusi sebagai operasi pembedahan yang diperlukan yang menfaatnya cukup besar untuk membayar dan membenarkan semua pengorbanan.

Pada dasarnya agama menjunjung tinggi sikap damai, akan tetapi pada kenyataannya tidak jarang juga menimbulkan polarisasi manusia ke dalam berbagai faksi atau kubu yang saling bersaing, berperang, walaupun peperangan itu biasanya tidak langsung berhubungan

dengan doktrin agama, tetapi hanya suatu perebutan kekuasaan di antara kelompok-kelompok yang membawa label-label keagamaan.

Hal ini telah terbukti dan sekaligus menjadi fakta sosial, misalnya akibat dari perbedaan iman, ritus menjadi alasan persaingan, perdebatan, konflik politik, perselisihan antara satu dengan yang lain dan bahkan menimbulkan kekerasan fisik. Di Indonesia misalnya telah terjadi bentrokan fisik yang notabene pemicunya adalah agama, ini diperkuat dengan terjadinya dialog antar umat beragama yang sering dilakukan untuk mencari penyelesaian damai antar kelompok agama dengan kelompok agama lain.

3. Peran Lembaga Keagamaan dalam Perubahan Sosial

Al-Quran telah menyatakan secara jelas tentang perlunya suatu perubahan dinamis sebagai prakondisi untuk suatu transformasi, seperti yang tersirat dalam surat ke 8 ayat 53 yang artinya;

*... Disebabkan karena Allah tidak mengubah nikmat yang telah dianugerahkan kepada suatu kaum, sebelum kaum itu mengubah keadaan mereka sendiri. Dan sesungguhnya Allah itu mendengar lagi Mengetahui..*¹³⁷

Demikian juga dalam surat AR-Radu ayat 11 lebih ditegaskan lagi mengenai perlunya mengadakan sebuah perubahan. Allah menjelaskan sebagai berikut:

*.... Sesungguhnya Allah tiada mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan bila Allah hendak mendatangkan bahaya kepada suatu kaum, tiadalah dapat ditolak dan mereka tiada mempunyai pelindung selain Dia..*¹³⁸

Karena Al-Quran diberuntukan bagi manusia dan menjadi pedoman muslim, maka agen perubahan dalam Islam adalah kaum muslimin yang memiliki keyakinan terhadap kebenaran mutlak yang tertuang dalam dua ayat di atas sebagai atmosfir, ide dan gagasan untuk

¹³⁷ Al-quran dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, (Bandung: Gema Press Risallah, 1989), h. 270

¹³⁸ Ibid, h. 370

melakukan gerakan dan tindakan dalam proses perubahan sosial di masyarakat.

Sebagai perbandingan, literatur yang ada memberikan gambaran lain tentang agen perubahan ini. Werren Bennis mendefinisikan “agen perubahan” sebagai “perorangan atau kelompok orang baik praktisi maupun ilmuwan sosial, yang memanfaatkan teori... dalam rangka untuk meningkatkan fungsi maupun efektivitas organisasi”¹³⁹. Selanjutnya Bennis menggambarkan para agen pembaharu itu sebagai berikut:

Rasanya mereka sangat terlibat dengan perubahan itu sebagaimana mereka mengkajinya. Mereka telah mengembangkan kesadaran diri tentang strategi perubahan sosial sebagaimana juga tentang tujuannya. Mereka lebih di dorong oleh suatu etika radikal ketimbang yang konservatif, yang berarti bahwa pendirian mereka terhadap perubahan sosial muncul dari kondisi masyarakat yang tidak sehat, yaitu pada

¹³⁹ Muhamad Al-Buraey, *Islam Landasan Administrasi Pembangunan*, (Jakarta: Rajawali, 1986), h. 391

lembaga-lembaganya, dimana didalamnya, kendatipun amat kecil, tersedia peluang untuk berbuat. Pendeknya, para agais perubahan tidak hanya dapat membaca berbagai bentuk suasana masyarakat, tetapi mereka juga bermaksud untuk mengubahnya.¹⁴⁰

Rumusan tentang agen perubahan ini merupakan potret diri teoritis dan praktis, yaitu seseorang yang memikirkan rencana dan metode untuk mengadakan perubahan sekaligus melaksanakannya. Dalam pandangan islam, agen perubahan, baik yang duduk di belakan meja atau pun turun ke lapangan, merupakan pelaksana yang tidak hanya bekerja untuk perubahan itu saja, tetapi berusaha sekuat mungkin membawa masyarakat menuju masyarakat yang di cita-citakan. Mereka memahami benar apa yang perlu diubah dan mana yang tidak, di lain pihak perlu memiliki ambisi dan kemauan kuat, seorang agen yang kuat biasanya adalah akedemisi, sarjana, peneliti, pemikir, atau filosof.

¹⁴⁰Ibid., h. 391

Agen perubahan adalah professional, dan terlatih dalam berbagai bidang, akan tetapi agan perubahan menurut islam tidak harus seseorang yang memiliki gelar keserjanaan dalam ilmu perilaku (behavioral science).Juga bukan seorang lulusan universitas, seorang konsultan, atau orang yang memiliki kemampuan professional dalam disiplin ilmu perilaku.

Untuk melakukan perubahan masyarakat, para agen perubahan hendaknya dapat memahami dinamika perubahan, mekanisme dan ragamnya, hal ini diperoleh dengan melakukan serangkaian perubahan yang bermacam-macam, dimana mereka sendiri dapat mengamati dan melakukannya. Menurut Bennis dalam Islam Landasan Alternatif mendefinisikan delapan perubahan yaitu,¹⁴¹

(1)Perubahan terencana yang memerlukan penetapan tujuan bersama, keseimbangan kekuatan dan juga kemauan dari kedua pihak; (2) Indoktrinasi, yang meliputi penetapan tujuan bersama dan membuat

¹⁴¹Ibid., h. 393

pertimbangan, tetapi...dengan perbandingan kekuatan yang tak berimbang.(3) perubahan koersif(paksaan), ditandai oleh tiadanya penetapan tujuan bersama, ketidakseimbangan perbandingan kekuatan, dan kesengajaan pada satu pihak misalnya dengan brain washing (cuci otak) dan pengendalian pikiran, yang merupakan bentuk-bentuk perubahan koersif; (4) perubahan teknokratis, yaitu mengikuti suatu model kerekayasaan, umpamma, klien mengemukakan kesulitan-kesulitannya, yang disebabkan oleh kekurangan pengetahuan, dan menganggap bahwa kekurangan ini sebagai kelalaian dan bukan sesuatu yang memang secara fungsional ada di dalam sistem itu sendiri. Para teknokrat berpegang teguh pada asumsi tersebut dan ini hanya melaporkan hasil-hasil apa yang telah di temukan; (5) Perubahan Interaksional, ditandai dengan penetapan tujuan bersama, distribusi kekuasaan yang agak baik, tetapi tanpa kesengajaan hubungan antara kedua belah pihak; (6) Perubahan Sosialisasi, mempunyai pertalian langsung dengan kontrol yang hirarkis, seperti halnya hubungan bapak anak sebagai contoh yang amat jelas.(7) Perubahan emulatif, banyak

terjadi dalam organisasi formal, dimana terjadi hubungan antara atasan dan bawahan. Perubahan dilakukan melalui identifikasi dan emulasi (keunggulan) figur penguasa oleh bawahannya; (8) perubahan alamiah, yang terjadi tanpa kesengajaan dan penetapan tujuan yang jelas dari pihak-pihak yang terlibat dalam perubahan.⁴¹ Perubahan alamiah ini berkaitan dengan hal yang bersifat kebetulan, “pasrah pada takdir” adanya akibat tak terduga, inovasi-inovasi spontan.

Pada kenyataannya, jarang sekali di temukan proses-proses perubahan yang tergambar dengan jelas, lagi pula perbedaan-perbedaan dalam setiap perubahan masih samar dan tidak terpilah secara jelas. Hal ini membangkitkan peluang untuk melakukan penilaian ulang dan meneliti bentuk-bentuk perubahan yang sesuai dengan prinsip dan ajaran Islam. Meskipun secara keseluruhan tujuan kaum muslimin adalah memikirkan suatu strategi perubahan yang terencana. Dengan kesadaran yang ada, serta meningkat pertimbangan kekuatan, kaum muslim pada tahap ini baru dapat memilih bentuk-bentuk yang mendekatkan pada tujuan.

Dalam memetakan tujuan perubahan sosial diperlukan elemen yang kuat di semua tingkatan dengan cara melakukan fungsi-fungsi yang jelas serta terorganisir secara baik dan rapi, hal ini dapat dilakukan oleh organisasi organisasi atau lembaga-lembaga, baik lokal, regional, nasional dan Internasional. Untuk itu semua perlu adanya peran dan fungsi lembaga sosial.

Berkaitan dengan peranan lembaga sosial, Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa “peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia telah menjalankan suatu peranan. Kedudukan dan peranan tidak dapat dipisahkan karena satu sama lain saling tergantung. Tak ada peran tanpa kedudukan dan tak ada kedudukan tanpa peran.”¹⁴²

Salah satu yang dimaksud dengan peranan adalah peranan yang meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan disini merupakan rangkaian peraturan-peraturan

¹⁴² Soejono Soekarno, Kamus sosiologi, (Jakarta: PT. Gramedia, 1993),h. 268

yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.¹⁴³

Sehubungan lembaga merupakan rangkaian pola-pola hubungan yang membentuk norma-norma tertentu yang di bentuk secara sengaja atau lahir dari kebiasaan individu atau masyarakat, maka peran lembaga sosial dalam kehidupan manusia sangat penting karena menjadi patokan atau pedoman perilaku seseorang atau masyarakat.

Sebab satunya yang dibutuhkan dalam melakukan perubahan sosial di masyarakat adalah lembaga agama. Menurut Hendropuspito, satu hal yang membedakan lembaga agama (religius) dengan lembaga sosial pada umumnya adalah masalah pencapaian kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan-kebutuhan yang berkenaan dengan kepentingan dunia supraempiris.¹⁴⁴

¹⁴³ Ibid, h. 269

¹⁴⁴ Dalam konsep Hendropuspito, lingkup bahasan agama hanya membicarakan masalah adanya “ kekuatan di luar manusia ” yang bisa mengatasi problema tentang “ ketidakpastian ” .”ketidakmampuan” dan “ ” dengan mengadakan upacara-upacara

Lembaga agama diperlukan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang tidak dapat dihadapi dan diatasi manusia mengenai ketidakpastian, ketidakmampuan dan kelangkaan. Dengan adanya lembaga agama, yang mengatur kaidah, norma keagamaan secara tegas, semuanya dapat dicapai dengan pasti karena semuanya diserahkan kepada “kekuatan dirinya” yang menganggap mampu mengatasi setiap persoalan yang tidak dapat di atasi manusia. Lembaga sosial secara makro bertujuan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat, dan secara mikro bertujuan untuk menjaga agama, jiwa, akal, harta, keturunan dan kehormatan yang menjadi kebutuhan dasar manusia.

Peran lembaga sosial dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia meliputi peran diantaranya; (1)

tertentu yang menghubungkan dirinya dengan “kekuatan” tersebut, memakai lambang-lambang tertentu yang membantu upacara-upacara tersebut. Pengertian ini sangatlah sempita, sedangkan pengertian agama yang terdapat dalam al-quran agama bukan hanya sekedar sistem kepercayaan atay sistem ritus saja tapi menyangkut seluruh aspek kehidupan dan kebutuhan dasar manusia, seperti perkawinan, ekonomi, politik, budaya, pendidikan, dan lain-lain. Hendropuspito, Sosiologi Agama, Jakarta, penerbit Yayasan Kanisius, 1983 h. 29-57

keagamaan khususnya yang berkaitan dengan keimanan dan peribadatan,2) perkawinan dan keluarga untuk memenuhi antara lain kebutuhan seksual, mendapat keturunan dan lain-lain, 3) pendidikan untuk menjaga hati, perilaku dan memberdayakan akal,4) ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan dan seterusnya.

Peran lembaga sosial adalah untuk membawa, mengajak dan membimbing manusia mencapai kebahagiaan di dunia dan diakhirat, dengan cara membuat dan merinci norma-norma atau kaidah-kaidah pokok yang dapat memenuhi kebutuhan dasar (dlaluriyah) manusia, bahkan kebutuhan sekunder (hajiyyat) atau kebutuhan tersiernya (tahsiniyyat) sepanjang tidak mengganggu atau merusak kebutuhan utama manusia secara keseluruhan sehingga dapat menjadi rahmatan lil alamin. Hal ini di tandaskan dalm Al-Quran surat Al-Anbiyaa' ayat 107, yang artinya *“Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan unuk menjadi rahmat bagi semesta alam.”*¹⁴⁵

¹⁴⁵ Soejono Soekanto, Kamus Sosiologi, op.cit, h. 508

Demikian pentingnya peran lembaga sosial dalam kehidupan masyarakat, diantaranya meliputi ;

1. Pengaturan perilaku manusia agar sesuai dengan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku, baik yang bersumber dari masyarakat seperti kebiasaan-kebiasaan atau norma-norma yang ditetapkan oleh yang mempunyai wewenang untuk menetapkan norma tersebut, dan yang paling berwenang menetapkan norma yang mutlak dalam pandangan manusia adalah Allah, walaupun manusia diberi wewenang menetapkan sesuatu norma untuk mengatur perilakunya harus sesuai dengan kehendak norma tertinggi (groundnorm)
2. Pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan akan pemenuhan rasa keagamaan maupun hal lain yang dibutuhkan masyarakat, terutama pemenuhan terhadap kebutuhan dasar (dharury), kebutuhan sekunder (hajjy) ataupun tersier (tahsiniy).
3. Melakukan hukuman (punishment) terhadap yang melanggar norma untuk menjaga keseimbangan sosial ataupun sebaliknya memberikan ganjaran atau hadiah, pahala (reward) bagi orang atau masyarakat yang

menjaga norma-norma yang perlu ditaati, sehingga dengan cara demikian tampaknya tujuan yang telah ditetapkan oleh semua lembaga sosial maupun agama akan tercapai secara gradual.

Setelah tahapan-tahapan yang paling tidak dapat mendorong terciptanya kedinamisan masyarakat dalam mentaati norma, paling tidak akan terjadi dinamisasi perubahan di masyarakat dan bahkan akan mempengaruhi perubahan pada setiap lembaga yang ada pada masyarakat.¹⁴⁶ Perubahan-perubahan tersebut pada titik akhirnya akan mengakibatkan perubahan pada tujuan utamanya, yaitu sebagai rahmatan lilalamin, walaupun terjadi inisiasi-inisiasi dalam proses melakukan tahapan perubahan. Dan yang akan diulas disini adalah fungsi lembaga agama yang berkaitan dengan lembaga kepercayaan dan peribadatan, dimana fungsi lembaga kepercayaan dan peribadatan ini antara lain :

1. Berfungsi untuk mengenalkan Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa dan segala macam sifatnya yang

¹⁴⁶ Cohen. J., Sosiologi Suatu pengantar, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 148

- terbingkai dalam as'maul husna yang tertuang dalam Al-Quran
2. Berfungsi untuk mengenalkan dan mengajarkan sesuatu yang wajib dipercayainya baik yang nyata maupun yang maya
 3. Mengenalkan dan mengajarkan syariat yang ada dalam kitab kepercayaannya yang di bawa oleh para nabi nabi
 4. Memberi arahan dan menentukan identitas manusia sebagai hamba Allah, membawa dan mengajak manusia kepada kemaslahatan dunia dan akhirat dan sekaligus menanamkan hak dan kewajiban manusia di muka bumi untuk mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya.
 5. Memberikan ketenangan dan ketentraman jiwa manusia dengan melaksanakan segala upacara-upacara ritual dalam Islam seperti shalat, zakat, shaum, haji dan kewajiban lainnya.

Begitu juga lembaga lainnya seperti lembaga ekonomi, politik, pendidikan, perkawinan, budaya yang berkaitan untuk pemenuhan kebutuhan manusia agar

terjadi perubahan-perubahan di masyarakat harus melakukan fungsinya masing-masing dengan konsisten sesuai dengan sasaran masing-masing. Fungsi-fungsi ini akan terlaksana apabila langkah-langkah kerja dan kaidah-kaidah yang telah di gariskan dalam mencapai kebutuhan pokok tersebut dijalankan.¹⁴⁷

Sehingga pada setiap segmen kehidupan manusia akan terjadi perubahan secara bertahap, dan manusia akan menuju kesejahteraan hidupnya, karena salah satu fungsi lembaga keagamaan untuk memberikan langkah-langkah proses kehidupan mengenai hak dan kewajibannya yang diembankan Allah kepada hambanya, sebagai *khalifatullah fil-al-ardl*.

Menurut Durkheim sarana keagamaan adalah lambang-lambang masyarakat, kesaklarannya bersumber pada kekuatan yang dinyatakan berlaku oleh masyarakat secara keseluruhan bagi setiap anggotanya, dan fungsinya adalah mempertahankan dan memperkuat rasa

¹⁴⁷ Sapri Hamid, sendi-sendi sosiologi, suatu bahasan Teoritis dan sistematis, (Bandung: FH UNISBA, 1994), h. 89

solidaritas dan kewajiban sosial.¹⁴⁸ Kemudian yang dapat diamati adalah masyarakat yang berkembang diman kehidupan keagamaan dinilai sangat penting, dan di mana fungsi agama dapat secara nyata di tegakkan. Durheim mengatakan:

Berbagai peribadatan terlihat memiliki fungsi sosial tertentu ketika, dan sampai batas tertentu, peribadatan-peribadatan itu berfungsi untuk mengatur, memperkokoh dan mentranmisikan berbagai sentimen, dari satu generasi ke generasi lainnya, sebagai tempat bergantung bagi terbentuknya aturan masyarakat yang bersangkutan.¹⁴⁹

Dalam perspektif sosiologis, agama dipandang sebagai sistem kepercayaan yang diwujudkan dalam perilaku sosial tertentu. Ia berkaitan dengan pengalaman manusia, baik sebagai individu maupun kelompok. Sehingga setiap perilaku yang diperankannya akan terkait dengan sistem keyakinan dari ajaran agama yang

¹⁴⁸ Betty R. Scharf, *Kajian Sosiologi Agama*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995), h, 63

¹⁴⁹ *Ibid.*, h., 65

dianutnya. Perilaku individu sosial di gerakkan oleh kekuatan dari dalam yang didasarkan pada nilai nilai ajaran agama yang menginternalisasi sebelumnya.¹⁵⁰ Agama memungkinkan manusia melakukan hal-hal yang paling besar yang mampu dilakukannya, dan ia menyebabkan oran dapat melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain; ia memberikan kepadanya kedamaian kebahagiaan, keharmonisan dan kesadaran akan tujuannya, dan ia memberikan semuanya ini dalam bentuk yang mutlak.¹⁵¹ Hal ini berlaku untuk semua jenis masyarakat, dan dapat mendatangkan akibat-akibat lain disamping keharmonisan yang meningkat dan ia juga dapat menimbulkan berbagai konflik-konflik dengan kelompok kelompok masyarakat lainnya.

Atas dasar ruh-ruh agama itu sebagai energi yang sangat kuat akan kehidupannya manusia dalam melakukan tindakan individu dan kelompok dan bahkan

¹⁵⁰Dadang Kahmad, Sosiologi Agama, (Bandung: PT Remaja Rodakarya, 2000), h. 53

¹⁵¹R. Scharf, Kajian Sosiologi Agama, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995), h. 69

masyarakat dalam mendorong terjadinya suatu pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan, maka lembaga keagamaan manapun tanpa kecuali akan hampir bergerak sama nilai pencapaiannya, hanya saja lembaga dalam melakukan pencapaian misi dan tujuan lembaga itu dilakukan secara profesional sesuai dengan tugas dan kewenangan di setiap tingkatan. Karena itu lembaga agama dapat mempengaruhi terjadinya perubahan-perubahan di berbagai segmen kehidupan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhannya.

Demikian tampaknya bahwa lembaga keagamaan melakukan peran dan fungsinya dalam menata masyarakat secara bertahap dan sebagai entry point, ajaran agama itu sendiri yang mewarnai perilaku individu, kelompok, lembaga dalam melakukan pola-pola kelakuan dan tindakan dimasyarakat, sehingga tanpa terasa hal itu semua mendorong terjadinya perubahan-perubahan yang berarti di lingkungan masyarakat manusia. Baik yang menuju pada keyakinan dan keharmonisan dan kedamaian dan bahkan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh kelompok masyarakat lain yang

memiliki perbedaan dasar nilai ajaran keagamaannya. Itu semua mendorong terjadinya perubahan-perubahan yang berarti di lingkungan masyarakat manusia. Baik yang menuju pada keyakinan dan keharmonisan dan kedamaian dan bahkan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh kelompok masyarakat lain yang memiliki perbedaan dasar nilai ajaran keagamaannya

C. Dakwah Islam dan Perubahan Sosial

1. Pengertian dan jenis-jenis Dakwah

a. Pengertian Dakwah

Kata *dakwah* dan kata kerja *da'a*, yang merupakan asal kata *dakwah*, yang mencakup berbagai makna yang luas, dari memanggil, mempersilahkan, memohon, *berdo'a*, propaganda, menyebarkan, hingga pengaduan klain hukum . Kebanyakan nuansa yang diperlihatkan oleh terjemahan-terjemahan itu penting di cermati untuk membedakan berbagai gagasan dan pemahaman religius,

yang sebagian hanya secara samar di tunjukan dalam Al-Quran.¹⁵²

Dalam Al-Quran makna dasar dakwah mungkin makna utamanya adalah berdoa, *“Dan jika hamba-hambaKu bertanya tentang Aku, (jawablah) bahwasannya Aku dekat. Aku mengabulkan doa (dakwah) orang-orang yang memohon kepada-KU.”*¹⁵³ Dakwah karena itu, dapat menunjukan doa seseorang atau permohonan sangat mendesak yang di tujukan kepada Tuhan; seperti doa Nabi Musa dan Harun. (QS Yunus, 10 : 89), Ibrahim, Sulaiman atau Yunus (yang ditegaskan dalam sebuah hadits yang merujuk pada Al-Quran).

Dakwah juga berarti azan, seperti yang menyebut secara khusus dakwah (azan) sebagai pekerjaan si orang Ethiopia (Bilal), tetapi lebih umumnya doa individu Kepada Tuhan untuk tujuan khusus seperti memohon karunia. Ayat Al-Quran memberi peringatan dan teguran

¹⁵² John L. Esposito, Dunia Islam Modern, Ensiklopedia Oxford, (Bandung: Mizan 2001). H. 339

¹⁵³ AL-Quran Surat Al-Baqarah (2) : 186

kepada orang-orang yang berdoa selain kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Dan dakwah (meminta) kepada Tuhan selain Allah adalah sia-sia baik di kehidupan kini (dunia) maupun akhirat, dan mengerjakan kesia-siaan merupakan suatu kejahatan.

Doa (dakwah) kepada Allah, yang hanya dialah yang akan mengabulkan permintaan para hambanya. Begitu juga setiap hamba harus tahu bahwa dakwah Tuhan. Seruaannya, perlu mereka tanggap. Dakwah yang tertinggi adalah dakwah Tuhan. Prinsip ganda ini bahwa Tuhan menyeru melalui dakwah-Nya dan bahwa hanya Dia-lah yang memenuhi dakwah para hamba-Nya melahirkan pengertian dakwah yang benar, yakni dakwah al-haqq seperti dinyatakan dalam Al-Quran, *Hanya bagi Allah lah doa yang benar (dakwah al-haqq), dan yang mereka sembah selain Allah tidak menanggapi sama sekali, melainkan seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air supaya air itu sampai ke mulutnya, padahal air itu tidak sampai ke mulutnya. Dan orang-orang kafir itu sia-sia*

belaka.¹⁵⁴ Dari contoh tersebut, maka munculah makna dasar dakwah Islam. Dakwah Islam adalah pernyataan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dakwah adalah Islam, dan Islam adalah dakwah.

Nabi sebagai utusan Allah dikatakan sebagai dai Allah (penyeru kepada ajaran Allah, dalam Al-Quran surat Al-Ahzab (33): 46 dan Al-Ahqap (46): 31-32. Intinya adalah ditugaskan untuk menyeru kepada Allah agar beriman. Maka gagasan dakwah dialamatkan kepada semua umat manusia agar mengikuti kepada jalan yang lurus, oleh karena itu nabi menjawab dakwah Tuhan dengan menjalankan dakwah, sebagaimana diungkapkan menyebut Muhammad, "*Dan sesungguhnya benar-benar menyeru kepada jalan yang lurus*" (QS, Al-Mu'minin (23): 73. Dengan penegasan ini, dakwah menjadi jalan yang lurus dan lebih dari sekedar doa. Dengan demikian dakwah dipersamakan dengan "jalan yang lurus" yaitu agama yang benar.

¹⁵⁴ *Al-quran Surat Al-Ra'du (13): 14*

Paparan diatas dapat dianalisa bahwa secara umum, bahwa dakwah dalam bentuknya ada yang mengajak kepada ketaatan dan kebaikan, artinya menyeru kepada yang ma'ruf (baik) serta keselamatan, disamping itu apa pula dakwah yang menyeru kepada perbuatan pembangkangan dan kemaksiatan-kemaksitan dan kemungkaran.¹⁵⁵

Disamping itu Amrulah Ahmad menegaskan bahwa ada dua pengertian yang selama ini ada dalam pemikiran dakwah, yaitu dakwah diberi pengertian tabligh, penyiaran atau penerangan agama, dan dakwah diberi pengertian suatu usaha untuk merealisasikan ajaran islam dalam semua segi kehidupan manusia.¹⁵⁶ Pengertian yang pertama sebenarnya terlalu sempit sehingga kurang mampu menghubungkan antara symbol dengan realitas (denotasi)

¹⁵⁵ Jum'ah Amin Abdul Aziz, *Ad-Dakwah Qaqq'a'id wa Ushuul (Fiqh Dakwah)*, terjemahan, (Solo : Intermedia, 1997) h. 26-28.

¹⁵⁶ Amrullah Ahmad, *Dakwah dan perubahan social*. (Yogyakarta: LP3ES, 1992),h.6

Kecenderungan ini dapat terlihat dari sebagian besar penulis tentang dakwah khususnya di Indonesia. Kerangka pemahaman ini menentukan kriteria da'I yang aktif berceramah/berkhutbah melalui mimbar-mimbar. Pada hal aktivitas seperti ini layak pada pada kategori tabligh' khatib. Apabila mubaligh sama dengan da'I, maka akan lahir sebuah pertanyaan : apakah mereka yang berusaha merealisasikan ajaran islam dalam lembaga-lembaga dakwah tetap tidak aktif tabligh tidak termasuk dalam kategori da'I akhirnya berindikasi terhadap tradisi dakwah yang dilakukan umat islam, akibat hal ini maka islam hanya mampu memasuki wilayah pinggir dari system kepribadian dan system social. Dan hampir memberikan jawaban terhadap kebutuhan Umat manusia, kemudian juga diperkuat oleh tradisi bahwa "kita hanya menyampaikan saja sedangkan petunjuk untuk masuk Islam datang dari Allah".

Anggapan ini diambil dari hasil pemahaman terhadap Al-quran¹⁵⁷ dan itu pada titik paling akhir memang benar. Yang jadi persoalan adalah Tuhan tidak

¹⁵⁷ Q.S. *Al-Baqarah* (2) : 119-120)

akan mengubah nasib individu dan masyarakat tanpa adanya upaya yang sungguh-sungguh dari anggota dan kelompok masyarakat untuk mengubahnya.¹⁵⁸ Jika hal ini tidak dijadikan landasan motivasi dakwah, maka disaat yang sama menemui jalan buntu untuk berusaha mengubah masyarakat maka akan melahirkan etos kerja dan budaya dakwah yang malas, dalam arti malas dalam berfikir, bertindak di kalangan umat Islam dalam bidang dakwah yang jelas-jelas bertentangan dengan jiwa dan perintah agama bahwa ummat Islam harus kreatif dan mempunyai budaya etos kerja yang tinggi dalam berbagai aspek kehidupan, untuk memenuhi kebutuhannya.

Sedangkan penjelasan dari pengertian dakwah yang kedua adalah suatu usaha untuk merealisasikan ajaran Islam dalam semua segi kehidupan manusia, dakwah identik dengan tabligh, akan tetapi suatu usaha untuk mewujudkan ajaran Islam dalam semua segi kehidupan, dalam kerangka ini tabligh merupakan bagian dari dakwah Islam.

¹⁵⁸ *Q.S. Ar-rahman* (13) : 11

Oleh karena pengertian kedua ini kadangkala menjadi terlalu luas maka perlu pembatasan-pembatasan agar dapat dibedakan dengan kegiatan lain. Kriteria awal dapat diberikan bahwa suatu kegiatan dapat disebut dakwah jika merupakan suatu system usaha bersama orang yang beriman dalam rangka mewujudkan ajaran Islam dalam semua segi. Kehidupan sosio-kultural yang dilakukan melalui lembaga - lembaga dakwah. Muhammad Abu Zarah memandang dakwah pada dua hal.

Pertama adanya organisasi (sistem) dakwah untuk menunaikan fardlu kifayah dan kedua, pelaksana dakwah perorangan.¹⁵⁹ Fenomena munculnya lembaga dakwah berangkat dari kesadaran individu untuk melaksanakan tabligh dan berkembang menjadi kesadaran kolektif untuk melaksanakan dalam suatu sistem tertentu dalam lembaga dakwah, hal ini untuk menuju pada dakwah professional, maka keterlibatan para da'i dalam lembaga dakwah tidak hanya pekerjaan sampingan tetapi sebagai pekerjaan utama dan semua

¹⁵⁹Amrullah Ahmad, *op.cit.*, h. 8

keterampilan dan intelektual yang dimiliki dikerahkan untuk memfungsikan sistem dakwah , dan tampaknya sampai saat ini lembaga dakwah belum professional dengan indikator bahwa keterlibatan da'i dalam lembaga dakwah masih pekerjaan sambilan sehingga konsistensinya kurang terutama dalam mengamati permasalahan, menyusun program pemecahan, melaksanakan dalam kenyataan dan mengevaluasi dalam kegiatan yang dilaksanakan.

Di dalam Al-quran banyak ditemukan ayat-ayat yang memiliki makna atau ajakan untuk berdakwah, diantaranya: QS. Ali-imran (3): 104, 110, QS. An-Nahl (16): 125, 126, QS. Al-kahfi (18): 27, 28, 29. Dari penjabaran diatas dapat dapat disimpulkan bahwa dakwah memiliki tiga pengertian mendasar, yaitu: pertama, dakwah ummat islam terhadap sekalian umat manusia dengan kehendak sendiri tanpa paksaan; kedua, dakwah untuk mengajak berbuat kebaikan dan melarang berbuat kejahatan diantara sesama muslim yang seiman;

ketiga, dakwah dalam arti menasehati atau mengingatkan antara seorang terhadap orang lain.¹⁶⁰

Maka dari itu untuk merealisasikan dakwah islam, sebagai titik awal (*entry point*), perlu mengkaji lebih dalam apa yang dilakukan Rasulullah SAW, ketika melakukan proses dakwah, baik pada periode Makah, yang merupakan prosesn senantiasa mencegah mungkar (tata social yang dzalim) yang inti penegakannya adalah *birr* dan *taqwa*. Proses penyampaian yang ma'ruf dan mencegah yang munkar adlah kewajiban dan sama sekali bukan hak, artinya menegakan keadilan merupakan perintah moral yang terdalam bagian integral fungsi social islam dan sekaligus merupakan refleksi tauhid.¹⁶¹ Dalam refleksi itulah hasrat untuk menciptakan tatanan sosial yang adil bukan hanya cita-cita politik, tetapi merupakan komitmen ummat islam, karena secara integral berkaitan dengan doktrin keselamatan.¹⁶²

¹⁶⁰ Sudirman, "Problematika Dakwah Islam Di Indonesia" dalam Forum Dakwah, 1972, hal 47

¹⁶¹ Muthohari, *Masyarakat dan sejarah*, (Bandung:Mizan, 1990), h.193

¹⁶² Mumtaz Ahmad, *Teori Islam*, (Bandung: Mizan, 1992), h. 25

Upaya mengaitkan dakwah islam dengan masyarakat yang makin berubah dan modern, tanpa melakukan formulasi pemahaman dan penyegaran kembali pengertian dakwah islam, akan membawa kita pada suatu kajian yang bersifat normatif dan bahkan apologetic. Atas dasar asumsi inilah, sebagai upaya penyegaran kembali pengertian dakwah islam dan sekaligus memahami dakwah islam sebagai upaya kolektif umat islam untuk memahami dimensi-dimensi dakwah islam.

Secara normatif, dimensi dakwah islam terbagi dua bagian; pertama dimensi kerisalahan dan kedua dimensi kerahmatan. Memahami dakwah islam dari dimensi kerahmatan.¹⁶³ Kehadirannya telah mewujudkan

¹⁶³ Al-maidah ayat 67: Artinya, *Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya...dan Ali'Imran 104; artinya: dan hendaknya ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.*

perubahan sangat besar dan mendasar pada bidang pandangan hidup, nilai-nilai, dan tata pergaulan umat manusia. Dengan demikian dakwah islam mengarah pada perubahan perilaku manusia baik pada tingkat individu maupun perilaku kelompok dan masyarakat.

Perubahan perilaku itu dimungkinkan jika kegiatan-kegiatan dakwah dapat mempengaruhi tata nilai yang dianut oleh individu-individu dan masyarakat. Dengan demikian dimensi kerisalahan dakwah islam berusaha menumbuhkan kesadaran diri dalam proses internalisasi nilai-nilai islam sebagai nilai hidup dan kehidupan manusia.¹⁶⁴ Hal ini dapat dikatakan bahwa kegiatan dakwah islam berarti proses pengkomunikasian serta usaha menginternalisasikan nilai-nilai islam untuk mengatur tata laku individu, kelompok dan masyarakat secara keseluruhan.

¹⁶⁴ Abdul Munir Mulkan, *Paradigma Intelektual Islam, penganta pendidikan dan dakwah islam*, (Yogyakarta: SIPRES, 1993), h. 103

Kedua; dimensi kerahmatan¹⁶⁵ yakni sebagai upaya untuk mengaktualisasikan pesan global islam sebagai *rahmatan lil'alamin* (jalan yang mensejahterakan, membahagiakan, dan sebagainya bagi umat manusia).¹⁶⁶ Disamping itu juga merupakan upaya aktualisasi nilai imani pada tataran kenyataan umat manusia yang terorganisir fungsi kekhalifahan.¹⁶⁷

Walaupun demikian dakwah islam tidak dilaksanakan pada masyarakat yang nihil atau tidak memiliki budaya, melainkan dalam sosio cultural tertentu. Oleh karenanya, dakwah islam dapat pula diidentifikasi sebagai proses komunikasi/penghubung antara al-islam dengan realitas obyektif masyarakat atau mad'u. dan sebagai usaha manusia yang diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan ajaran al-islam secara keseluruhan yang tanpa dibatasi oleh wilayah teritorial manusia baik yang bersifat ras suku bangsa dan identitas yang dimiliki oleh manusia di seluruh dunia.

¹⁶⁵ *Al-Quran, Surat Al-anbiya : 107, Artinya : dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.*

¹⁶⁶ Abdul Munir Mulkan *op.cit.*, h. 116

¹⁶⁷ Amrullah Ahmad, *op.cit.*, h. 4

Islam sebagai objek material dakwah, merupakan suatu sistem ilahiah yang mutlak benar. Tetapi pemahaman dan persepsi umat manusia tentang sistem ajaran islam yang subyektif, karena itu perlu dipahami bagaimana agama dimengerti oleh para pemeluknya.¹⁶⁸ Kita juga sering berbincang tentang islam dengan perbedaan yang runcing, itu disebabkan cara memandang agama dari dimensi yang berbeda, oleh karena itu untuk memahaminya disarankan mengetahui sikap-sikap berbeda yang tergantung pada pandangan-pandangan keagamaan seseorang.¹⁶⁹

Jalaluddin Rahmat berpendapat dalam hal agama, menurutnya; paling tidak ada dua cara dalam beragama, yakni, ekstrinsik dan intrinsik. Yang ekstrinsik memandang agama sebagai suatu untuk dimanfaatkan dan bukan untuk kehidupan (*something to use, but not to live*), agam digunakan untuk menunjang motif motif lain; seperti kebutuhan status, rasa aman atau harga (gengsi)

¹⁶⁸ Muhamad AS Hikam *Demokrasi dan Civil Society*, (Jakarta: LP3S, 1997), h. 7

¹⁶⁹ Jalaludin Rahmat, *Islam Di Indonesia, Masalah Definisi, Suatu Ukhuar mengaca Diri*, Rajawali Pres, Jkarta, 1991, h. 26

diri. Orang beragam dengan cara ini, bias dipastikan hanya melaksanakan bentuk-bentuk luar dari agama. Sedangkan instrinsik, agama dipandang sebagai *comprehensive commitmen* dan *driving integrating mitive* yang mengatur seluruh hidup seseorang.

Dengan demikian cara memandang agama dari dimensi yang berbeda, akan menyebabkan berbeda pula pada sikap dan pandangannya. Setiap agama paling tidak terdiri atas lima dimensi; ritual, mistikal, ideological, intelektual dan social.¹⁷⁰ Dimensi ritual islam berkenaan dengan upacara upacara religius, seperti salat, puasa, dan do'a. dimensi mistikal menunjukan pengalaman keagamaan dalam merealisasikan kesempurnaan moral, pemahaman tentang realitas, dan kebahagiaan rohaniah.¹⁷¹ Ada tiga aspek penting dalam dimensi ini "*concern, cognition, trust, and fear*" Dimensi ini

¹⁷⁰ *Ibid*, h. 38

¹⁷¹ At-tafani, *sufi dari zaman ke zaman*, (Bandung: Pustaka Salman ITB, 1985), h. 1

merupakan keinginan untuk mencari makna hidup, kesadaran kehadiran tuhan, taqwa dan tawakal¹⁷²

Dimensi ideologis mengacu pada serangkaian kepercayaan yang menjelaskan eksistensi manusia dihadapan Tuhan dan makhluk lainnya.¹⁷³ Pada dimensi ini orang islam memandang manusia sebagai *khalifahtullah fi al ardl*, dan orang islam dianggap mengemban misi untuk mengubah dunia, menegakan kebenaran dan keadilan merealisasikan berbagai nilai utama dan memberantas kerusakan di bumi¹⁷⁴ Disinilah dakwah islam dihadapkan kepada kenyataan-kenyataan hidup manusia, dan berarti pesan pesan dakwah perlu disesuaikan proporsi proporsi duniawi. Karena nilai nilai islam yang wajib didakwahkan bersifat universal dan fleksibel sesuai dengan acuan acuan ke-islaman.

Dipahami bahwa setiap agama memiliki kesamaan eatak dasar dalam dua hal pokok; klaim-klaim keabadian ajaran, nilai dan petunjuknya, dan perintah-

¹⁷² Jalaludin Rahmat, *op.cit.*, h. 38

¹⁷³ *Ibid.*, h. 39

¹⁷⁴ Amin Rais, *High Politics dalam intelektualisme Muhammadiyah*, (Bandung: mizan, 1992), h. 16

perintah moral yang merupakan konsekuensi dari konsistensi agar watak dasar tidak kehilangan vitalitasnya didalam denyut nadi kehidupan umat manusia. Penyesuaian persepsi keagamaan tatasemesta dan moralitas kemanusiaan untuk menjembatani jalannya ajaran sejarah yang menjamin kehidupan agar lebih manusiawi dan apabila penyesuaian telah melahirkan Kristal Kristal yang menjadi anutan sikap, piker dan perilaku para penganutnya, maka bergeraklah menjadi sebuah ideology. Ideology dari sumber manapun, senantiasa memuat cita-cita orientasi dan akhirnya merupakan pedoman hidup para penganutnya. Pada dimensi ideology, eksistensi umat beragama diuji secara intelektual. Mampukah mereka merumuskan suatu tata intelektual yang memuat peta kognitif mengenai masyarakat ideal yang mereka dambakan, kemana umat diorientasikan. Oleh karena itu dimensi intelektual, menunjukkan tingkat pemahaman tentang doktrin agama yang dipeluknya.

Apabila pada dimensi intelektual ini, umat islam sebagai da'i dan sekaligus mad'u dan berhasil

mengupayakan tata intelektual, maka satu langkah strategis telah berhasil dipenuhi dalam rangka mengemban tugas tugas social yang dianut oleh agama yang mereka peluk. Disinilah hubungan rancang bangun pemikiran intelektual dengan tindakan, karenanya menghindari pergumulan, pergulatan dan penolakan pemikiran dalam kehidupan manusia dengan cara mencukupkan diri pada praktek praktek ritual (ibadah) *mahdloh*.

Maka, penalaran bahwa konsep islam tentang keselamatan di dunia dan diakhirat, sama sekali tidak terpisahkan dari kehidupan social. Muhammad Husein Fadhulah mengungkapkan “tidak ada satupun ketentuan syari’at yang tak berkaitan dengan aspek aspek social, sebab seorang individu tidak ada artinya tanpa masyarakat, bahkan sebaliknya ditemukan dalam nilai individu manusia menjadikan individu sebagai bagian dari masyarakat yang terikat oleh kegiatan-kegiatan member dan menerima.”

Sehingga dimensi social merupakan manifestasi dari ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat,

karena memang agama dianugerahkan kepada masyarakat manusia. Dimensi social sebagai manifestasi doktrin-doktrin agama, kemudian melahirkan dimensi politik sebagai instrument untuk membumikan dimensi sosial islam sebagai agama dakwah pada realitas kehidupan manusia secara keseluruhan. Nilai-nilai universal merupakan alasan utama politik menjadi salah satu bagian pemikiran umat islam, meski telah lama diperdebatkan akan tetapi juga belum terpecahkan.¹⁷⁵ Keyakinan itu berhubungan dengan pertimbangan sosiologis-historis, yang oleh Rosenthal disebut sebagai bukti bahwa “konsep kenegaraan dan kemasyarakatan diyakini dibangun diatas kesatuan politik dan keagamaan dibawah otoritas hokum islam”.

Universalisme islam memberikan penjelasan dengan ruang lingkup yang luas, islam sangat relevan dengan seluruh ruang dan waktu dan selalu berusaha menentukan sejarah dan bahkan hamper seluruh nilai-nilai ke-islaman berkaitan dan berkenaan dengan tata

¹⁷⁵ Azyumardi Azra, “Islam dan Negara Eksperimen dalam Masa Modern, Tinjauan Sosio-Historis,” dalam *Ulumul Quran*, Jakarta Vol2, 1993 hlm, 22

social kemasyarakatan. Maka sebagai konsekuensinya islam perlu didakwahkan untuk mengatur kehidupan umat manusia.

Secara teologis keyakinan sebagai umatislam, bahwa islam sebagai agam sempurna, berisi ajaran yang dapat mewujudkan seluruh aspek kehidupan manusia, maka umat islam menolak persepsi agama model Barat yang membatasi agama dalam kehidupan pribadi. ¹⁷⁶

Dari pernyataan-pernyataan diatas pada hakikatnya, dakwah islam merupakan aktualisasi imani (teologis) yang dimanifestasikan dalam suatu sistem kegiatan manusia beriman dalam bidang kemasyarakatan yang dilaksanakan secara teratur mempengaruhi cara merasa, berfikir, bersikap dan bertindak manusia pada dataran kenyataan individual dan sosio-kultural dalam rangka mengusahakan terwujudnya ajaran islam dalam semua segi kehidupan dengan menggunakan cara tertentu.

¹⁷⁶ John. L. Esposito, *Ancaman Islam, Mitos atau Realitas*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 91

b. Jenis-Jenis dakwah

Dakwah Islam telah melintasi 15 abad sesuai dengan perkembangan zaman dan bergulirnya waktu, sejak rasulullah saw, khulafaur rasyidin dan seterusnya hingga kini sampai pada zaman modern dan bahkan pasca modern. Selanjutnya dakwah islam telah menjadi realitas yang patut dikaji secara ilmiah sesuai dengan perkembangan waktu dan tuntutan zaman, untuk menata realitas social sesuai dengan kebutuhan, dan kondisi masyarakat yang menempati ruang dan waktu.

Oleh karenanya, dakwah islam yang dilakukan oleh para da'i secara interaksioanal dengan masyarakat atau audien dalam proses dakwah memiliki jenis dakwah tersendiri dalam wilayah masing-masing. Hal ini adalah untuk mentransmisikan, menstransformasikan, mendifusikan serta menginternalisasikan pesan-pesan Tuhan dalam kehidupan manusia, untuk dijadikan aturan, norma, petunjuk yang dapat mengatur tatalaku, dan polatindak yang berkaitan dengan dirinya sendiri dan manusia lainnya. Maka dari itu jenis dakwah, tentunya perlu ada memiliki kategori yang jelas sesuai

peruntukannya. Syukriadi Sambas, menjelaskan bahwa kontek dakwah adalah interaksi da'i dengan mad'u dalam proses dakwah islam secara kamiyah (kuantitas) terdiri dari 6 jenis dakwah, yakni:

1. Dakwah *Nafsiyah*, yaitu interaksi antara da'i dan dirinya sendiri
2. Dakwah *Fardiyah*, yaitu interaksi da'i baik langsung maupun tidak langsung (bermedia) dengan mad'u (pendengar, masyarakat)
3. Dakwah *Fi'ah Qalilah*, yaitu interaksi da'i dengan mad'u kelompok kecil yang berlangsung secara tatap muka dan dialogis.
4. Dakwah *Hizbiyah*, yakni interaksi da'i dengan kelompok yang terorganisir
5. Dakwah *Ummah* yakni interaksi da'i dengan orang banyak, tidak bertatap muka dan monologis dengan media (cetak, atau elektronik), atau bertatapmuka tetapi monologis seperti ceramah umum
6. Dakwah *Qoba 'iliyah-syu'ubiyah*, yakni interaksi da'i dengan yang berbeda suku dan budaya

dalam suatu kesatuan bangsa yang dapat berlangsung dalam konteks 1,2,3,4,5 atau dakwah antar budaya berbeda bangsa.¹⁷⁷

Selanjutnya dakwah memiliki unsur-unsur yang terdiri 5 unsur dakwah, yaitu 1) *Da'i*, 2) *Maudlu* atau pesan *Illahiyah*, (disebut : *Sabili Rabbika, Dien Al-islam, al-shirath al-mustaqiem, Dien al-qayyim, Dien al-fithri*), 3) *Uslub* (metode) yang antara lain : *Bi-al-quwwah, Bi al-mauziyah al-hasanah, Bi al-mujadalah*), 4) *Wasilah* (media), 5) *Mad'u* (yang didakwahi) terdiri dari manusia dengan berbagai karakteristiknya.¹⁷⁸

Hal diatas menggambarkan bahwa, jenis-jenis dakwah dalam tataran teoritis dan sejarahnya sudah tertuang dalam perjalanan ummat islam sejak nabi Muhammad saw hingga kini, akan tetapi dilihat efektifitasnya dalam realitas sosial masih memerlukan waktu dan perjuangan yang sungguh sungguh.

¹⁷⁷ Syukriadi Sambas, *Matan Wilayah Kajian Dakwah Islam* (Ushul al-itsna al-asyirah), Makalah Puskaji IAIN Bandung, 1998, h. 4

¹⁷⁸ *Ibid.*, h. 3

Maka dengan adanya jenis jenis dakwah yang dioperasikan oleh manusia khususnya ummat islam, dan berkaitan dengan keluasan wilayah berimplikasi bahwa dakwah dilakukan diberbagai tingkatan kehidupan dan penghidupan manusia, menuju pada pelaksanaan ajaran islam secara menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan. Itulah sebabnya, maka dakwah pada tataran keteikatannya dakwah menjadi wajib bagi umat islam.

Dakwah merupakan kewajiban pokok umat islam, dan setiap muslim mempunyai peran dakwah, yakni menyebarkan kebenaran Islam kepada manusia sekitarnya. Rasulullah saw bersabda :*sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat.*” Perintah untuk menyampaikan amar ma’ruf nahyi munkar dalam arti perlu menyebarluaskan kebajikan dan melrang kejahatan sudah menjadi tema pokok bagi setiap umat Islam yang memiliki rasa berkewajiban untuk berdakwah. Dahkan perintah berjunga untuk menegakan kebenaran sampai pada bentuk fisik (perang) juga jelas menjadi prinsip Islam (*the principle of Islam*). Itu semua merupakan

makna dakwah dengann tujuan menyelamatkan manusia dan lingkungan dari kerusakan.¹⁷⁹

Hal itu terlihat jelas dari adanya dakwah secara fardiyah sampai pada qobailiyah serta syu'ubiyah, hal ini menunjukkan agar tertata rapi dengan benar dalam berbagai aspek kehidupan manusia dimulai dari tingkat individu sampai pada tingkat suku-suku dan bangsa-bangsa yang ada di muka bumi.

Agama sejauh menekankan aspek aspek rasional dan humanism atau sosial karikatif dalam suatu masyarakat, maka agama itu dapat disebut sebagai suatu *historical force*, kekuatan sejarah, yang turut menentukan perubahan dan perkembangan masyarakat. Dalm hubungan ini dapat dikatakan bahwa agama mampu menjadi katalisator pencegah disintegrasi dan penenang menghadapi disalokasi yang mungkin timbul sebagai akibat perkembangan yang dilakukan atau dilaksanakan baik nasional maupun mondial. Disinilah agama islam perlunya melaksanakan dakwah,

¹⁷⁹Fuad Amsyari, *Masa Depan Umat Islam Indonesia*, (Bandung: Al-Bayan, 1993), h. 160

dengan harapan terjadinya perubahan-perubahan di masyarakat dalam berbagai aspek kearah yang lebih baik.

2. Pengertian dan jenis-jenis Perubahan Sosial

a. pengertian Perubahan Sosial

Proses perubahan sosial dalam masyarakat berlangsung sejalan dengan perjalanan sejarah umat manusia, dari generasi ke generasi, perubahan sosial muncul .Karena munculnya ide-ide baru, penemuan-penemuan baru, sebagai upaya manusia untuk mengatasi hambatan - hambatan serta keinginan untuk mempertahankan masa depannya; khususnya yang berkaitan dengan pencapaian berbagai kepentingan baik secara individu, keluarga maupun kelompok-kelompok.

Perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk sikap, nilai-nilai, pola-pola perilaku, diantara kelompok-kelompok masyarakat.Ada pendapat yang menyatakan bahwa perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan unsur-

unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat, seperti perubahan unsur ekonomis, kebudayaan, geografis dan biologis. Proses perkembangan masyarakat sebagai suatu proses evolusi, seperti proses pertumbuhan yang bertambah kompleks fungsi dan strukturnya berdiferensiasi, serta ketergantungan bagian yang lainnya.

Struktur sosial merupakan gambaran dari berbagai jaringan hubungan manusia dalam awal proses bermasyarakat. Struktur sosial tidak ubahnya seperti pertumbuhan selaput kulit yang silih berganti, jika mati akan diganti oleh pertumbuhan selaput yang baru. Demikian pula struktur sosial, ia tumbuh dan berganti dari waktu ke waktu mengikuti perkembangan zaman. Seperti halnya kita mengenal adanya kekuasaan-kekuasaan kerajaan yang absolute, monarki pada waktu lampau, kemudian setelah melakukan bermacam macam bentuk evolusi akhirnya menjelma menjadi bentuk

negara sosialis, liberal dan republic yang ada pada sekarang ini. ¹⁸⁰

Sejumlah perubahan selalu berlaku pada semua masyarakat manusia, setiap saat dimanapun mereka hidup dan berada. Kadang-kadang perubahan itu berlangsung secara tiba-tiba dan serentak, misalnya suatu sistem pemerintahan dihancurkan oleh revolusi dan kemudian digantikan oleh pemerintahan yang berbeda dengan tatanan atau orde sebelumnya. Kadangkala perubahan itu berlangsung lambat secara gradual yang sukar diterima masyarakat, malahan anggota masyarakat tersebut tak sadar atau tak memperhatikan akan berlakunya perubahan yang telah melanda kehidupan mereka.

Apabila demikian maka dapat dikatakan bahwa perubahan selalu berlaku pada semua masyarakat manusia, dan manusia yang hidup bermasyarakat ialah subyek serta sasaran perubahan, dari manapun asalnya..proses perubahan mungkin berlangsung dalam

¹⁸⁰Jusman Iskandar, *Teori Perubahan Sosial*, (Bandung: Program Pascasarjana IAIN, 2000), h. 350

berbagai jenis kelajuan, yang lambat, sedang dan yang cepat, atau secara evolusi dan revolusi. Perubahan itu muncul dalam kaitan yang tak runtut maupun runtut karena aspek potensial masyarakat sendiridan datang dari luar, yang kemudian membentangkan alur perubahan perubahan tertentu.

Perubahan dapat menyangkut dalam berbagai hal, perubahan fisikal oleh prose alami dan perubahan kehidupan manusia oleh dinamika kehidupan itu sendiri. Perubahan yang menyangkut kehidupan manusia, atau terkait dengan lingkungan kehidupannya yang berupa fisik, alam dan sosial, disebut perubahan sosial.¹⁸¹ Perubahan sosial tak dapat dipelajari terlepas dari lungkupnya yang luas, sebagaimana istilah sosial merujuk kepada masyarakat yang tidak selalu sinonim dengan istilah budaya. Perubahan sosial tidak selalu berupa perubahan budaya, atau perubahan kebudayaan, kedua istilah ilmiah tersebut mempunyai makna tertentu, walaupun kedua perubahan itu mungkin berlaku

¹⁸¹ Judhistira K. Garna, *Teori Perubahan Sosial*, (Bandung: Program Pacasarjana UNPAD, 1992), h. 1

bersamaan. Ada kaitan antara kedua jenis perubahan dalam proses kehidupan kelompok manusia, seperti dikemukakan oleh *Ogburn* dalam Garna, bahwa... *That social change refers to change in Mechanism of human association*.¹⁸² dalam kaitan asosiasi manusia itu budaya ialah latar belakang gerak dari mekanisme asosiasi manusia tersebut.

Dalam kehidupan yang makin lama makin bersifat global perubahan itu jelaslah akan dianggap suatu kebiasaan karena perkembangan teknologi, transportasi, dan komunikasi yang cepat, sehingga krisis kehidupan di bumi lain akan berakibat ke bagian lainnya. *Moore* menyebut sifat perubahan sosial merupakan suatu *the normality of change*,¹⁸³ walaupun kekacauan kontemporer (*contemporary Chaos*) adalah cirri yang paling menonjol di permulaan abad ini dan menyebabkan perubahan yang cepat dibandingkan abad

¹⁸² *Ibid*, h. 2

¹⁸³ Perubahan bukanlah budaya modern yang istimewa, walaupun pada masa ini berlangsung sebagai krisis kehidupan manusia. Beberapa jenis dan derajat perubahan sebenarnya dialami manusia. Dalam Willbert E. Moore, *The Social Change*, (Prentice Hall: Englewood Cliffs, 1974), h. 1-2

ke 20. Karena itu baginya perubahan yang menjadi kebiasaan itu lebih baik ditinjau sebagai *contemporary change*, yang menurut lingkup globalisasi dapat dibuat suatu *set of generalizations* atau suatu ciri perubahan kontemporer atau semasa. Lebih lanjut menekan bahwa *..in modern world social change has taken on same special qualities and magnitudes*, dalam dunia modern perubahan sosial telah berlaku menurut beberapa segi kualitas dan ruang lingkungannya.

Dalam dunia modern terjadinya perubahan sosial memang tak dapat disangkal lagi dan seringkali tak bias ditolak kemudian gambaran perubahan yang agak luar biasa tersebut, Garna menjelaskan dalam suatu genrelisasi sebagai berikut; (1) Bagi masyarakat atau kebudayaan manapun perubahan cepat berlangsung, atau berlaku secara tetap. (2) Perubahan perubahan itu tidaklah bersifat sementara maupun terpengcil secara spasial, karena perubahan terjadi dalam rangkaian runtut bukan sebagai krisis sementara yang diikuti oleh masa rekonstruksi diam diam, dan akibat perubahan cenderung bergema ke seluruh kawasan atau seluruh dunia. (3).

Karena perubahan semasa itu mungkin berlaku dan akibatnya bermakna dimanapun, maka perubahan tersebut memiliki azas ganda. (4). Proporsi perubahan semasa yang berencana, atau isu-isu akibat inoasi yang sengaja dilaksanakan akan lebih tinggi proporsinya dibandingkan pada masa lalu. (5). Sehubungan dengan itu lingkup teknologi materi dan strategi sosial menyebar pesat yang akibat bersihnya adalah bertambah secara kumulatif walaupun beberapa tatacara atau prosedur relative lebih cepat menjadi basi. (6). Kejadian normal perubahan telah memberikan akibat bagi suatu pengalaman individu yang lebih luas dan aspek fungsional masyarakat dalam dunia modern bukan karena masyarakat seperti itu lebih terintegrasi dalam banyak hal – tetapi karena tak ada gambaran tentang cara hidup yang bebas dari kebiasaan perubahan.¹⁸⁴

Suatu istilah untuk menyebut kekacauan dalam proses kehidupan, tidak selalu berarti keadaan kacau dalam semua hal, atau paling tidak oleh kelompok masyarakat yang normative dianggap kekasauan dalam

¹⁸⁴ Judistira K. Garna, *op.cit*, h. 3

sejumlah tatanan sosial masyarakat.¹⁸⁵ Tetapi bagi kelompok masyarakat seperti itu mungkin tidak menolak perubahan, manakala perubahan berlangsung secara runtut dan gradual. Dan karena perubahan adalah hasil perencanaan, yaitu berupa hasrat dan tindakan yang disengaja untuk berlaku, perubahan jadi keluar dari rancangan bila menghadapi transformasi yang kompleks dan cepat serta mendadak.

Dalam keadaan seperti ini sinkronisasi dilakukan guna mencari kesesuaian antara rancangan dan pelaksanaan serta keadaan perubahan yang member kepastian, kemudian perhatian ditujukan kepada kompleksitas pola-pola yang dinamik. Perlu disadari pula bahwa pada hakekatnya kehidupan manusia itu sendiri penuh dengan dinamika, yang tampak maupun terkubur dalam pola pemikiran masyarakat. Maka dua kemungkinan akan terjadi dalam perubahan, baik secara

¹⁸⁵ Gabungan kata membentuk istilah yang menunjukkan muatan sosial, seperti fakta sosial (*social fact*), organisasi sosial (*social organization*), masalah sosial (*social problem*), dan gerak sosial (*social movement*)

gradual yang runtut maupun secara mendadak akibat transformasi sosial.

Dengan demikian tidak suatu masyarakat pun yang berhenti pada suatu titik tertentu, orang-orang desa sudah mengenal perdagangan, alat transportasi modern, bahkan dapat mengikuti berita-berita di radio, televisi dan sebagainya yang sebelumnya belum dikenal.¹⁸⁶ Perubahan masyarakat dapat terjadi pada semua aspek kehidupan sosial, baik mengenai nilai-nilai, norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan, wewenang interaksi sosial dan sebagainya.

Soejono Soekanto menjelaskan beberapa rumusan perubahan sosial diantaranya;

1. Kingsley Davis mengartikan perubahan sosial adalah sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat, misalnya

¹⁸⁶ Soejono Soekanto, *Sosiologi suatu pengantar*, (PT. Raja Grafindo Persada, 1990), h. 337

timbul pengorganisasian buruh dalam masyarakat kapitalis telah menyebabkan perubahan-perubahan organisasi ekonomi dan politik.

2. Gillin dan Gillin mengatakan perubahan sosial sebagai suatu variasi dari tata cara yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Secara singkat Samuel Koenig, mengatakan bahwa perubahan sosial menunjuk pada modifikasi modifikasi mana terjadi karena sebab-sebab intern maupun sebab ekstern.¹⁸⁷

Sedangkan Selo Soemardjan, berpendapat bahwa perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.⁷⁵ Kemudian menurut Nursid Sumaatmaja

¹⁸⁷ *Ibid*, h. 334

mengemukakan bahwa perubahan sosial dapat diartikan sebagai perubahan yang terjadi di masyarakat, yang meliputi berbagai aspek kehidupan, sebagai akibat adanya dinamika anggota masyarakat dan yang telah didukung sebagian besar anggota masyarakat, merupakan tuntutan kehidupan dalam mencari kestabilannya.¹⁸⁸ Pengertian stabil disini tidak identik dengan statis. Karena masyarakat yang stabil bukan masyarakat yang statis, masyarakat yang stabil berarti ada pula suatu dinamika yang berubah untuk menjaga keseimbangan dan masyarakat yang statis hampir tidak ada di dunia ini.¹⁸⁹

Sartono Kartodirdjo, mengatakan bahwa perubahan sosial adalah gejala yang intern dalam setiap perkembangan atau pertumbuhan (*development*). Disini teori developmentalisme menggambarkan bahwa masyarakat mengalami perubahan atau perkembangan, suatu proses analog dengan suatu proses arganis; tidak

¹⁸⁸ Selo Sumardjan, *Social Change in Yogyakarta*, Cornel University Press, t.t, h. 379

¹⁸⁹ Nursid suraatmaja, *Pengantar Studi Sosial*, (Bandung: Penerbit Alumi, 1986), h. 79

hanya ada tambahan entitas, tetapi juga meningkatkan kemampuan serta kapasitas untuk mempertahankan eksistensi, adaptasi terhadap lingkungan, serta lebih efektif mencapai tujuannya. Proses perkembangan ini tidak dengan sendirinya menunjukkan arah pertumbuhan serta tujuan. Disini berdasarkan kerangka teoritisnya, evolusioisme, fungsionalisme, positivisme, pelbagai paradigma menunjukkan bahwa masing-masing memandang arah dan tujuan perkembangan secara berbeda-beda.¹⁹⁰

Pada hakikatnya proses dalam makna sosial adalah perjalanan kehidupan suatu masyarakat yang ditunjukkan, oleh dinamikanya, baik mengikuti evolusi biologi dalam daur hidup, maupun perubahan tingkah laku dalam menghadapi situasi sosial mereka.¹⁹¹ yang dibuktikan oleh adanya gejala-gejala depersonalisasi, frustasi apati, konflik dan kesenjangan antar generasi. Apabila suatu fakta adalah kenyataan yang inheren dalam

¹⁹⁰ *Ibid*, h. 79

¹⁹¹ Sartono Kartodirdjo, *Pendidikan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama,1993), h. 162

institusi kehidupan manusia, maka sebenarnya pernyataan fakta dalam perubahan harus dilihat oleh adanya hakekat dari kehidupan itu sendiri yang mengandung gerak tertentu. Antara stabilitas dengan gerak atau dinamika sosial dan kondisi sosial itu terdapat titik-titik gerak sosial yang berulang dan tak ada akhirnya. Artinya stabilitas menyatakan tatanan sosial (*social order*) mapan yang harus ditegakan dan terhindar dari perubahan. Gerak sosial mengungkapkan tindakan-tindakan kolektif untuk mengubah *organisasi sosial*.¹⁹² atau tatanan yang ada, dan kondisi sosial tak hanya menunjukkan suatu kenyataan sosial yang ada saja tetapi juga keadaan sosial yang dicapai oleh perubahan.

¹⁹² Organisasi sosial ialah: (1) suatu tindakan yang tertata melalui aktivitas sosial yang juga terkait satu sama lainnya; (2) susunan kerja suatu masyarakat, atau proses penyusunan suatu tindakan dan hubungannya dengan suatu tujuan sosial yang diterima umum. Proses penyusunan tersebut memperhitungkan setiap penyesuaian warga masyarakat melalui proses kebebasan pilih. Pilihan dan keputusan penting untuk mewujudkan suatu masyarakat, dan menentukan relasi antar kelompok, (3) aspek kerjasama yang asasi, yang menggerakkan tingkah laku individu kepada tujuan sosial dan ekonomi tertentu. Ada dua proses penting dalam organisasi sosial yaitu; alokasi, pemberian tugas dan fungsi; serta integrasi, hubungan antar tugas dan fungsi. Garna, *op.cit*, h.20

Perubahan sosial lebih lanjut menurut Astrid, ialah perubahan masyarakat dalam arti luas, diartikan sebagai perubahan/perkembangan dalam arti positif maupun negative. Arti perubahan sosial mempunyai dua dimensi, yaitu perubahan sosial sebagai kemunduran (*regres*) dan sebagai kemajuan (*progress*). Motivasi seseorang yang disebabkan oleh kemajuan teknologi, penggunaan penemuan teknologi tersebut mengubah pendapat dan penilaian melalui falsafah hidup baru. perubahan konstruksi pola pemikiran itu berakibat pada hubungan antar satu sosial, yang menyebabkan pula terjadi ketidakseimbangan masyarakat dalam masa tertentu. Perubahan sosial akan merupakan suatu kemunduran apabila manusia tenggelam dalam persoalan-persoalan yang dihadapinya dan tidak dapat mengambil sikap atau keputusan terhadap keadaan baru; dan dalam keadaan maka terjadi frustrasi dan apatis¹⁹³ selanjutnya ia menjelaskan, perubahan sosial adalah perubahan masyarakat menjadi kemajuan masyarakat dengan suatu pola masyarakat yang sesuai bahkan dapat

¹⁹³ *Ibid*, 158

menguasai kemajuan teknologi, dan menghindari bahaya degradasi martabatnya.

Perubahan sosial adalah perubahan penting dari struktur sosial yang berupa pola-pola perilaku dan interaksi sosial, karena mencakup tentang berbagai pernyataan tentang struktur seperti norma, nilai, gejala budaya, selanjutnya perubahan sosial adalah variasi modifikasi dalam setiap aspek proses sosial, pola sosial dan bentuk sosial.

b. jenis jenis perubahan sosial

studi komparatif tentang perubahan masyarakat dapat memberikan dimensi perubahan tersebut, Kurt Lewin dan Elton Mayo tentang dinamika kelompok dan relasi manusia misalnya, sebagian besar berpengaruh pada psikologi sosial, pendidikan dan ilmu-ilmu sosial terapan, selain mendapat kritik dari beberapa sosiolog.¹⁹⁴ Lewin sebenarnya tertarik pada susunan sosial dari kelompok-kelompok masyarakat yang kecil

¹⁹⁴ Etzioni Amiratai, Eva Etzioni, *Social Change: sources, patterns, and consequences* (New York, 1973), h.366

dan tatap muka. Pendapat Lewin ini bahwa orang akan lebih enggan memodifikasi atau merubah tingkah lakunya, apabila mereka melakukan serupa dengan tingkah laku baru adalah apabila didekati secara individual, kecenderungan perubahn mereka itu manakala didekati sebagai anggota suatu kelompok. Seseorang memerlukan kesepakatan dari kelompoknya, dengan demikian akan mudah pula ia berubah jika ukuran kelompoknya juga berubah.

Studi Lewin ini merupakan kontraversi bagi studi perubahan sosial ialah tentang kelenturan relative dari kepribadian terhadap stabilitas. Kepribadian yang mendasar itu seperti umumnya anggapan para penganut freud, adalah mapan secara relative pada masa anak-orangtua. Kemudian ia bergerak dari suatu kelompok ke kelompok dalam kehidupan sosialnya, walaupun ia akan mengungkapkan kepribadiannya tetapi tidak mudah berubah. Sedangkan pandangan lainnya, menganggap bahwa keduanya antaran kepribadian dengan kehidupan sosial, berperan dan saling terkait dalam menentukan

tingkah laku seseorang atau pun memilih salah satu aspek saja yang berperan bagi tingkah lakunya.

‘Satuan sosial yang lebih besar, yang mungkin berupa organisasi kompleks, merupakan kolektifitas yang menentukan atau menghendaki seseorang berubah tingkah lakunya sesuai dengan tuntutan dan kehendak kolektivitas tersebut. Cirri umum dari organisasi kompleks adalah organisasi besar, birokratik, dikelola dari suatu pusat dengan upaya untuk memaksa disiplin tertentu terhadap suatu perangkat tujuan. *Masoen Haire* bahwa apabila suatu organisasi berkembang dan menjadi makin kompleks maka menuju pada suatu sistem saraf khusus bertujuan melakukan koordinasi serta komunikasi dalam sistem tersebut. Sama halnya dengan pertumbuhan organisasi, yang menjadi makin kompleks dan berkembang spesialisasi fungsi-fungsinya maka akan menghadapi penambahan masalah integrasi dan kemacetan komunikasi.¹⁹⁵

¹⁹⁵ *Ibid*, h. 367

Perjalanan diatas akan menuntut terjadinya perubahan sosial di masyarakat, perubahan sosial dimasyarakat pada umumnya dikenal pembagian jenis perubahan sosial yaitu;

- *Social evolution* (Evolusi sosial)
- *Social mobility* (mobilitas sosial)
- *Social revolution* (revolusi sosial)

Evolusi sosial merupakan perkembangan yang gradual, yaitu karena adanya kerjasama harmonis antara manusia dengan lingkungannya karenanya dikenal bentuk-bentuk evolusi: seperti evolusi kosmis, evolusi organis, dan evolusi mental.

Evolusi kosmis adalah taraf evolusi dalam bentuk *survival of the fittest*, yaitu perjuangan manusia untuk mempertahankan hidupnya. Dan yang dipersoalkan dalam perubahan sosial adalah perubahan mental atau mental evolution sebagai akibat dari adanya, perubahan teknologi dan perubahan kebudayaan (*culture change*). Sehingga terjadilah pengaruh teknologi terhadap kelompok-kelompok sosial sendiri dengan akibat (*social*

group evolution) yang makin kompleks, dan kebudayaan contohnya gedung gedung dan pabrik pabrik dan bangunan lainnya secara teknik.¹⁹⁶

Semua bentuk perubahan dapat berbentuk perubahan radikal maupun perubahan yang lambat, bagaimana dahsyatnya perubahan tergantung dari lingkungan dan manusianya sendiri. Dengan demikian inti dari perubahan sosial adalah:

*“Survival depends neither in their flexibility nor their suppleness but on their ability to meet both the changeless and the changing human needs.”*¹⁹⁷

Sehubungan dengan itu, sering terlupakan bahwa dalam hidup tidak semua norma berubah serentak, melainkan bahwa sesuai dengan sifat manusia selalu ada kebutuhan manusia yang tak berubah. Disamping itu terdapat beberapa perubahan yang berlangsung lebih cepat dari yang lain, juga beberapa kelompok lebih

¹⁹⁶ Astrid susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, (Bandung:Putra A. Bardin, 1999), h. 170

¹⁹⁷ Bogardus, *op.cit.*, h. 390

mudah menyesuaikan diri daripada kelompok yang lain. Sering dilupakan adanya interdependensi dan korelasi antara bagian-bagian yang berubah dan tidak berubah seperti juga antar kelompok satu dengan yang lain.

Maka sebagai akibat perubahan konflik terjadilah:

*“Where some change are made and ather needed changes are belated, group maladjustment and disorganization results.”*¹⁹⁸

Jelaslah bahwa pertentangan hanya terjadi apabila antara bagian masyarakat yang satu dan yang lain tidak terdapat perubahan yang sama cepatnya, atau bahwa penyesuaian dengan keadaan baru kurang cepat, dengan penyesuaian yang harus diadakan oleh pihak atasan maupun pemerintah. Dalam diri manusia mengenai penyesuaian terdapat dua unsure, yaitu sifat: *adptif* dan *nonadaptif*.

Perubahan dalam bidang materi lebih mudah terjadi dan karena itu juga biasanya penggunaan materi

¹⁹⁸ Astrid Susanto, *op.cit.*, h. 171

mendahului penyesuaian mental. Sebaliknya perubahan mental paling sulit terjadi, demikian pula hukum dan agama yang lebih bersifat nonadaptif. Bahaya dalam masyarakat ialah bahwa antara unsur-unsur adaptif dan nonadaptifakan terdapat suatu jurang, karena dalam keadaan ini, biasanya akan terjadi revolusi.

Menurut Begardus urutan adaptasi pada manusia ialah adaptasi termudah menuju ke yang tersukar, sebagai berikut:

1. Perubahan-teknologi
2. Pengisian waktu senggang
3. Pendidikan
4. Aktivitas dalam masyarakat
5. Suasana dalam rumah tangga
6. Agama

Maka jelas sekali bahwa perubahan teknologi selalu lebih cepat daripada perubahan budaya, yaitu karena perubahan budaya terutama merupakan perubahan mental, sedangkan perubahan teknologi tidak selalu memerlukan mental terlebih dahulu. Agar

perubahan masyarakat menjadi kemajuan masyarakat, perubahan mental perlu mendukung perkembangan masyarakat. Untuk masyarakat negara berkembang selanjutnya diketahui, bahwa walaupun terdapat predisposisi ini sukar mengadakan kemajuan.

Sorokin melihat perubahan masyarakat dari segi psikologik yaitu perubahan terjadi karena;

1. *Ideational change* (= perubahan idea)
2. *Sensational change* (= pengaruh menteri terhadap mental manusia)
3. *Idealistic change* (= perubahan ideology)

Ketiga factor tersebut mempengaruhi dan menyebabkan perkembangan lebih lanjut, bahkan dapat menentukan arah perkembangan dari perubahan masyarakat. Sebagai contoh *idea*, bersedianya orang memakai pakaian adat daerahnya sendiri, contoh *sensational*; perubahan yang diadakan orang dalam mengatur rumah, berdasarkan apa yang dilihat melalui televisi atau film dan lain-lain. Sedangkan contoh *idealistic* ialah bahwa Indonesia memproklamkan

kemerdekaan pada tahun 1945, yang bukan saja merupakan perubahan politik untuk Indonesia akan tetapi suatu *social change* atau perubahan masyarakat besar-besaran untuk seluruh masyarakat.

Jenis perubahan masyarakat yang kedua adalah gerakan sosial atau mobilitas sosial. Suatu gerakan sosial adalah suatu keinginan akan perubahan yang diorganisasi. Sebab dari gerakan sosial ialah penyesuaian diri dengan keadaan (ekologi), yaitu karena didorong oleh keinginan manusia akan hidup dalam keadaan yang lebih baik, serta pemanfaatan dari penemuan-penemuan baru. Pada umumnya gerakan sosial terbentuk apabila ada konsep yang jelas apalagi bila konsep ini mempunyai strategi yang jelas.

Suatu gerakan berakhir, apabila suatu idea (oleh pengikut-pengikutnya) dirasakan telah terwujudkan, atau bila keadaan sudah berubah kembali. Menurut Begardus mobilitas adalah :

“Not movement but change of movement... (it) brings new social contracts and hence new stimuli

which in turn call forth new responses and changes in personality."¹⁹⁹

Akibat dari mobilitas sosial adanya respon dan rangsangan baru. Bahaya dari mobilitas sosial yang berlangsung terlalu lama ialah perubahan kepribadian yang terlalu parah, ketidakstabilan dalam masyarakat dan individu, adanya lebih banyak rangsangan daripada perubahan yang nyata, yaitu karena perubahan hanya menjadi slogan atau rangsangan yang tidak diwujudkan.

Astid S. Susanto, menukil dari tulisan Sarokin, membedakan dua jenis mobilitas, yaitu; mobilitas yang mendatar dan mobilitas yang vertikal.

Mobilitas mendatar adaiah "*process of making changes on the same status.*" Sedangkan mobilitas vertikal ialah "*process of changing from one status to another.*"

Mobilitas banyak terjadi bila terdapat hambatan-hambatan dalam perkembangan atau revolusi mengalami kegagalan, hal mana disebabkan oleh tindakan-tindakan

¹⁹⁹Bogardus, *op.cit.*, h. 372

dalam bidang otokrasi, adanya terlalu banyak kepentingan kelompok/pribadi, adanya kelompok-kelompok yang hendak mempertahankan status ekonomi, keuangan atau politiknya. Sebab itu pulalah, hubungan antara mobilitas dengan rvolusi sangat erat kaitannya.

Sedangkan jenis perubahan yang bersifat revolusi pada umumnya didahului oleh adanya ketidakpuasan dari golongan-golongan tertentu, hal ini seringkali didahului oleh adanya atau tersebarnya suatu idea baru. Dalam pentas sejarah saat pecahnya suatu revolusi ditandai oleh adanya lerror atau coup d'etat. Pada kenyataannya tidak semua revolusi berhasil, bahkan biasanya suatu revolusi berakhir dalam perpecahan antarakekuatan-kekuatan revolusi itu sendiri, karena adanya iri hati satu sama lain, atau tidak adanya konsep yang jelas mengenai pembangunan setelah revolusi.

Dilihat dari segi sosialnya, suatu revolusi pecah apabila dalam suatu masyarakat faktor disorganisasi lebih besar daripada faktor reorganisasi atau bila faktor-faktor adaptif lebih kecil danpada faktor nonadaptif.

Pada umumnya revolusi sosial pecah, apabila terdapat suatu kegagalan dalam evolusi. Tahap revolusi dicapai karena tarap kebutuhan akan perubahan (dalam bidang salah kelola atau politik), harapan-harapan akan berubah (menuju ke arah yang lebih baik) dirasakan tidak diwujudkan. Saat revolusi akhinya pecah karena pada pihak masyarakat ada dugaan akan kelemahan pada pihak pimpinan.²⁰⁰

Kadar prubahan sosial sanatliah berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyrakat yang lainnya, dan antaara kurun masa yang satu dengan kurun masa yang lainnya. Perubahan geografis dapat melahirkan perubahan sosial besar. Migrasi ke suatu lingkungan baru sangat sering menimbulkan perubahan dalam segi kehidupan sosial. Perubahan dalam segi jumlah dan komposisi penduduk sering menimbulkan perubahan sosial. Karena keterpencilan (isolation) menghalangi perubahan dan kontak lintas budaya (cross-cultural contracts) mendorong lahirnya perubahan., maka tentu saja kelompok-kelompok yang secara fisik dan secara

²⁰⁰ Astrid. S. Susanto, op.cit. hal.174

sosial terpencil akan mengalami perubahan yang lebih sedikit.

Struktur masyarakat juga mempengaruhi perubahan. Masyarakat tradisional yang sangat konformis atau masyarakat yang kebudayaannya sangat terintegrasi lebih mudah mengalami perubahan daripada masyarakat yang individualistik yang permisif dan berkebudayaan kurang terintegrasi. Sikap dan nilai-nilai masyarakat amat menunjang atau menghambat perubahan. Kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat mempengaruhi tingkat kecepatan dan arah perubahan. Disamping itu, dasar budaya (culture base) memungkinkan adanya dasar bagi pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menciptakan unsur-unsur budaya baru, seiring dengan berkembangnya dasar budaya, kemungkinan lahirnya kombinasi ciptaan baru pun bertambah berdasarkan prinsip eksponensial. Disamping itu perkembangan pengetahuan di suatu bidang seringkali dapat berguna pada bidang lain.

Konsekuensi perubahan tidak akan pernah berakhir. Penemuan dan invensi dan juga unsur-unsur

budaya yang dimasukan ke dlam masyarakat seringkali menimbulkan reaksi perubahan berantai yang merusak banyak aspek kebudayaan. Betapapun berbedanya, berkaitannya, dan saling tergantungnya aspek-aspek kebudayaan, aspek-aspek tersebut tidaklah berubah dalam kadar yang sama.

Kesenjangan waktu antara saat penerimaan suatu unsur budaya baru dengan saat sempurnanya proses penyesuaian disebut kesenjangan budaya (cultural lag). Semua masarakat yang berubah secara cepat memiliki banyak kesenjangan budaya dan agak kacau (disorganized). Dalam masyarakat yang kacau para anggota masyarakat, yang mengalami hambatan dalam menemukan sistem perilaku yang cocok, akhinya ikut menjadi pribadi yang rapuh.. Manakala mereka telah putus harapan untuk menemukan cara hidup yang baik dan telah berhenti berupaya, maka mereka dikatakan telah kehilangan semangat hidup {demoralized). Meskipun perubahan membawa kepahitan, namun menolak terhadap perubahan bisa saja mengakibatkan

kepahitan yang lebih parah, karena perubahan tidak terlepas dari keuntungan dan kerugian.

3. Titik Temu Dakwah dan Perubahan Sosial

Eksistensi dakwah Islam senantiasa bersentuhan dan bergelut dengan realitas yang mengitarinya. Dalam perspektif histories, pergumulan dakwah Islam dengan realitas sosio-kultural menjumpai dua kemungkinan. Pertama, dakwah Islam mampu memberikan output (hasil, pengaruh) terhadap lingkungan dalam arti memberi dasar filosofi, arah, dorongan dan pedoman perubahan masyarakat sampai terbentuknya realitas sosial baru. Kedua, dakwah Islam dipengaruhi oleh perubahan masyarakat dalam arti eksistensi, corak dan arahnya. Ini berarti bahwa aktualisasi dakwah ditentukan oleh sistem sosio-kultural. Dalam kemungkinan yang kedua ini, sistem dakwah dapat bersifat statis atau ada dinamika dengan kadar yang hampir tidak berarti bagi perubahan sosio-kultural.²⁰¹

²⁰¹Amrullah Ahmad (Ed.), *Dakwah Islam dan Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: PLP2M, 1983), h. 2

Dari ringkasan sejarah turunnya Al-Quran, menurut Quraish Shihab tampak bahwa ayat-ayat Al-Quran sejalan dengan pertimbangan dakwah turun sedikit demi sedikit bergantung pada kebutuhan dan hajat, hingga manakala dakwah telah menyeluruh, orang-orang berbondong-bondong memeluk agama Islam. Ketika itu berakhirlah turunnya ayat-ayat Al-Quran dan datang pulalah penegasan dari Allah SWT., “H ari ini telah Kusempurnakan agamamu dan telah Kucukupkan nikmat untukmu serta telah Kuridhai Islam sebagai agamamu ”.²⁰² Hal itu menunjukkan bahwa ayat-ayat Al-Quran disesuaikan dengan keadaan masyarakat saat itu. Sejarah yang diungkapkan adalah sejarah bangsa-bangsa yang hidup di sekitar jazirah Arab. Peristiwa peristiwa yang dibawakan adalah peristiwa-peristiwa mereka. adat-istiadat dan ciri-ciri masyarakat yang dikecam adalah yang timbul dan yang terdapat dalam masyarakat tersebut.

Tetapi ini bukan berarti bahwa ajaran-ajaran Al-Quran hanya dapat diterapkan dalam masyarakat yang

²⁰²Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 3

ditemuinya atau pada waktu itu saja. Karena yang demikian itu hanya untuk dijadikan argumentasi dakwah. Sejarah umat-umat diungkapkan sebagai pelajaran/peringatan bagaimana perlakuan Tuhan terhadap orang-orang yang mengikuti jejak-jejak mereka.

Sebagai suatu perbandingan, Al-Quran dapat diumpamakan dengan seorang yang dalam menanamkan idenya tidak dapat melepaskan diri dari keadaan, situasi atau kondisi masyarakat yang merupakan obyek dakwah. Tentu saja metode yang digunakan harus sesuai dengan dengan keadaan, perkembangan dari tingkat kecerdasan obyek tersebut. Demikian pula dalam menanamkan idenya, cita-cita itu tidak hanya sampai pada batas suatu masyarakat dan masa tertentu; tetapi masih mengharapkan agar idenya berkembang pada masatempat sepanjang masa.²⁰³

Untuk menerapkan idenya itu, seorang juru dakwah tidak boleh bosan dan putus asa dalam

²⁰³Bogardus, *op.cit.*, h. 39

merealisasikan cita-citanya, ia harus mampu menyatakan dan mengulangi usahanya walaupun dengan cara yang berbeda-beda. Demikian pula ayat- ayat Al-Quran yang mengulangi beberapa kali satu persoalan. Tetapi untuk menghindari terjadinya perasaan bosan, susunan kata-katanya—oleh Allah SWT—diubah dan dihiasi sehingga menarik pendengarnya. Bukankah argumentasi-argumentasi Al-Quran mengenai sosl-soal yang dipaparkan dapat dipergunakan dimana, kapan, dan bagi siapa saja, serta dalam situasi dan kondisi apapun? Hal ini adaiiah tiada alasan untuk mendakwahkan bahwa ajaran-ajaran Al-Quran itu khusus untuk masyarakat pada masa diturunkannya saja.

Sepanjang sejarah Indonesia, ketika dakwah Islam mulai menampakan .wajahnya hingga terbentuknya kesatuan sosio-kultural yang bercorak Islam di Nusantara, ternyata telah dapat menciptakan realitas baru walaupun tidak mendasar dan menyeluruh. Karena hal itu berjalan bersama dengan sisa ajaran Animisme-Dimamisme dan Hindu yang sebegitu jauh telah melekat pada masyarakat Nusantara. Dalam fase ini

dakwah Islam dapat dikatakan memberikan pengaruh (output) terhadap lingkungan.

Perubahan sosial di Indonesia terus berlangsung sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Pada abad XVII hingga pertengahan abad XX, secara kultural masyarakat Barat modern menjadi *agent of change* baik secara politis maupun kultural, Belanda menentukan corak dan arah perubahan sosial di Indonesia.

Bersamaan dengan itu, Kristen mulai menampkan kegiatannya dengan memberikan pelayanan konkrit kepada masyarakat. Sampai tahap ini masalah yang dihadapi dakwah Islam semakin kompleks dan sebagai suatu sistem dilingkungi pelbagai masalah sosial, keagamaan, politik, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya.²⁰⁴

Dengan munculnya fenomena sosio-kultural itu, lahirlah kesadaran baru dikalangan pendukung dakwah secara silih berganti, kesadarn ini ditandai dengan berdirinya lembaga-lembaga dakwah Islam seperti

²⁰⁴ Amrullah Ahmad, *op.cit.*, h. 3

Syarikat Islam dan Muhammadiyah. Meskipun secara detail kesadaran itu memiliki latarbelakang yang berbeda-beda, tetapi ada “benang hijau” yang mempertemukan perbedaan itu-yaitu kesadaran *transcendental* untuk menanyakan kembali “apa yang seharusnya terjadi dalam kenyataan sosial menurut ajaran Islam” dengan “yang senyatanya terjadi dalam realitas” yang harus diubah dalam sistem dakwah.²⁰⁵

Dalam kerangka yang demikian maka dakwah Islam berada dalam proses ‘*transendensi dan imanensi*’ yang diwujudkan dalam upaya mencari model yang mampu menggambarkan kenyataan secara jelas dan memudahkan dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Dalam tahap perjalanan dakwah Islam seperti ini, tampaknya lembaga dakwah atau pun da’i terus berupaya mencari orientasi dalam menentukan pola apa yang tepat digunakan, sembari perubahan sosio-kultural yang digerakan ilmu dan teknologi terus berlangsung.

²⁰⁵ *Ibid.* hal 3

Dampak perubahan menyentuh langsung lembaga/organisasi dakwah yang ditandai dengan ketidakmampuan melihat masalah secara jelas, tema dakwah yang lama mulai kehilangan relevansinya dan model dakwah yang ada tidak dapat untuk melihat dan memecahkan masalah yang sudah semakin rumit. Sedangkan pembangunan nasional yang merupakan upaya perubahan yang direncanakan, khusus dalam bidang agama belum memberikan alternatif pembangunan sistem dakwah agar dapat berfungsi secara efektif dan efisien.

Walaupun pada hakikatnya sejak Islam hadir sudah ada pemikiran yang sistematis tentang apa dan bagaimana seharusnya jalan yang ditempuh dalam mewujudkan nilai-nilai Islam dalam kenyataan sosio-kultural. Ini mengandung makna adanya dua kegiatan yang saling berhubungan dan bergantung antara pemikiran tentang dakwah (teori) dan proses pelebagaan nilai-nilai Islam dalam kenyataan sosial yang dilakukan lembaga-lembaga dakwah (dalam realitas praktik dakwah).

Berbicara tentang fenomena keagamaan bukanlah sederhana, karena sifatnya yang multi fasial. Sebagai suatu sistem, konsep religi dapat dipilah-pilah kedalam beberapa komponen seperti (1) emosi keagamaan; (2) sistem keyakinan; (3) sistem ritus dan upacara; (4) peralatan ritus dan upacara; (5) umat agama. Komponen-komponen ini dapat dirangkum dalam pokok-pokok pikiran, sebagai berikut: (1) agama sebagai doktrin, (2) agama sebagai bentuk dinamika serta struktur masyarakat; (3) sebagai sikap masyarakat terhadap agama yang dianut.

Agama sebagai pembentuk dinamika, struktur serta sikap masyarakat dapat dikemukakan sebagai dasar mengapa dalam batas tertentu agama merupakan suatu fenomena cultural. Dikatakan demikian, karena persepsi manusia ikut memainkan peran dalam melihat apa sesungguhnya agama itu; orang berupayan mencari relevansi agama dengan kebutuhan zaman dan masyarakat yang senantiasa berubah.²⁰⁶

²⁰⁶Dick Hartoko, *Tantangan Kemanusiaan Universal*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), h. 184

Dalam setiap agama diajarkan nilai-nilai yang melahirkan prosedur yang mengatur tingkah laku para penganutnya, walaupun pada dasarnya sumber agama-agama itu adalah nilai-nilai transendental. Keyakinan religius yang oleh Berger dikatakan membentuk masyarakat kognitif, memberi agama kemungkinan menjadi pedoman pemberi arah untuk pola tingkah laku dan corak sosial.

Negara Republik Indonesia sedang berada dalam pembangunan. Salah satu peran yang dimainkan agama dalam pembangunan adalah berpartisipasi melakukan transformasi sosial budaya ke arah masyarakat yang lebih dewasa, lebih mampu mengangkat derajat kemanusiaan para warganya. Dalam transformasi sosial itu tercakup transformasi diri yang dapat sekaligus disebut transformasi budaya karena menyangkut perubahan-perubahan sikap dan tingkah laku. Dalam perjalanan menuju pembangunan dan modernisasi di Indonesia sangat disadari perlu adanya campurtangan agama dan agamawan, karena adanya asumsi bahwa, terjalin relasi yang erat antara perkembangan sosial budaya yang

majemuk di Indonesia dengan sejarah keagamaan dahulu, kini, dan masa depan.

Agama diharapkan dapat membangun spiritualitas yang memberi kekuatan dan pengarahan dalam memecahkan persoalan, mengatasi ketidakadilan, penindasan, kebodohan, kemiskinan dan penyalahgunaan teknologi.

Di era perkembangan dewasa ini, tampaknya pandangan masyarakat terhadap dakwah sudah mengalami pergeseran, perubahan dan perkembangan, sebab pada waktu yang lalu dakwah sangat berkonotasi dengan atau diartikan secara praktis sama dengan tabligh, yang dipahami sebagai kegiatan menyampaikan ajaran Islam secara lisan, seperti halnya yang dilakukan orang dalam ceramah-ceramah, kemudian setelah berkembang alat-alat komunikasi, maka penyampaian ajaran Islam dengan tulisan termasuk sudah menjadi kebiasaan sehari-hari, yang menandakan bahwa pengertian masyarakat tentang dakwah telah berkembang jauh dari pengertian tradisional. Maka kita kenal dengan

dakwah bil qalam sebagai bukti perkembangan dari dakwah bil lisan sebagai bentuk dakwah yang sederhana.

Dakwah pada umumnya berkisar kepada cara, teknik, dan strategi dakwah. Perubahan bentuk-bentuk dakwah memang merupakan upaya adaptasi terhadap lingkungan dakwah. Langkah adaptasi timbul karena ada asumsi tentang adanya perubahan sosial. Pada umumnya da'i atau mubaligh itu sendiri kurang mendalami persoalan-persoalan yang terjadi dimasyarakat, dan kurang ada analisis tentang perubahan-perubahan kemasyarakatan. Sudah tentu ada sekelompok cendekiawan yang melakukan analisis sosial, tetapi komunikasi antara keduanya terasa masih sangat kurang sehingga kegiatan dakwah pada umumnya sering tidak didasarkan pada analisis-analisis tentang perspektif perubahan sosial.²⁰⁷

Dasawarsa tahun 1960-an terjadi perkembangan baru dalam pemikiran tentang dakwah, dari hasil simposium dakwah yang diselenggarakan oleh HMI

²⁰⁷ M. Dawam Raharjo, *Intelektual Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa*, (Bandung: Mizan, 1996), h.158

dengan Akademi Metafisika, Surabaya, 23 Pebruari 1962, dengan menampilkan KH. Muhammad Zaini (tokoh NU Jatim), dengan judul “Hari Depan Islam dan Kaum Muslimin Terletak pada Dakwah Islamiyah”, dan ini amat menggugah Buya Hamka, sehingga ia menulis Da 'watul Islam, yang dimuat dalam Gema Islam (No. 4 dan 5 Th. I 1962).Tulisan ini mengajak merenungkan tentang dakwah, kemudian direspon oleh Rosihan Anwar, kemudian mengalir respon-respon dari pemikir yang lainnya yang membahas persoalan dakwah dari berbagai segi. Sehingga mulailah dakwah diartikan tidak hanya secara sempit akan tetapi dakwah adalah qaulun wa amalun yaitu dengan kata-kata dan perbuatan.

Tulisan yang mengalir membangkitakan kegiatan berfikir di kalangan cendikiawan muslim, salah satunya adalah Awan (pengusaha) yang membentuk Perguruan Tinggi Dakwah Islam (PTDI), dari sini keluarlah sebuah konsep bahwa dakwah sebuah kegiatan yang “membawa masyarakat dari satu kondisi ke kondisi lain yang lebih baik”. Namun pada waktu itu belum tampak adanya kegiatan kongkrit di lapangan kecuali mendirikan

pesantren di Nagrek, Jawa Barat. Hal kongkrit yang dilakukan waktu itu adalah menyusun kurikulum pendidikan dakwah yang memasukan unsur-unsur sosiologi dan pendidikan masyarakat dan menyiarkannya; lewat radio PTDI di berbagai tempat, secara kongkrit di lapangan memperoleh bentuknya pada zaman Orde Baru.

Selanjutnya kegiatan intelektual muslim dalam dasawarsa tahun 1970-an secara langsung atau tidak berakar dari pemikiran yang sudah dirintis pada tahun 1960-an. Tetapi baru pada dasawarsa tahun 80-an, dakwah yang dimanifestasikan dalam bentuk kegiatan pembangunan masyarakat beroleh sebutan dakwah bil-hal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Dari pengertian itu, dakwah dapat meliputi segala bentuk kegiatan, termasuk kegiatan pendidikan kemasyarakatan dan pembangunan. Akan tetapi tidak setiap pembangunan adalah dakwah apabila kegiatan itu tidak didasarkan pada filosofi dakwah, yaitu membawa masyarakat dari kekufuran ke keimanan. Filosofi ini didasarkan pada hadits Nabi bahwa “kefakiran itu dapat

membawa kekufuran”. Dalam keadaan miskin masyarakat dapat membawa kekufuran terhadap Tuhan. Karena itu, untuk menghindari kekufuran, kemiskinan harus dilenyapkan. Pembangunan dan pengembangan ekonomi sosial masyarakat adalah suatu strategi untuk melenyapkan kemiskinan, setidaknya dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, oleh karena itu ini semua dapat mengandung nilai dakwah.

Pikiran itu merupakan refleksi terhadap situasi dan keadaan pada tahun 60-an yang ditandai kecenderungan sebagian masyarakat terhadap Marxisme yang kufur. Hadits Nabi itu memberikan inspirasi bahwa, “kesadaran” masyarakat, seperti yang dicerminkan oleh kecenderungan Marxisme, sebenarnya berasal dari, dan dibentuk oleh, kondisi masyarakat pada waktu itu yang diliputi oleh kemiskinan. Oleh karena itu tugas dakwah adalah mengubah kesadaran masyarakat dengan mengubah kondisi yang menjadi sumbernya.

Sehingga timbul pertanyaan, kemana masyarakat akan diubah melalui dakwah, atau bagaimana perspektif

perubahan sosial yang sesuai dengan filosofi dakwah? siapa yang menentukan dan merumuskan perspektif itu? Pada tahun 60-an ada yang sangat populer yang sering dikutip oleh Bung Kamo, yaitu yang tercantum dalam surat al-Ra'du ayat 11: Artinya, “sesungguhnya Allah tidak akan mengubah kondisi suatu kaum (kelompok masyarakat, bangsa), kecuali kaum itu sendiri mengubah apa-apa yang terdapat pada tubuh-tubuhnya sendiri. Yang intinya adalah bahwa pelaku perubahan sosial adalah suatu umat atau masyarakat secara keseluruhan.

Simposium dakwah di Surabaya tahun 1962 melahirkan definisi dakwah baru dan disempumakan oleh PTDI, serta kemudian diberi nama oleh MUI, yang pada intinya mengacu kepada teori perubahan sosial. Karena teori perubahan sosial itu sebenarnya mengasumsikan terjadinya progress atau “kemajuan” dalam masyarakat. Dan berbicara mengenai kemajuan, tidak dapat dihindarkan pertanyaan tentang apa itu yang dimaksud sebagai “kemajuan?”. Ada dua interpretasi, pertama; kemajuan dalam arti bahwa masyarakat berjalan

maju dari satu tahap ke tahap lain tanpa penilaian bahwa tahap yang lebih lanjut itu lebih baik dari tahap sebelumnya, karena tahap itu hanyalah merupakan hasil perubahan bentuk saja. Kedua, maju dalam arti bahwa tahap berikutnya lebih baik (isi atau sifatnya) dari sebelumnya. Perubahan dari satu tahap ke tahap lainnya itu tercakup dalam teori evolusi.

Dewasa ini bahwa dakwah Islam dikalangan lapisan bawah sudah lebih berkembang, sebagaimana tampak dari kegiatan dakwah b i!-hal, walaupun masih ada pada tahap yang sangat awai. Dilain pihak timbul kegiatan barau dalam dakwah yang tertuju kepada golongan menengah ke atas, terutama dikalangan intelektual. Hal ini menunjukkan bahwa semakin semaraknya kehidupan keagamaan di berbagai lingkungan baik di lapisan bawah maupun birokrasi ini menunjukan adanya perubahan dan kemajuan. Sebagai indikatornya adalah meningkatnya jumlah masjid dan tempat peribadatan dilingkungan kantor-kantor yang diikuti dengan pelaksanaan ibadah shalat secara terbuka tanpa ketakutan, meningkatnya jumlah pejabat yang

menjalankan jemaah haji, dan juga berkembangnya pengajian-pengajian dan peringatan hari besar Islam. Ini merupakan sebagian hasil dakwah islamiyah yang terjadi dimasyarakat, dan dakwah melahirkan kemajuan, sama halnya dengan teori perubahan sosial adalah mendorong adanya kemajuan di masyarakat.

Kemudian konsep dakwah Islam pada masa sekarang sudah menyadari konteks perubahan sosial tempat berlangsungnya dakwah, kesadaran itu diwujudkan dengan upaya untuk melakukan penafsiran kembali Qur'an Sunah secara kontekstual,serta aktualisasi warisan intelktual dan kebudayaan Islam sesuai dengan tuntutan masyarakat yang sedang berubah cepat. Dengan adanya bdakwah bil-hal yaitu dakawah yang menekankan pada perubahan dan perbaikan kondisi material masyarakat.Jadai jelas antara dakwah dan perubahan sosial tejadi keterkaitan, yaitu sama-sama menekankan perubahan dan terjadi kemajuan dimasyarakat dalam aspek kehidupannya, dari mulai idea masyarakat sampai pada pemanfaatan dari hasil kemajuan tersebut.

D. Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sebagai Saiah satu Institusi Sosial- Keagamaan di Indonesia.

Institusi sosial-keagamaan di Indonesia tidak hanya majelis ulama Indonesia akan tetapi banyak organisasi-organisasi Islam yang bergerak di bidang sosial- keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Islam (Persis), Muhammadiyah dan organisasi-organisasi lainnya. Dan tampaknya hampir semua institusi keagamaan , memiliki program atau bidang penekanan pada dakwah Islamiyah yang tertuang dalam aturan main kelembagaannya, oleh karena MUI hanya salah satu organisasi kemasyarakatan dan keagamaan di Indonesia yang memiliki struktur kepengurusan dan operasional di lapangan sampai pada tingkat dasar (samapai keluraha/desa).

Maka dalam tulisan ini hanya akan dipaparkan, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Majelis Ulama Indonesisa (MUI), untuk lebih memahami secara benar tentang ke-Majelis ulamaan dalam keberadaannya.

1. Sejarah Singkat Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Salah satu cara pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan administrasi Islam ialah dengan cara mendirikan Majelis Ulama. Dimulai dari sejak Soekarno, Majelis Ulama mulanya didirikan di berbagai daerah, termasuk Jakarta. Memang ulama masih berpengaruh di daerah-daerah, nasihat mereka dicari. Suatu program pemerintah, apalagi yang berkaitan dengan agama, hanya bisa sukses bila disokong oleh ulama. Oleh karena itu perlu terjalin kerjasama, kalau mungkin didukung, para ulama untuk melaksanakan program dan kebijakan pemerintah.²⁰⁸ Berdasarkan fakta sejarah bahwa, pendirian Majelis Ulama sejak tahun 1958, dimana Majelis Ulama Jawa Barat yang pertama kali didirikan tanggal 12 Juli 1958 karena keperluan keamanan. Ketika itu gerakan Darul Islam merupakan ancaman langsung terhadap pemerintah, majelis tersebut diketuai secara *ex-officio* oleh panglima militer daerah memperlihatkan maksud pendirian majelis. Mulanya melayani keperluan

²⁰⁸ Deliar Noer, *Administrasi Islam Di Indonesia*, Yayasan Risalah, (Jakarta: Rajawali, 1982) h. 125

keamanan, dan ini merupakan tanggungjawab militer. Ia memerintahkan agar majelis sejenis didirikan di wi layah-wi layah sampai ke tingkat kecamatan dan diketuai oleh komandan militer. Setelah reda keamanan tahun 1961, mulailah soal-soal dakwah, pendidikan dan sebagainya menjadi perhatian majelis.

Dalam bulan September 1967 Majelis masih membicarakan akibat-akibat masalah GESTAPU, tapi dalam tahun berikutnya memberi perhatian yang besar pada soal dakwah dengan menyelenggarakan suatu seminar tentang bagaimana supaya ajaran Islam sampai kepada tiap orang. Seminar mengkaji apa yang dimaksud dengan dakwah, apa fungsinya, dan bagaimana supaya dakwah berhasil. Disamping itu soal-soal kaderisasi, terutama bagaimana membina cara yang efektif dalam hubungan ini, juga mendapat tempat dalam seminar. Bulan Juni 1969 Majelis membicarakan soal pendidikan Islam dalam suatu konferensi yang sengaja diadakan

untuk itu dalam rangka usaha memajukan pendidikan di Jawa Barat.²⁰⁹

Kemudian Majelis Ulama di propinsi lain didirikan jauh dari pendirian di Jawa Barat, yaitu segera setelah majelis pusat berdiri bulan Oktober 1962 sesuai dengan keinginan atau instruksi pemerintah pusat. Menurut penjelasan pemerintah, Majelis :

- 1) Adalah massa organisasi masyarakat Muslimin dalam rangka Demokrasi Terpimpin.
- 2) Ikut mengambil bagian di dalam penyelesaian revolusi dan pembangunan semesta berencana sesuai dengan karya keagamaan dan keulamaan (bidang mental'rohani/agama)
- 3) Bertujuan selain menjadi penghubung masyarakat Islam dengan pemerintah juga sebagai tempat mengkoordinir segala usaha-usaha ummat Islam dalam bidang mental/rohani/agama, dan tempat menampung segala persoalan-persoalan ummat Islam.

²⁰⁹*Ibid.*,h. 126

Untuk mencapai tujuannya, majelis melakukan beberapa usaha sebagai berikut:

1. Mengadakan hubungan dan menyampaikan nasihat-nasihat, usul-usul pertimbangan kepada pemerintah/ penguasa setempat mengenai hal yang diperlukan
2. Menyiapkan terlaksananya kehidupan keagamaan dalam masyarakat terutama terlaksananya pendidikan dan pengajaran agama di sekolah-sekolah
3. Membantu usaha kesempurnaan bangunan-bangunan pondok-pondok pesantren, tempat-tempat ibadah dan seterusnya
4. Menjadi peng-ishlah, pendamai, untuk menjadi persatuan.²¹⁰

Dorongan mendirikan Majelis pusat ini, tampaknya agar pemerintah dapat mengadakan pengawasan terhadap segala kegiatan masyarakat yang dianggap penting di ikuti. Pejabat majelis pusat ini sebagian besar dari pejabat-pejabat pemerintah serta

²¹⁰Keputusan MUI 1987

tokoh-tokoh organisasi Islam atau organisasi yang mendukung Soekarno tanpa reserve. Ketuanya Kiayi Fatah Yasin, Menteri Perhubungan Alim Ulama, Sekretaris Muchlas Rowi, Kepala Bagian rohani Angkatan Darat. Pengurus lainnya; KH. Wahab Hasbullah dan K.H. Idham Cholid (Menteri Koordinator dan Wakil Ketua MPRS).

Peranan Majelis Ulama Pusat ketika itu tidak penting, tugasnya hanya mencari dukungan buat pemerintah dari pihak ulama. Dalam rapat para ulama se-Indonesia di Jakarta tanggal 26-28 Mei 1964 umpamanya, rapat memutuskan untuk mengusulkan agar diberikan “gelar ilmiah” kepada Presiden Soekarno sebagai simbol terimakasih orang-orang Islam kepadanya. Mereka juga mengemukakan pendapat bahwa perjuangan mengganyang Malaysia melalui kebijaksanaan konfrontasi merupakan fardhu ‘ain, kewajiban yang diletakan pada setiap individu Muslim." Majelis Ulama pusat tidak memberikan bimbingan apapun kepada majelis di daerah, hal ini terungkap dari A.K. Basuni, Sekretaris Majelis Ulama Jawa Barat,

dalam konfrensi pendidikan Islam di Bandung bulan juni 1969, menyebut hal demikian, hal ini berlaku baik pada masa Menteri Perhubungan Ulama K.H. Fatah Yasin ataupun menteri muda Penghubung Ulama K.H. Marzuki dari Muhammadiyah

Selanjutnya Majelis Ulama Sumatera Barat berdiri tahun 1966 ketuanya Datuk Palimo Kajo, bekas pemimpin Masyumi yang pernah menjadi duta besar di Irak. Pengakuan pemerintah daerah terhadap ke-ulamaannya mencerminkan bahwa pada dasarnya Masyumi, walau telah lenyap dan para pemimpinnya umumnya telah meninggalkan Sumatera Barat masih berpengaruh. Majelis mempersoalkan rencana pembangunan Gereja Baptis di Bukit Tinggi dan sekaligus menolak dengan bukti tidak ada seorangpun yang menjual tanahnya, akan tetapi Rumah Sakit itu berdiri pula tahun 1975 dan ketegangan pun terjadi, dan Majelis melakukan usaha keras dan akhirnya tahun 1980 Rumah Sakit itu diambil oleh pihak pemerintah.²¹¹

²¹¹ Pidato A.K. Basuni pada konfrensi pendidikan Islam tersebut dalam rangka kekecewaan ini pidatonya yang diucapkan pada masa Orde Baru, yaitu masa yang berlainan dari masa sebelumnya,

Dalam hal pembangunan gereja Majelis Ulama menuntut agar diatur sehingga tidak mengganggu perasaan orang Islam, ini terjadi di daerah Pasaman, daerah transmigran dari Jawa, transmigran mulanya mengaku beragama Islam, setelah Kristen masuk ternyata semuanya beragama Kristen. Segala usaha penekanan Majelis Ulama Sumbar ini didukung oleh Majelis Ulama Pusat yang berdirinya tahun 1975 yang menjadi ketua pertama adalah Prof. Dr. Hamka (almarhum).

Kemudian Majelis Ulama Aceh berdiri tahun 1967 yang diketuai oleh Daud Beureuh, ulama terkenal yang memberontak tahun 1953. Dan umumnya semua kabupaten di Aceh diketuai oleh Ulama, berbeda dengan di Jawa Barat yang diketuai oleh komandan militer. Akan tetapi setelah berdiri Majelis Ulama tahun 1975 yang mendasar Majelis Ulama pusat yang diketuai oleh Hamka semua pimpinan majelis daerah pun terdiri dari para ulama.

tetapi mencerminkan keadaan yang berlaku sebelumnya. Dalam Deliar Noer, *Ibid.*, h. 129

Memang tampaknya kedudukan Majelis Ulama Aceh lebih kuat dibanding dengan kedudukan majelis Ulama di daerah lain, hal ini terbukti dalam keputusan Gubernur Aceh.²¹² Melihat perkembangan dan kegiatan serta perhatian Majelis Ulama diberbagai daerah di atas, dapat disederhanakan bahwa Majelis Ulama tidak mempunyai pegangan dan cara kerja yang sama antara satu daerah dengan daerah yang lainnya, sekurang-kurangnya samapai tahun 1975 ketika Majelis Ulama versi baru dibentuk. Segalanya terserah pada daerah bersangkutan, sehingga terjadilah kongres ulama di jakarta pada tahun 1975 yang merupakan babak baru perkembanganmajelis.

Majelis Ulama Indonesia yang berdiri pada tanggal 17 Rajab 395 Hijriah bertepatan dengan tanggal 26-26 Juli 1975 Miladiyah adaiah rahmat Allah kepada bangsa Indonesia yang patut disyukuri. Majelis Ulama Indonesia lahir ke pentas sejarah ketika bangsa Indonesia

²¹² Menurut keputusan Gubernur Aceh no 038/1968, majelis Ulama Aceh mempunyai tugas : 1) bertindak sebagai badan penasihat untuk pemerintah daerah dalam masalah agama dan sosial; 2) bertindak sebagai badan dakwah pemerintah daerah dalam soal agama, dan, 3) mempersatukan umat Islam

tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah selama tiga puluh tahun sejak kemerdekaan energi bangsa terserap pada perjuangan politik baik didalam negeri maupun di dalam forum Internasional sehingga kurang mempunyai kesempatan untuk membangun menjadi bangsa yang maju, dan berakhlak mulia.

Ulama Indonesia menyadari dirinya sebagai pewaris tugas para nabi (warasatu! anbiya) pembawa Risalah Uahiyah dan pelanjut misi yang dibawa Rasulullah Saw. Mereka terpanggil bersama-sama zuama dan cendikiawan muslim untuk memberikan kesaksian akan peran kesejahteraan yang telah mereka berikan pada masa penjajahan dan perjuangan kemerdekaan serta berperan aktif dalam membangun masyarakat dan mensukseskan pembangunan melalui berbagai potensi yang mereka miliki dalam wadah Majelis Ulama Indonesia. Ikhtiar-ikhtiar kebajikan yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia senantiasa ditunjukkan bagi kemajuan bangsa dan negara dimasa yang akan datang.

Para ulama, zuama dan cendikiawan muslim menyadari bahwa terdapat hubungan timbal balik yang

saling memerlukan antara Islam dan negara Indonesia. Islam memerlukan bangsa Indonesia sebagai wahana mewujudkan nilai-nilai universal Islam seperti keadilan, kemanusiaan dan perdamaian, sedangkan negara Indonesia memerlukan Islam sebagai landasan bagi pembangunan masyarakat yang maju dan berakhlak. Oleh karena itu, keberadaan organisasi para ulama, zuama dan cendikiawan muslim adalah suatu konsekuensi logis dan prasyarat bagi perkembangannya hubungan yang harmonis antara berbagai potensi umat Islam untuk kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia.

Karena umat Islam bagian terbesar dari bangsa Indonesia, maka wajar bila umat Islam mempunyai peran dan tanggungjawab terbesar pula bagi kemajuan dan kejayaan Indonesia dimasa depan. Namun, adalah satu hal yang tidak boleh dinafikan bahwa umat Islam masih menghadapi masalah internal dalam berbagai aspek kehidupannya, baik sosial, pendidikan, keehatan, kependudukan, ekonomi dan politik.

Di sisi lain, umat Islam mengalali tantangan global yang sangat berat. Antara lain, dominasi barat

dengan idiologi liberalisme kapitalisme yang berpangkal pada pada sekulerisme denga sistem politik dan sistem ekonomi yang sering dipaksakan berlaku di negrei-negeri lain, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang daatmenggoyahkan batas etika dan moral, serta budaya global yang didominasi barat dan bercirikan pendewaan diri, pendewaan kebendaan, dan pendewaan nafsu sahwaliyah yang potensial melunturkan asfek religiusitas masyarakat serta meremehkan peran agama dalam kehidupan umat manusia

Lebih dari pda iu, kemajemukan dan keragaman umat Islam dalam alam pemikiran kagamaan, organisasi sosial, dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik selain merupakan kekuatan, tetapi sering juga menjelma menjadi kelemahan dan sumber pertentangan dari umat Islam sendiri Sebagai akibatnya, umat Islam teijebak dalam egoisme kelompok (ananiyah hizbiyah) yang berlebihan dan kehilangan peluang untuk mengembangkan diri menjadi kelompok yang tidak hanya besar dalam jamaah tetapi unggul dalam kualitas.

Oleh karena itu, adanya kepemimpinan yang bersifat kolektif merupakan kewajiban (wajib al-imamah), seperti adanya organisasi yang menjadi wadah silaturahmi merupakan suatu kebutuhan mendesak bagi persatuan, kekuatan, dan kebersamaan umat Islam.

Sejalan dengan perkembangan kehidupan kebangsaan dan era reformasi dewasa ini dengan ditandai dengan adanya keinginan kuat untuk membangun masyarakat Indoneia baru yang adil, sejahtera, demikratis, dan beradab, maka uatu keharusan bagi Majelis Ulama Indonesia untuk meneguhkan jatidiri dan itikad dengan suatu waasan yang menghela proses terwujudnya eradaban Islam di dunia, dan khususnya perwujudan masyarakat Indonesia baru, yang tiada lain adalah masyarakat madani (khair al-ummah) yang menekankan nilai-nilai persamaan (al- musyawarah), keadilan (al-adalah), dan demokrasi (syuro).

G. Posisi MUI Dalam Kehidupan Masyarakat

Sejalan dengan perkembangan kehidupan kebangsaan pada era reformasi, yang ditandai dengan

adanya keinginan kuat membangun suatu masyarakat baru yang adil, sejahtera, demokratis dan beradab, majelis ulama bertekad meneguhkan jatidiri dan itikad dengan suatu wawasan baru untuk menghela proses perwujudan masyarakat Indonesia baru.

Visi yang dimiliki oleh MUI ialah terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik sebagai hasil penggalangan potensi dan partisipasi umat Islam sebagai aktualisasi potensi ulama, zuama, aghniya dan cendikiawan muslim untuk menjayakan Islam dan umat Islam (izzul Islam wa al-muslimin) guna mewujudkan Islam yang penuh rahmat (rahmatan lil-alamin) ditengah kehidupan umat manusia dan masyarakat Indonesia pada khususnya.

Sedangkan misi MUI ialah menggerakan kepemimpinan dan kelembagaan Islam secara efektif, sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menamkan dan memuuk akidah Islamiyah, serta menjalankan syari'ah Islamiyah, dan menjadikan ulama sebagai panutan dalam mengembangkan akhlakui

karimah agar terwujud masyarakat yang berkualitas (khayr al-ummah).

Dengan visi dan misi ini MUI bercita-cita dapat ikut mewujudkan kondisi kehidupan kemasyarakatan yang baik sebagai hasil penggalangan potensi dan partisipasi umat Islam melalui aktualisasi potensi ulama, zuama, cendikiawan muslim untuk kejayaan Islam dan umat Islam ('izzul Islam wai muslimin) guna terwujudnya Islam yang penuh rahmat (rahmatan /il'alamin) di tengah kehidupan umat manusia dan masyarakat Indonesia khususnya.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut di atas, MUI berupaya semaksimal mungkin menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan yang dinamis dan efektif sehingga mam[pu melaksanakan fungsinya sebagai khadimul ummah (pelayan Masyarakat), wasilah wal washiih umah (perantara dan penengah umat), serta sebagai penegak amar ma'ruf nahi munkar. Cita-cita dan upaya yang dilakukan MUI tersebut dirumuskan dalam visi dan missinya. Visi MUI adaiah: Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan

kenegaraan yang baik sebagai hasil penggalanangan potensi dan partisipasi umat Islam melalui aktualisasi potensi ulama, zuama, dan cendikiawan muslim untuk kejayaan islam dan Umat Islam guna terwujudnya Islam yang penuh rahmat ditengah kehidupan umat manusia dan masyarakat Indonesia khususnya. Sedangkan misinya adaiah menggerakan kepemimpinan dan kelembagaan yang dinamis dan efektif sehingga mampu mengawal umata Islam dalam melaksanakan akidah Islamiyah, membimbing merekadalam menjalankan ibadah, menuntun mereka dalam mengembangkan muamalat dan 102menjadi panutan mereka dalam mengembangkan akhlak karimah.

Selanjutnya tujuan dan sasaran MUI, akan tergambar pada program-program yang sudah disepakati dari hasil musyawarah. Adapun tujuan MUI adalah terbangunnya umat Islam yang berkualitas tinggi (khairu ummah), terciptanya sumbaer daya manusia yang berakhlak mulia (akhlakuk karimah) dan terwujudnya kemampuan ekonomi umat yang kuat (Al-lqtishadiyah

al-islamiyah al- Qowwiyah) dengan pola-pola sebagai berikut:

Meningkatkan kualitas pemahaman dan amalan keagamaan setiap pribadi muslim Indonesia yang tercermin dalam tindakan dan perilaku kehidupan sehari-hari yang mengacu pada keseimbangan antara Imtaq (iman dan taqwa) dan Iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi).

Meningkatkan kesadaran hidup beragama, berbangsa dan bernegara di kalangan umat Islam Indonesia sehingga terwujud kondisi ketahanan mental serta sosial yang mantap dan tangguh terhadap tantangan baik dari dalam maupun dari luar, sebagai perwujudan dan pengalaman ajaran Islam di negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

Memantapkan dan meningkatkan peranan MUI dalam membangun umat Islam Indonesia yang berkualitas tinggi dan berakhlak mulia serta mempunyai kemampuan ekonomi yang kuat dalam percaturan global.

Untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan MUI, sasarannya sebagai berikut:

Semakin meningkatnya mutu pemahaman dan pengamalan ajaran Islam di kalangan umat Islam sehingga menjadi motivasi penggerak dalam membangun umat dan bangsa yang berkualitas tinggi dan berakhlak mulia serta berkemampuan ekonomi yang kuat. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama di kalangan anak, remaja, dan pemuda sebagai penerus generasi bangsa yang beriman dan bertakwa, cerdas, trampil kreatif dan mandiri.

Tetap terpeliharanya kerukunan hidup intern umat Islam, kerukunan antar umat beragama, serta kerukunan antar umat islam dengan Pemerintah sebagai yang tak terpisahkan dari upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, Majelis Ulama Indonesia, menetapkan 10 program yaitu :

1. Program pengembangan ukhuwah Islamiyah
2. Program pengembangan Dakwah Islamiyah

3. Program pengembangan Pendidikan islam
4. Program pengembangan Perekonomian Islam
5. Program Pengkajian dan Pengembangan
6. Program Penetapan Fatwa
7. Program Pengembangan Hukum dan Perundang-undangan
8. Program Peningkatan hubungan Luar Negeri
9. Program Peningkatan Kerukunan antar Umat Beragama
10. Program Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Keluarga

Dalam penelitian ini yang akan ditekankan adalah hal yang berkaitan dengan program MUI bidang program dakwah Islam, program pengembangan dakwah Islamiah yang tertuang dalam pedoman dasar MUI adalah :

- Membangun Labortorium Dakwah yang penyelenggaraannya melibatkan para pakar komunikasi, psikologi, mubaligh dan pendidik yang berfungsi melakukan kajian untuk dapat menghasilkan panduan sistem, metode, materi

dan media dakwah yang sesuai dengan sasaran berbagai lapisan masyarakat, dalam rangka perluasan dan efektifitas dakwah

- Mengembangkan dan meningkatkan pelaksanaan dakwah di daerah-daerah khusus/terpencil dengan perencanaan yang lebih komprehensif
- Membuat pedoman dan peta dakwah dari tingkat pusat, daerah hingga kecamatan
- Membangun radio dakwah.²¹³

Demikian perkembangan sekilas MUI dari waktu ke waktu sejak mulai penetapan majelis Ulama Indonesia di tingkat pusat tahun 1975 hingga tahun 2000, dan tampaknya MUI telah mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman yang tentunya dipengaruhi oleh berbagai situasi, baik situasi politik, sosial dan tuntutan global.

Bahkan di setiap melakukan Munas, Muswil dan Musda terjadinya perubahan-perubahan program oriented yang diakselerasikan dengan kemajuan dan

²¹³*Ibid*, h. 20

tuntutan situasi dan kondisi masyarakat, karena masyarakat secara terus menerus mengalami perkembangan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Peran Majelis Ulama Indonesia, secara umum, Majelis Ulama Indonesia mempunyai sembilan orientasi berkhidmat, yang diuraikan sebagai berikut:

- Diniyah. Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan yang mendasari semua langkah dan kegiatannya pada nilai dan ajaran Islam. Karena Islam adalah agama yang berdasarkan pada prinsip tauhid yang ajaran yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, maka konsep keagamaan yang dipahami majelis lama Indonesia adalah keagamaan yang bersifat menyeluruh tersebut.
- Irsyadiyah. Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan dakwah al- Irsyad, yaitu upaya untuk mengajak umat manusia kepada kebaikan serta melaksanakan amar maruf dan nahyi munkar dalam arti yang seluas-luasnya. Setiap kegiatan Majelis Ulama Indonesia

dimaksudkan untuk dawak dan dirancang untuk selalu berdimensi dawah.

- Ijabariyah. Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perhidmatan ijabariyah yang senantiasa memberikan jawaban positif terhadap setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui prakarsa-prakarsa kebajikan (amal shaleh) dalam semangat berlomba-lomba dalam kebaikan (fastabiq al-kahirat).
- Hurriyah. Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perhidmatan independen yang bebas dan merdeka serta tidak tergantung maupun terengaruh oleh pihak-phak lain dalam mengambil keputusan, mengeluarkan pikiran, pandangan dan pendapat.
- Ta 'awuniyah. Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perhidmatan yang mendasrari dari semangat tolong menolong untuk kebaikan dan ketakwaan dalam membela kaum dhu'afa untuk meningkatkan harkat dan martabat serta derajat kehidupan masyarakat. Semangat ini dilaksanakan atas dasar persatuan di kalangan

seluruh lapisan golongan umat Islam. {Ukhuwah Islamiyah) ini merupakan landasan bagi Majelis lama Indonesia untuk mengembangkan persaudaraan kebangsaan (Ukhuwah waihaniyah) sebagai bagian integral bangsa Indonesia dan memperkuat persaudaraan kemanusiaan (Ukhuwah basyariyah) sebagai anggota masyarakat dunia.

- Syuriyah. Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perhidmatan yang menekankan prinsip musyawarah dalam mencapai permufakatan melalui pengembangan sikap demokratis, akomodatif dan aspiratif terhadap berbagai aspirasi yang tumbuh berkembang di dalam masyarakat.
- Tasamuh. Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perhidmatan yang mengembangkan sikap toleransi dan moderat dalam melaksanakan kegiatannya dengan senantiasa menciptakan keseimbangan diantara berbagai arus pemikiran dikalangan masyarakat sesuai dengan syariat Islam.

- Oudawah. Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perhidmatan yang mengedepankan kepeloporan dan iteladanan melalui prakarsa-prakarsa kebijakan yang bersifat perintisan untuk kebutuhan kemaslahatan umat. MUI dapat menjalankan kegiatan oprasional sepanjang tidak tumpang tindih dengan kegiatan ormas-ormas Islam.
- Addualiyah. Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perhidmatan yang menyadari dirinya sebagai anggota masyarakat dunia yang ikut aktif mempeij uangkan perdamaian dan tatanan dunia yang sesuai dengan ajaran Islam. Sesuai dengan hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia menjamin hubungan dan kerjasama dengan lembaga/organisasi Islam Internasional di berbagai negara.

Berdasarkan pada orientasi umum di atas, maka Majelis Ulama Indonesiamemiliki tugas, fungsi dan peran sebagai berikut:

- Sebagai Pewaris Tugas-tugas Para Nabi {Warasat al-anbiya)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pewaris petugas-petugas para Nabi, yaitu menyebarkan agama Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana yang berdasarkan Islam. Sebagai pewaris petugas para Nabi, Majelis Ulama Indonesia menjalankan fungsi profetik yakni memperjuangkan perubahan kehidupan agar berjalan sesuai dengan ajaran Islam, walaupun dengan konsekuensi akan menerima kritik, tekanan, dan ancaman karena perjuangannya bertentangan dengan tradisi, budaya dan peradaban manusia.

- Sebagai Pemberi Fatwa

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa Majelis Ulama Indonesia mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat

beragam aliran paham dan pemikiran serta organisasi keagamaan.

- Sebagai Pembimbing dan Pelayan umat (Ri'ayah wakhadim al-ummah)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelayan umat (kahadim al-ummah), yaitu pelayan umat Islam dan masyarakat luas dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. Dalam kaitan ini, Majelis Ulama Indonesia senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan umat Islam, baik langsung ataupun tidak langsung, akan bimbingan dan fatwa keagamaan. Begitu pula Majelis Ulama Indonesia berusaha selalu tampil di depan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi umat Islam dan masyarakat luas dalam hubungannya dalam pemerintah.

- Sebagai Gerakan Umat Islam Wa al-tajdid

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelopor islah yaitu gerakan kemurniaan Islam secara tajdid yaitu gerakan pembaharuan pemikiran Islam. Apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat

Islam maka Majelis Ulama Indonesia dapat menempuh jalan taufiq (kompromi) dan tarjih (mencari huu yang lebih kuat). Dengan demikian diharapkan tetap terpeliharanya semangat persaudaraan di kalangan umat Islam Indonesia.

- Sebagai Penegak Amar Maruf dan Nahyi Munkar

Majelis Ulama Indonesia wahan penegakan amar maruf nahyi munkar, yaitu dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqamah. Dalam menjalankan fungsi ini Majelis Ulama Indonesia tampil di barisan terdepan sebagai kekuatan moral (moral force) bersama berbagai potensi bangsa lainnya untuk melakukan rehabilitas sosial.

BAB III

PROSEDUR PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di wilayah kerja Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandung sebagai kota terbesar di Jawa Barat, pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa, masyarakat Kota Bandung termasuk masyarakat yang demikian kompleks dalam berbagai hal, baik profesi maupun kepegangan agama dan kepercayaan dan memiliki kesadaran yang cukup tinggi terhadap pelaksanaan ajaran agama. Hal ini terlihat dari tidak adanya konflik antar agama yang selama ini terjadi di berbagai wilayah Indonesia seperti Maluku, Ambon, Sambas dan di daerah lainnya. Selain itu, adanya penambahan jumlah serta penggunaan fasilitas keagamaan dengan terus bertambah baik Gereja maupun Masjid dan terus bertambahnya kegiatan-kegiatan keagamaan terutama dalam agama Islam, yang digunakan untuk kegiatan pengajian, majelis ta'lim dan ibadah lainnya seperti shalat, dan ini tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat umum akan tetapi terjadi pula di lingkungan instansi pemerintah dan swasta.

2. Disamping itu, peningkatan ibadah yang berimplikasi

sosial berupa penyembelihan hewan kurban di bulan Dzulhijah dan kesadaran mengeluarkan zakat terutama zakat fithrah di bulan suci Ramadhan, hal ini dapat dijadikan sebagai bukti adanya peran lembaga-lembaga keagamaan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, yang salah satunya adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandung. Kemudian lokasi penelitian ini ditetapkan di Kantor MUI Kota Bandung

3. Sumber Data dan Cara Menentukannya

Penelitian ini bersifat kualitatif, maka sumber datanya terdiri dari data primer dan data sekunder. Adapun data primer didapatkan dari pengurus MUI Kota Bandung terutama mereka yang memegang jabatan strategis dan yang bertanggungjawab di bidang pengembangan dakwah Islamiyah. Kemudian untuk mendapatkan data sekunder peneliti terlibat langsung dalam melakukan analisis dokumen yang ada pada lembaga utama yang berkaitan dengan sasaran penelitian yaitu dokumen yang ada di MUI Kota 'Bandung, termasuk yang didapatkan dari sumber yang lain berupa' informasi dari bahan-bahan yang berupa naskah, buku, majalah dan mass media.

Kemudian yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Bandung, selanjutnya diambil sampel bertujuan sebagai informan yang didasarkan pada kualifikasi di bidangnya dengan menggunakan sampel purposif, yaitu pilihan tertentu dari peneliti mengenai aspek yang dijadikan fokus utama pada situasi tertentu dan oleh karena itu akan dilakukan secara berkelanjutan sepanjang penelitian berjalan.²¹⁴

Sampel yang sifatnya purposif sangat bergantung pada tujuan penelitian, dan sampel yang dimaksud berupa hal- peristiwa - manusia - situasi sosial tertentu yang' di observasi. Sampel dalam penelitian kualitatif adalah sampel bertujuan yang ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan informasi.² Menurut Faishal (1990: 57) bahwa konsep sampel kualitatif adalah berkaitan dengan bagaimana memilih informan atau situasi sosial tertentu yang dapat memberikan informasi secara akurat. Maka yang dibutuhkan adalah selesainya perolehan informasi oleh karena itu dalam penelitian ini ada tiga tahapan dalam pemilihan sampel.

²¹⁴Lexy J. Moleong, *Melode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), h. 165

4. Tahap Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, biasanya dilakukan secara bertahap yakni tahapan orientasi, tahapan eksplorasi dan member check. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tahapan-tahapan tersebut seperti diuraikan di bawah ini.

1. Tahap orientasi

Dalam tahap orientasi peneliti akan mengumpulkan data secara umum, dengan mengadakan observasi dan wawancara secara umum dan terbuka agar memperoleh informasi yang jelas terhadap obyek penelitian. Informasi dari responden dianalisis untuk menemukan hal yang menonjol, menarik, penting dan berguna untuk diteliti, selanjutnya dilakukan secara mendalam.

2. Tahap Ekplorasi

Pada tahap ekplorasi, fokus penelitian telah lebih jelas terarah dan spesifik. Observasi dapat ditujukan pada hal-hal yang dianggap ada hubungannya dengan

Ibid., h. 166

fokus penelitian. Wawancara dilakukan dengan lebih terstruktur dan mendalam sehingga informasi yang dalam dan bermakna akan didapatkan. Karenanya diperlukan informasi

yang kompeten dan mempunyai pengetahuan yang cukup banyak mengenai masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini sampel hanyalah sumber yang dapat memberikan informasi dan sampel dipilih secara purposif.

3. Tahap Member Check

Dari hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan/dikumpulkan, sejak awal dianalisis, dituangkan dalam bentuk laporan, hasilnya disampaikan atau dikemukakan kepada responden untuk dicek kebenarannya, dan tentunya member check akan dilakukan setelah wawancara dilakukan dan selanjutnya apabila terjadi ketidakjelasan akan meminta kepada responden untuk mengadakan perbaikan dan mengkonfirmasi kesesuaiannya hasil penelitian dengan informasi yang disampaikannya.

5. Metode yang digunakan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode survei, karena metode ini dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atas populasi untuk mewakili seluruh populasi."

Penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi yang menggunakan kuisioner

sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Kemudian pada innumnya yang merupakan unit analisa dalam penelitian survai adalah individu. Dan yang dijadikan subyek penelitian ini adalah pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandung periode 1996-2001 yang membidangi dakwah Islamiyah. Dan penelitian survai dapat digunakan untuk mendeiskripsikan, karena penelitian deskriptif dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu. Peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan hipotesis.²¹⁵

Disamping itu kegunaan penelitian survai adalah untuk mengadakan evaluasi, disini yang ditekankan adalah sampai seberapa jauh tujuan yang digariskan pada program MUI kota Bandung dalam pencapaian tujuannya, dan sekaligus dapat digunakan untuk mengadakan prediksi mengenai fenomena sosial.

Consello G. Savilla mengemukakan bahwa metode survai dapat digunakan untuk mengumpulkan data yang relatif terbatas dari jumlah kasus yang relatif besar jumlahnya dan metode ini menekankan lebih pada penentuan informasi tentang variabel dari pada informasi tentang individu serta

²¹⁵ *Ibid.*, h. 5

untuk mengukur gejala-gejala yang ada tanpa mengukur kenapa gejala tersebut ada, sedangkan sampel survai dilakukan hanya pada sebagian kecil dari suatu populasi.²¹⁶

Survai bertujuan membuat generalisasi dan sebagian malahan untuk membuat prediksi, dengan menggunakan pendekatan formal akhima survai bersifat inferensial. ²¹⁷

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini tentunya akan disesuaikan dengan persoalan penelitian, paradigma yang digunakan, teori dan metodologi. Karena penelitian ini bersifat kualitatif, maka teknik yang digunakan adalah observasi partisipatif, wawancara mendalam dan dokumentasi. Pengambilan data dilakukan dalam waktu relatif lama, tahap demi tahap dan sifatnya berkembang, karena antara pengambilan data dan analisa data dilakukan secara simultan.

Selanjutnya data yang didapatkan dalam penelitian yang dilakukan melalui observasi merupakan sebagai gambaran umum tentang keberadaan MUI kota Bandung di

²¹⁶ Consuelo G. Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta, UI-Press, 1993), h. 76

²¹⁷ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi IV, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), h.

tengah kehidupan sosial dan wawancara mendalam dapat mengungkapkan tentang bentuk-bentuk peranan MUI kota Bandung dalam mendorong perubahan sosial baik yang berupa fisik keagamaan yang berupa penambahan jumlah masjid, dan pemanfaatannya maupun dalam mendorong kesadaran ibadah lainnya seperti mengeluarkan kewajiban zakat, penyembelihan hewan qurban di bulan Dzulhijah.

Disamping itu teknik lain untuk melengkapi pengumpulannya dengan teknik dokumentasi, hal ini berupa laporan, catatan yang ada pada MUI kota Bandung. Himbauan dan lembaga-lembaga yang bermitra dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI Kota Bandung seperti Kantor Departemen Agama, Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bandung.

Teknik-teknik di atas, tampaknya amat jelas dan dianggap akan mampu mengumpulkan data yang akurat sesuai dengan kebutuhan penelitian dan akan dapat mengangkat hal-hal yang dibutuhkan, baik secara data fisik maupun data yang sifatnya konsepsional, sehingga penelitian dapat dianggap sah secara ilmiah dan dapat dibuktikan secara empiris dilapangan.

2. Operasional Konsep/ Definisi Operasional

Supaya terjadi kesinambungan dalam penjelasan penelitian maka perlu dikenikukan vairabel yang menjadi definisi operasional yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Adapun definisi operasional pada penelitian ini sebagai berikut:

. Peran

Secara teoritis, peran berhubungan dengan pola prilaku yang diharapkan dengan posisi status tertentu.²¹⁸ Peranan dapat diartikan 1) aspek dinamis dari kedudukan, 2) perangkat hak-hak dan kewajiban- kewajiban, 3) prilaku actual dari pemegang kedudukan, 4) bagian dari aktivitas yang dimainkan oleh seseorang.²¹⁹ Peranan disini adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh MUI kota Bandung dalam mendukung pendirian rumah ibadah dan peningkatan kesadaran beribadah berupa zakat dan qurban.

. Majelis Ulama

Majelis adalah suatu istilah arab yang tampaknya telah digunakan di Jajirah Arab pada masa pra-islam untuk

²¹⁸ Gibson, Ivancevich and Dannely, *Organisasi dan Manajemen Prilaku Smktyr Proses*, (Jakarta: Erlangga, 1994), h. 704

²¹⁹ Soejono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: Rajawali, 1985), h. 440

menunjuk apada dewan suku atau dewan suku-suku. Majelis dipakai untuk ruang pertemuan khalifah dan, kemudian, ruang pertemuan milik kesultanan. Majelis berarti juga sekelompok orang dihadiri oleh tokoh terkemuka, yang memiliki wibawa keagamaan, atau seorang penyair utama.

Majelis terutama dipakai sebagai nama suatu lembaga yang dirancang untuk menangani persoalan yang berhubungan dengan kepentingan publik. Dalam karakteristiknya bahwa majelis memiliki makna sebagai sebuah organisasi yang mempunyai tujuan jelas dan peraturan internal organisasi.²²⁰ Majelis juga dipakai untuk menunjuk lembaga yang mempunyai fungsi resmi dalam masyarakat dan melayani kepentingan umum, yang memberi manfaat bagi masyarakat terpilih pada suatu pertemuan yang Ulama menduduki posisi penting karena pengetahuannya, mereka selalu memainkan peran sentral dalam penapsiran ajaran agama dalam upaya mengantisipasi dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang terus berubah.²²¹

²²⁰ John L.Esposito, *Ensiklopedi Oxford, Dunia Baru Islam*, (Bandung: Mizan, 2001), h. 321

²²¹ Muhammad AS Hikam, *Islam Demokrasi dan dan Pemberdayaan Civil Society*, (Jakarta: Erlangga, 2000), h. 23

Ulama menurut lughat (bahasa) berasal dari bahasa Arab, jamak, plural dari kata 'alim yang berarti orang yang mengetahui, orang yang berilmu. Ulama berarti para ahli ilmu pengetahuan atau para ilmuwan. Ulama (jamak dari 'alim) adalah ahli dalam ilmu agama atau sekelompok orang yang mendalami ajaran agama. Ulama secara harfiah berarti orang-orang yang berilmu" orangnya disebut 'ahm adalah ahli dalam ilmu tertentu yang berhubungan dengan ilmu agama dan selalu diharapkan, bahwa seseorang 'alim menunjukkan sifat-sifat orang yang beriman kepada Allah dan melaksanakan ajaran agama Islam atau ulama adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang ilmu-ilmu agama.

Selanjutnya ulama yang dijadikan obyek penelitian adalah ulama-ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung

. Fasilitas

Yang dimaksud fasilitas dalam penelitian ini adalah sarana umum bagi umat Islam untuk melaksanakan ibadah yang berupa fisik bangunan seperti masjid., mushala.dan fasilitas lainnya seperti kantor Badan Amil zakat kota Bandung.. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui pertumbuhan fasilitas keagamaan Islam, yang dibangun oleh

pemerintah, swasta dan swadaya masyarakat, karena penambahan fasilitas merupakan adanya sebuah pembaharuan di masyarakat.

Perubahan Sosialisasi

Perubahan sosial adalah suatu proses kemasyarakatan yang berjalan terus menerus, atau suatu perubahan yang terjadi di masyarakat yang meliputi berbagai aspek kehidupan, sebagai akibat dari adanya dinamika anggota masyarakat yang merupakan sebuah tuntutan kehidupan untuk mencari kestabilan. Perubahan sosial dapat dilihat dari adanya perubahan sikap mental dan perubahan sarana-sarana kehidupan. Adapun yang dimaksud dalam perubahan sosial dalam penelitian ini adalah perubahan yang terjadi dalam fasilitas keagamaan dan kesadaran melaksanakan ajaran agama di kota Bandung terutama yang terjadi pada penganut agama Islam.

Dakwah adalah seruan atau ajakan kepada keinsyafan atau usaha mengubah situasi kepada situasi yang lebih baik terhadap pribadi dan masyarakat. Dakwah adalah ilmu yang mewujudkan ajaran Islam dalam kenyataan hidup bermasyarakat di semua segi kehidupan atau suatu perangkat kepercayaan yang memberikan pedoman kepada manusia

bagaimana mengatur hubungan dengan Tuhan dengan sesama manusia dan makhluk lainnya.

Masjid

waktu ke Masjid merupakan sarana untuk kegiatan ibadah ummat Islam, baik yang bersifat spiritual maupun kegiatan sosial dan kegiatan pengajaran terhadap penganutnya yang berupa majlis ilmu untuk semua lapisan umat Islam baik anak- anak, remaja maupun dewasa. Masjid yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masjid yang dibangun oleh masyarakat, pemerintah, swasta di Kota Bandung, baik masjid besar, masjid jami maupun masjid yang dibangun oleh individu masyarakat.

Zakat

Zakat adalah kewajiban kepada setiap orang muslim yang memiliki harta senishab dengan syarat-syaratnya. Allah SWT mewajibkan perintah zakat tertuang dalam Al-quran. Seperti halnya dalam surat At-Taubah ayat 103 “Ambilah zakat dari sebagian waktu. harta mereka, dengan zakat itu mereka membersihkan dan menyucikan mereka. Avat lain mengutarakan “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha kalian yang baaik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi

untuk kalian (Al-Baqarah : 267) dan dalam Surat Al-Mujamil : 20 ditegaskan “ dirikanlah shalat dan keluarkanlah zakat.

Pada penelitian ini difokuskan pada zakat fitrah di Kota Bandung , karena zakat fitrah adalah sunnah yang diwajibkan terhadap setiap individu kaum muslimin, baik budak, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil maupun orang dewasa.

Qurban

Qurban yang lazim dan dipahami oleh masyarakat adalah menyembelih hewan seperti Lembu, Unta, Kambing, Sapi pada bulan Dzulhijjah setelah melaksanakan idul adha.. Karena qurban merupakan salah satu ciri kesadaran melaksanakan ajaran agama Islam . Selanjutnya dalam penelitian ini akan melihat dan menganalisis fluktuasi qurban yang ada di Kota Bandung dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2001, yang terdata oleh lembaga agama Islam di Kota Bandung.

3. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah proses penelitian, karena dengan analisislah data tersebut dapat mengandung makna yang berguna untuk menjelaskan atau memecahkan masalah penelitian. Data

mentah yang telah dikumpulkan dibagi dalam beberapa kelompok kemudian dilakukan manipulasi serta diproses sedemikian rupa sehingga data tersebut mampu menjawab masalah. Mengadakan manipulasi data mentah berarti mengubah data mentah dari bentuk awainya menjadi suatu bentuk yang dapat dengan mudah memperlihatkan hubungan-hubungan antara dua atau lebih fenomena.²²²

Setelah data disusun dalam beberapa kelompok serta menganalisis hubungan- hubungan yang terjadi, perlu membuat beberapa penafsiran terhadap hubungan antara fenomena yang terjadi dan membandingkannya dengan fenomena lain di luar penelitian.

Menurut Maleong (1995) bahwa analisis data dapat dilakukan melalui beberapa fase, yaitu : diadakan katagorisasi data, dan Seleksi data primer dan data skunder

Data skunder dikelompokkan, diolah, lalu dideskripsikan dengan menggunakan tampilan berupa gambar dan tabel, Sedangkan data primer mula-mula diklasifikasikan, dikatagorisasikan, diverivikasi dan diinterpretasi. Proses ini dilakukan secara bertahap berdasarkan informasi dari

²²² *Dasang Kahmad, Metode Penelitian Agama Perspektif Umu Perbandingan Agama, Bandung, Pustaka Setia, 2000 h. 95*

informan dan hasil observasi. Proses ini pula dilakukan ketika masih berada di lapangan dan sesudah proses pengumpulan data apa yang masih perlu dicari, kemudian pertanyaan apa yang harus dijawab, dan metoda apa yang harus dipakai untuk mencari informasi baru. Sementara menurut Nasution (1992: 126 - 130) analisa data adalah prosos penyusunan data agar dapat ditafsirkan, yang berarti menggolongkannya dalam suatu pola tertentu, kemudian diinterpretasikan dalam arti memberikan makna, dan mencari hubungan sebagai konsep yang telah Selanjutnya penyajian data yang berupa tulisan panjang perlu disederhanakan dengan tetap menjaga keutuhannya. Dari data yang telah direduksi, dipilih dan dipilih serta dilakukan verifikasi, selama penelitian, maka kesimpulan akan muncul dan tumbuh bersama dengan pengumpulan data tersebut, sehingga akan menjaga kredibilitas dan obyektifitas penelitian.

Dengan mengacu pada uraian di atas, maka analisis yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap, yaitu :

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan akan disusun dalam bentuk tabel atau diagram secara lengkap, kemudian dianalisis secara komprehensif. Data tersebut direduksi, dikumpulkan.

dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok dan difokuskan kepada hal yang sangat penting yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam dari hasil observasi dan wawancara. Reduksi dapat membantu dalam memberikan kode kepada aspek-aspek yang sangat dibutuhkan dalam penelitian.

2. Display Data

Mengingat data yang terkumpul sangat banyak, sehingga akan sedikit menyulitkan dalam menginformasikan gambaran detail secara keseluruhan yang akhirnya sulit untuk mengambil kesimpulan. Dan untuk mengatasi kesulitan tersebut peneliti melakukan dengan cara membuat matrik, model dan grafiks berupa gambar sehingga data secara keseluruhan sampai pada bagian-bagian detailnya dapat dibaca dipetakan dengan jelas. Hal ini untuk memudahkan dalam membaca dari hasil penelitian dilapangan baik secara observasi maupun wawancara, dan dianalisis secara tajam sehingga dapat dibaca dengan mudah dan jelas.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Data yang sudah dielaborasi, dipolakan dan dipetakan, difokuskan serta disusun secara sistematis, baik berdasarkan penentuan fokus bahasan ataupun model matrik dan grafik, kemudian dijabarkan kesimpulannya sehingga data

mempunyai makna yang berarti, dan kesimpulan itu baru bersifat sementara dan bersifat umum. Dan tentunya agar kesimpulan diperoleh secara akurat maka data yang baru perlu dicari yang berguna untuk melakukan verifikasi atau pengujian terhadap didapat dan bersifat tentatif (sementara). Sehingga hasil penelitian dapat dapat dipertanggungjawabkan secara akurat dan ilmiah.